

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMBINAAN TERITORIAL, KONFLIK DAN KEPEMIMPINAN
TERHADAP KUALITAS KEAMANAN DALAM NEGERI
DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA**



Disusun oleh :

Albiner Sitompul
NIM.014281965

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2016

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA, 2016**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN TERITORIAL, KONFLIK DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KUALITAS KEAMANAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

**Jakarta, 25 Januari 2016
Yang Menyatakan**



**ALBINER SITOMPUL
NIM : 01428165**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Albiner Sitompul
NIM : 01428165
Program Studi : Magister Administrasi Publik
**Judul Tesis : PENGARUH IMP LEMENTASI KEBIJAKAN
PEMBINAAN TERITORIAL, KONFLIK DAN
KEPEMIMPINAN TERHADAP KUALITAS
KEAMANAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN
MIMIKA PROVINSI PAPUA**

**Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program
Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka
pada :**

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Februari 2016
Waktu : 14.00 – 15.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Ir.Adi Winata, M.Si

Penguji Ahli : Pheni Chalid, SF, MA,Ph.D

Pembimbing I : Dr. Drs. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si

Pembimbing II : Prof. Daryono, S.H, M.A, Ph.D

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : **PENGARUH IMP LEMENTASI KEBIJAKAN
PEMBINAAN TERITORIAL, KONFLIK DAN
KEPEMIMPINAN TERHADAP KUALITAS
KEAMANAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN
MIMIKA PROVINSI PAPUA**

Penyusun Tesis : **Albiner Sitompul**
NIM : **01428165**
Program Studi : **Magister Administrasi Publik**
Hari/Tanggal : **Kamis, 15 Februari 2016**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Drs. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si
NIP. 195812151986011009



Prof. Daryono, S.H, M.A, Ph.D
NIP. 196407221989031019

Mengetahui,

Kabid Magister Administrasi Publik

Direktur Pasca Sarjana



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP.195910271986031003



Suelati, M.Sc., Ph.D.
NIP. 195202131985032001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji dan syukur kehadirat Illahi Robbi, karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, tugas akhir berupa Tesis yang berjudul Pengaruh Implementasi Kebijakan Pembinaan Teritorial, Konflik dan Kepemimpinan terhadap Kualitas Keamanan Dalam Negeri di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik.

Dalam kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Ir.Adi Winata, M.Si**, selaku Ketua Komisi Penguji yang telah banyak memberikan kesempatan dan keberanian kepada penulis untuk berpikiran maju, ilmiah dan pragmatis, sehingga hasil penelitian yang penulis lakukan menjadi semakin penting dan memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan sistem jaminan kualitas penyelenggaraan suatu fungsi operasi pertahanan keamanan;
2. Bapak **Dr. Drs. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si**, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta koreksi khususnya dalam penggunaan metode penelitian guna menguji teori yang diajukan dalam Tesis ini
3. Bapak **Prof. Daryono, S.H, M.A, Ph.D**, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan, baik berupa pandangan maupun wawasan, sehingga dapat dilakukan penyempumaan terutama yang berkaitan dengan pengujian hipotesis dan teori-teori yang diajukan dalam Tesis ini
4. Bapak **Pheni Chalid, SF, MA,Ph.D**, selaku Penguji Ahli yang telah membesarkan anti pentingnya sebuah penelitian yang penulis lakukan, sehingga hasil penelitian ini menjadi suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Ibu **Suciati, M.Sc., Ph.D.** selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka beserta staf, yang selama ini telah memberikan fasilitas dan pelayanan dalam mengikuti Program Magister
6. Pangdam XVII/Cendrawasih **Mayor Jenderal TNI Hinsia Siburian** yang telah memberi fasilitas dan pelayanan penelitian di wilayah Kodim 1710/Mimika.
7. Rekan-rekan pengurus Nature Sitompul yang telah banyak mendorong baik moril maupun materil, sehingga terwujudnya Tesis ini
8. Istri tercinta **dr. Giriwati Yogasara., MARS** dan Putra-Putri tercinta **Abdul Karim, Nur Annisa dan Nur Auliah** yang dengan setia dan penuh

kesabaran serta ketabahan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Program Magister

9. Ibu Mertua **Ecin Kuraesin. SH** dan Abang-abang **Ir. Alihuddin Sitompul dan Ir. Buyung Sitompu. MT** serta Adik-adik yang tiada hentinya memberikan dukungan dalam menyelesaikan Program Magister
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi Program Magister di Universitas Terbuka.

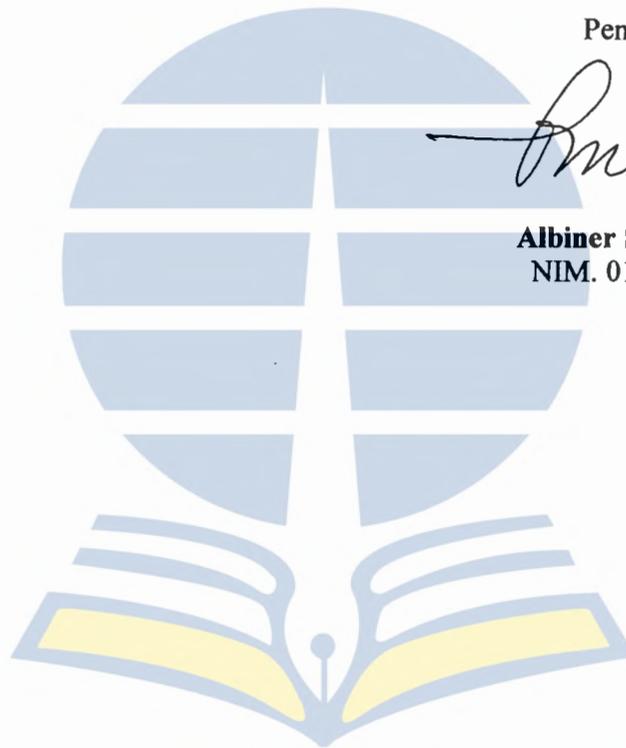
Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti Program Magister ini. mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya penulis.

Jakarta, Januari 2016

Peneliti



Albiner Sitompul
NIM. 01421965



DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAKSI.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Konsep Implementasi Kebijakan.....	7
1. Faktor Komunikasi (<i>Communication</i>).....	9
2. Faktor Sumber Daya (<i>Resources</i>).....	9
3. Faktor Sikap Pelaksana (<i>Dispositions</i>).....	10
4. Faktor Struktur Birokrasi (<i>Bureaucratic Structure</i>).....	11
B. Konsep Binter Dalam Kontek Administrasi Publik.....	13
C. Kebijakan Dalam Penanganan Konflik Di Kab. Mimika ...	17
1. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA).....	19
2. Dominasi Migran.....	21
3. Penyeragaman Identitas Budaya dan Pemerintahan Lokal.....	22
4. Tindakan Represif oleh Militer.....	23
D. Konsep Kepemimpinan.....	28
E. Strategi Kodim Mimika Menjaga Keamanan Dalam Negeri	31
F. Penelitian Terdahulu.....	34
G. Beda Penelitian yang dilakukan dengan Penelitian sebelumnya.....	35
H. Operasionalisasi Konsep.....	36
I. Definisi Operasional konsep.....	36
J. Operasionalisasi variabel.....	37
K. Kerangka Pemikiran.....	41
1. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	41
2. Spesifikasi Model.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Desain Penelitian.....	42
B. Sumber Data dan Pemilihan Informan.....	42
C. Instrumen Penelitian.....	44
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	44

E.	Metode Analisis Data	45
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A.	Deskripsi Objek Penelitian	47
1.	Agama	48
2.	Budaya	49
3.	Kesetaraan	50
B.	Hasil	51
1.	Hasil Penelitian	55
2.	Analisis Hasil Penelitian	60
a.	Uji Reliabilitas	60
b.	Uji Validitas	62
c.	Uji Asumsi Klasik	62
1)	Uji Normalitas	62
2)	Uji Multikolinearitas	63
3)	Uji Autokorelasi	64
4)	Uji Heterokedasitas	65
5)	Uji Linearitas	67
d.	Analisis Regresi Berganda	69
3.	Uji Hipotesis	71
C.	Hasil Penelitian dan Pembahasan	71
1.	Uji hipotesis pada uji simultan	71
2.	Uji hipotesis pada uji Parsial	75
3.	Upaya Integrasi di papua	78
4.	Upaya Menangani Konflik Terpadu	80
5.	Upaya pendekatan sosial	83
a.	Pendekatan Agama	84
b.	Pendekatan Budaya	85
c.	Pendekatan Kesetaraan	86
6.	Pelatihan Kepemimpinan terpadu mencegah konflik	89
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	92
A.	Kesimpulan	92
B.	Saran	94
Daftar Pustaka	96
Lampiran
A.	Angket Penelitian	99
B.	Pedoman Wawancara	116
C.	Transkrip wawancara	121
D.	Tabel-tabel	136

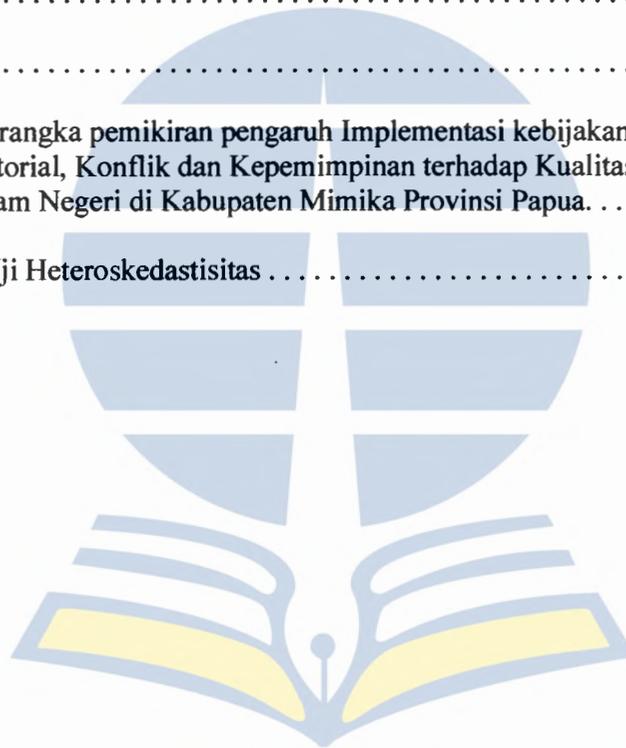
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Operasionalisasi variabel implementasi kebijakan Binter	37
Tabel 2.2 Operasionalisasi variabel konflik	38
Tabel 2.3 Operasionalisasi variabel Kepemimpinan	39
Tabel 2.4 Operasional Variabel Kualitas keamanan dalam negeri di Kabupaten Mimika	40
Tabel 4.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin Responden	54
Tabel 4.2 Karakteristik Berdasarkan Umur Responden	54
Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
Tabel 4.4 Karakteristik Berdasarkan Masa Kerja	55
Tabel 4.5 Deskripsi Frekuensi Total Jawaban pada Variabel X_1	56
Tabel 4.6 Deskripsi Frekuensi Total Jawaban pada Variabel X_2	57
Tabel 4.7 Deskripsi Frekuensi Total Jawaban pada Variabel X_3	58
Tabel 4.8 Deskripsi Frekuensi Total Jawaban pada Variabel Y	59
Tabel 4.9 Uji Reliabilitas Variabel Kebijakan Binter Reliability Statistics.	60
Tabel 4.10 Uji Reliabilitas Variabel Konflik di Timika Reliability Statistics	61
Tabel 4.11 Uji Reliabilitas Variabel Kepemimpinan Reliability Statistics .	61
Tabel 4.12 Uji Reliabilitas Variabel Keamanan dalam Negeri di Timika Reliability Statistics	61
Tabel 4.13 Tes Normalitas	62
Tabel 4.14 Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4.15 Uji Autokorelasi Model Summary ^b	65
Tabel 4.16 Hasil Statistik Uji Linearitas ANOVA Table.	67
Tabel 4.17 Koefisien Regresi Variabel X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y dan sisanya sebesar 44,6 % dipengaruhi oleh faktor2 lainnya . .	69

Tabel 4.18 Koefisien Uji F Variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y	70
Tabel 4.19 Persamaan Regresi Variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y	70
Tabel 4.20 Koefisien Uji F Variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y	72
Tabel 4.21 Persamaan Regresi Variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	31
Gambar 2.2	36
Gambar 2.3 Kerangka pemikiran pengaruh Implementasi kebijakan Pembinaan teritorial, Konflik dan Kepemimpinan terhadap Kualitas Keamanan Dalam Negeri di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.	41
Gambar 4. Uji Heteroskedastisitas	67



ABSTRAKSI

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh penjelasan pengaruh dan sejauh mana implementasi kebijakan Pembinaan Teritorial (Binter), menangani konflik sosial dan peningkatan gaya dan model kepemimpinan secara parsial dan bersama-sama terhadap kualitas keamanan di kabupaten Mimika

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif didukung dengan statistik deskriptif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam serta menyebarkan angket kepada para responden

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap hasil penelitian ditemukan bahwa konflik yang terjadi di Kab. Mimika karena kurangnya implementasi Binter dan kualitas gaya kepemimpinan tokoh masyarakat dalam menangani konflik yang kurang baik, sehingga kualitas keamanan di Kabupaten Mimika

Penelitian ini menemukan bahwa, Binter, konflik dan Kepemimpinan Tokoh Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kualitas keamanan di Kabupaten Mimika, baik secara parsial maupun secara bersama-sama.



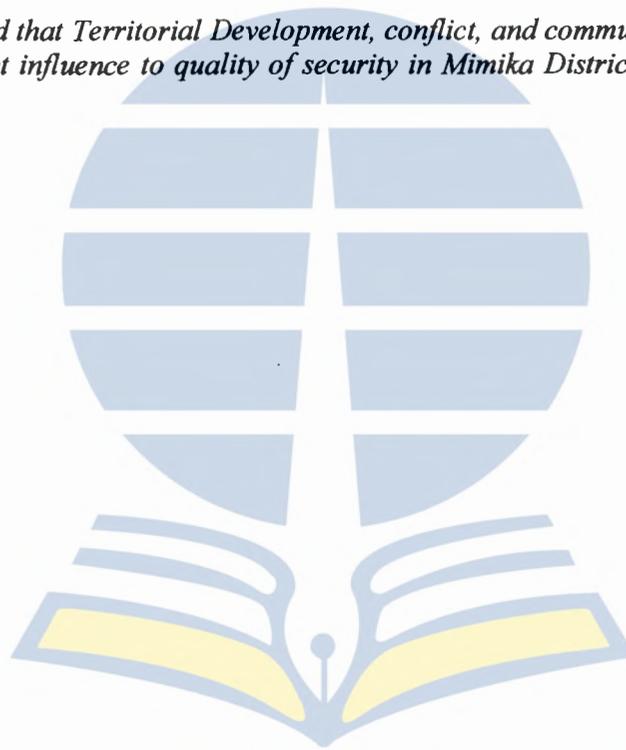
ABSTRACT

This study was conducted to observe the influence of policy implementation of Territorial Development, social conflicts and the leadership styles to enhance quality of security in Mimika district

Analysis method is descriptive qualitative supported by descriptive statistics. The research data were collected through observation, study of documents and in-depth interview and questionnaires

Based on the analysis show that the results of the study that the conflict answer due to lack of implementation Territorial Development and the leadership style of community leaders in dealing with the conflict, so does the quality of security in the district. Mimika

The study found that Territorial Development, conflict, and community leadership have significant influence to quality of security in Mimika District, partially and simultaneously.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi dan globalisasi telah merubah dan membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat demokratis di dunia. Perubahan ini dapat dilihat dari sikap dan tingkah laku masyarakat Indonesia yang semakin kritis dan bebas menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun sikap kebebasan yang ditunjukkan masyarakat kurang didasari dengan kepribadian Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai jati diri bangsa Indonesia termasuk di Kabupaten Mimika, sehingga sering terjadi konflik yang berkepanjangan menjadi perang suku yang berakibat buruk terhadap keamanan dalam negeri dan menghambat pembangunan nasional. Maka dibutuhkan keterlibatan semua pihak termasuk TNI melalui Pembinaan Teritorial (Binter) dengan metode komunikasi sosial untuk memberdayakan masyarakat agar mempunyai ketahanan terhadap konflik.

Agama menciptakan kedamaian, namun berdasarkan data dari Setara Institute, kekerasan menyangkut isu keagamaan mengalami peningkatan dari 224 kasus pada 2011 menjadi 264 pada 2012. Ini menunjukkan, masyarakat Indonesia masih terlihat 'gemar' melakukan kekerasan dengan dalih agama. Wahid Institute juga menunjukkan data

yang hampir sama, bahwa kasus kekerasan menyangkut isu keagamaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan kelompok organisasi massa (ormas) pada 2011 terjadi 267 kasus dan pada 2012 meningkat menjadi 278 kasus. Bila satu kasus melibatkan 20 orang saja, berapa juta orang Indonesia yang pernah melakukan kekerasan dari 2010 hingga 2016? Bagaimana kondisi di Kabupaten Mimika? Diharapkan berkurang, atau tidak terjadi lagi konflik.

Keberadaan pemimpin di tengah masyarakat selalu menciptakan suasana yang kondusif, namun berbeda di Kab. Mimika, Kepemimpinan tokoh masyarakat sering tidak berpihak kepada rakyat, khususnya dalam pemanfaatan hak ulayat tanah adat yang sering menimbulkan konflik, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani konflik. Hal ini tergambar dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang “Kompas” Juli-Agustus 2013 dimana sebanyak 77,8 % masyarakat belum puas terhadap pemerintah menangani konflik bernuansa agama, 77,8% bernuansa politik (vertical), dan 71,1% bernuansa etnis, warga asli dengan migran (horizontal). Kondisi ini akan menumbuhkan sikap apatis masyarakat terhadap lingkungan dan resistensi masyarakat terhadap pemerintah apabila tidak segera disikapi dengan baik dan terpadu.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika tahun 2014 – 2019, dalam misi ke dua Pemkab

Mimika adalah meningkatkan Modal Sosial dan Kapasitas Kelembagaan Sosial Berbasis Kebersamaan, dengan menyadari perlunya peningkatan modal sosial yang disertai peningkatan kapasitas kelembagaan sosial yang berbasis kebersamaan, guna menyiapkan kesejahteraan, rasa aman dan rasa damai di wilayah Kabupaten Mimika. Namun kenyataannya, berdasarkan data Polda Jayapura, dari tahun 2013 s/d 2015 terdapat peningkatan gangguan keamanan dari 16 kasus menjadi 20 kasus. Maka kondisi itu harus segera disikapi dengan melibatkan unsur-unsur musyawarah pimpinan daerah agar dapat memanfaatkan Binter untuk membantu Pemkab Mimika meningkatkan kelembagaan sosial dengan meningkatkan kualitas kepemimpinan Tokoh-tokoh masyarakat di Kab. Mimika.

Keberadaan *PT. Freeport* seyogyanya telah meningkatkan kesejahteraan dan keamanan di Kab. Mimika. Namun kenyataannya berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika (BPS), Mimika dalam angka 2014, Penduduk miskin di kabupaten Mimika sebesar 40,2 juta jiwa (20,37 persen), meningkat dibanding dengan 2013. Disamping itu, pada tahun yang sama 2014, terjadi perang suku di kampung Jayanti, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, antara suku Dani dan suku Moni yang mengakibatkan korban jiwa 5 orang pembakaran *camp* kedua suku yang bertikai sebanyak 6 rumah, aksi bentrokan tersebut terjadi akibat perebutan lahan adat yang diklaim oleh suku Moni. Kejadian ini menunjukkan potensi konflik di Kab. Mimika sangat tinggi, seperti gunung

es. Maka dibutuhkan kebijakan Pemkab Mimika untuk melibatkan Binter untuk menerapkan komunikasi sosial untuk menyadarkan masyarakat.

Komando Distrik Militer (Kodim) terus melaksanakan Binter dalam menangani konflik, namun konflik masih saja terjadi, khususnya di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang mempunyai sumber daya alam (SDA) yang banyak. Maka diperlukan kebijakan Pemkab Mimika untuk mendukung komunikasi sosial Binter Kodim Mimika untuk meningkatkan kualitas gaya kepemimpinan tokoh masyarakat guna melaksanakan upaya-upaya mengurangi konflik agar kualitas keamanan dalam negeri di Kabupaten Mimika semakin baik.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dan dihadapkan dengan beberapa konflik di kabupaten Mimika sejak 2014 s/d 2015, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Seauhmana pengaruh implementasi kebijakan Binter komunikasi sosial terhadap kualitas keamanan di kabupaten Mimika?
2. Seauhmana konflik sosial terhadap kualitas keamanan di kabupaten Mimika?
3. Seauhmana gaya dan model kepemimpinan terhadap kualitas keamanan di kabupaten Mimika?

4. Seauhmana implementasi kebijakan Binter komunikasi sosial , menangani konflik sosial dan gaya serta model kepemimpinan secara bersama-sama terhadap kualitas keamanan di kabupaten Mimika?

C. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh penjelasan pengaruh pelaksanaan implementasi kebijakan Binter komunikasi sosial terhadap kualitas keamanan di kabupaten Mimika,
2. Memperoleh penjelasan pengaruh menangani konflik sosial terhadap kualitas keamanan dalam di kabupaten Mimika,
3. Memperoleh penjelasan pengaruh peningkatan gaya dan model kepemimpinan terhadap kualitas keamanan di kabupaten Mimika,
4. Memperoleh penjelasan pengaruh pelaksanaan implementasi kebijakan Binter, menangani konflik sosial dan peningkatan gaya dan model kepemimpinan secara bersama-sama terhadap kualitas keamanan di kabupaten Mimika.

D. Kegunaan Penelitian

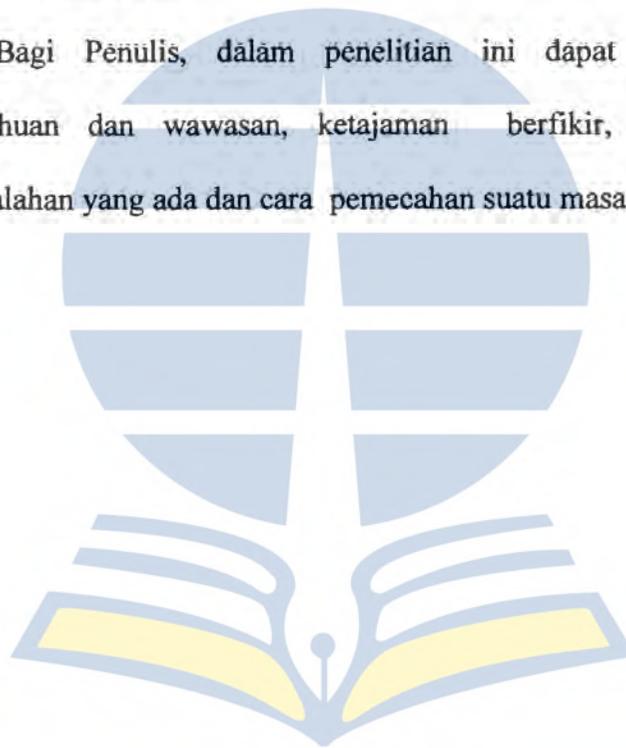
Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperoleh tiga nilai kemanfaatan, yaitu:

1. Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan rasionalitas dan pengaruh implementasi kebijakan Pembinaan Teritorial,

konflik dan kepemimpinan terhadap kualitas keamanan dalam negeri di Kabupaten Mimika yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang teori implementasi kebijakan Binter.

2. **Praktis** : Hasil penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan sebagai upaya revitalisasi khususnya dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan fungsi Binter dalam menangani konflik dan peran Pemimpin terhadap kualitas keamanan dalam negeri di Kabupaten Mimika.

3. Bagi Penulis, dalam penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, ketajaman berfikir, kritis terhadap permasalahan yang ada dan cara pemecahan suatu masalah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi Kebijakan.

Jones (1984 : 166) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu:

1. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan,
2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
3. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Selanjutnya Subarsono (2005:12) mengemukakan bahwa : “Aspek implementasi dalam proses kebijakan publik harus memperhatikan siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dan apa yang mereka kerjakan, serta apa dampak dari isi kebijakan itu”. Sementara Suharto (2005:14) menyatakan bahwa : “Implementasi kebijakan itu merupakan proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil”.

Untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sebuah Implementasi kebijakan, menurut Josy Adiwisatra dalam prolognya pada buku Tachjan (2006 : xv) sangat tergantung pada :

“Keberhasilan mengidentifikasi jejaring kerjasama antar aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik itu, karena pada akhirnya aktor itulah yang akan melaksanakan apapun kebijakan publik yang dibuat. Karena itu, sejak tahapan formulasi kebijakan publik sudah harus diketahui secara pasti siapa yang berkepentingan, bagaimana interaksi antar aktor terbentuk, serta strategi apa yang digunakan untuk mencapai kepentingan itu.”.

Dari pandangan diatas, lebih menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya terletak pada kemampuan dari implementor atau pelaksana kebijakan, akan tetapi bagaimana para pembuat/penentu atau aktor kebijakan tersebut dapat bertanggungjawab sampai pada keberhasilan pelaksanaan implementasi setiap kebijakan yang dibuatnya.

Edwards III (1980:9) mengemukakan: *“In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?”* Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III (1980:10) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: *“Communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure”*.

1. **Faktor Komunikasi (*Communication*)**

Sehubungan dengan pentingnya faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan publik, Edwards III (1980:10) menegaskan: *Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent.* Faktor komunikasi menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan konsisten. Tidak sempurnanya aspek komunikasi juga dapat mengakibatkan para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan spesifik. Otoritas ini tidak akan diperiksa sebagaimana mestinya guna mendahulukan tujuan semula dari pembuat kebijakan.

2. **Faktor Sumber Daya (*Resources*)**

Sehubungan dengan faktor *Resources* (Sumber Daya), Edwards III (1980:10) menjelaskan :

“the authority to ensure the policies are carried out as they are intended and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services”.

Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia/aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan

tersebut. Hal ini dapat menjelaskan tesis bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efektif.

Sumber daya yang penting antara lain jumlah staf yang cukup dengan keahlian yang memadai, informasi yang cukup dan relevan mengenai instruksi implementasi kebijakan, otoritas yang menjamin bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimaksud, dan fasilitas, termasuk bangunan-bangunan, tanah, dan suplai untuk memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak mencukupi menunjukkan bahwa hukum tidak akan dapat dilaksanakan, pelayanan tidak akan dilaksanakan, dan aturan-aturan yang masuk akal tidak akan disusun.

3. **Faktor Sikap Pelaksana (*Dispositions*)**

Menyangkut sikap pelaksana yang juga sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan, kembali Edwards III (1980:11) menjelaskan :

*“If implementation is to proceed effectively, not only must implementers know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Akan tetapi arah kebijakan itu menjadi lebih penting, kemudian Edwards III mengatakan, *The way in which implementers exercise their discretion, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies.**

Para pelaksana tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan sering berhadapan dengan tugas-tugas untuk memanipulasi atau bekerja dalam lingkungan disposisi para pelaksananya atau bahkan membatasi otoritasnya.

4. **Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)**

Berkenaan dengan struktur birokrasi sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan, Edwards III (1980:11) menjelaskan:

“Organizational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste scarce resources, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross-purposes, and result in important functions being overlooked”.

Administrator kebijakan membangun standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Sayangnya standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan.

Asal usul karakteristik organisasi, fragmentasi birokrasi yang berbeda akan menghambat implementasi kebijakan, pemborosan sumber daya, menyebabkan tindakan yang tidak diharapkan, menghambat koordinasi, akibat proses kebijakan pada maksud yang

berlawanan, dan sebab beberapa kebijakan yang gagal. Maka dibutuhkan keterpaduan.

Berorientasi pada berbagai definisi dan model implementasi kebijakan baik ditinjau dari segi wujud, proses maupun fungsi, maka untuk kepentingan penelitian sehubungan dengan teori yang digunakan untuk mempertegas variabel bebas (X) yakni : implementasi kebijakan Pembinaan teritorial, maka peneliti memilih teori implementasi kebijakan menurut Edwards III yang mengedepankan empat faktor implementasi, yakni: 1) komunikasi (*communication*), 2) sumber daya (*resources*) 3) sikap pelaksana (*dispositions*), dan 4) struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Pemilihan terhadap teori Edwards III tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa secara substansial bahwa empat faktor implementasi kebijakan menurut teori Edwards III tersebut diarahkan ke unsur-unsur Pemerintah Kabupaten Mimika, Kodim 1710/Mimika, Polres Mimika, Tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Mimika sebagai implementor kebijakan. Dengan demikian teori ini relevan dengan objek penelitian Pengaruh Implementasi Kebijakan Pembinaan Teritorial, Konflik dan Kepemimpinan Terhadap Kualitas Keamanan Dalam Negeri Di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Oleh karena itulah, maka peneliti memandang bahwa Teori Edwards III tersebut relevan dengan *locus* dan *focus* yang diteliti.

B. Konsep Pembinaan Teritorial Dalam Konteks Administrasi Publik

Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Perkasad /93/XII/ 2008 dalam Buku Petunjuk Induk Teritorial TNI AD, Binter mencakup dua perspektif, dalam perspektif teknis militer, merupakan istilah teknis dalam ilmu kemiliteran dan dalam perspektif kegiatan, upaya, pekerjaan dan tindakan, baik secara berdiri sendiri maupun bersama dengan aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan aspek darat yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta terwujudnya Kemanunggalan TNI-Rakyat, yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI AD.

Binter juga memiliki tiga metode pelaksanaan, meliputi metode komunikasi sosial, Bhakti TNI dan Pembinaan Perlawanan Wilayah (Binwanwil) untuk Pertahan. Namun yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pelaksanaan komunikasi sosial Binter. *Komunikasi Sosial dalam kegiatan Binter adalah* upaya, pekerjaan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI AD guna penyampaian pikiran dan pandangannya yang terkait dengan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat.

Berdasarkan beberapa teori administrasi public, peneliti menitik beratkan, bahwa teori administrasi seluruhnya berisi tentang berbagai pendekatan untuk melakukan perbaikan disegala bidang, Fredrickson. (1997). Administrasi merupakan bagian dari pemerintahan, tindakan-tindakan pemerintah, para eksekutif, petugas-petugas pelaksana, yang menunjukkan gambaran dari suatu pemerintahan, namun administrasi berada diluar lingkup politik yang sebenarnya. Persoalan-persoalan administrasi bukanlah persoalan-persoalan politik, meskipun politik menetapkan tugas-tugas bagi administrasi, namun ia tidak boleh dibiarkan untuk memanipulasikan jabatan-jabatan administrasi (Wilson, 1887; Goodnow, 1900).

Administration is the most obvious part of government, it is government in action, it is the executive, the operative, the most visible side of government and is of course as old as government itself. The field of administration is a field of business, it is removed from hurry and strife of politics. It is a part of political life only as the methods of the counting-house are a part of the life of society, only as as machinery is a part of the manufactured product (Wilson, 1887).

The duty or duties of the administrator, specifically, the executive function of government, consisting in the exercise of all the powers and duties of government, both general and local, which are neither legislative nor judicial. Both of lay stress upon the fact that politics has to do with

guiding or influencing of governmental policy. It is these two function which it is here desired to differentiate, and for which the words 'politics' and 'administration' have been chosen (Goodnow, 1900).

Fungsi Binter sesuai UU RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal tugas-tugas TNI membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Membantu tugas pemerintah untuk pemberian bantuan kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, rehabilitasi infrastruktur dan mengatasi masalah akibat pemogokan serta konflik komunal. Membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan Kemanunggalan TNI – Rakyat.

Dengan adanya UU TNI ini, maka masyarakat seyogyanya harus meninggalkan dan menghapus memori Binter pada masa Orde Baru, karena Binter tidak lagi digunakan sebagai upaya indoktrinasi terhadap masyarakat. Maka dibutuhkan kekuatan dan kemampuan terpadu untuk mengimplementasikan Binter dalam menangani konflik.

Binter sebagai fungsi utama TNI AD adalah penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian potensi wilayah pertahanan dengan segenap aspeknya menjadi kekuatan RAK Juang yang tangguh serta terwujudnya Kemanunggalan TNI-Rakyat bagi kepentingan pertahanan negara di darat. Komando Distrik Militer (Kodim)

sebagai bagian dari TNI AD yang mempunyai fungsi dan peran melaksanakan Binter. Dalam melaksanakan Binter tersebut, Kodim tidak berdiri sendiri. Sebagai lembaga negara, diharapkan Kodim selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemkab/Pemko sebagai pemegang kekuasaan Binter, sehingga unsur-unsur TNI AD dalam menjaga keamanan melalui Binter merupakan kegiatan pelayanan publik untuk menciptakan kedamaian dan tanpa menimbulkan potensi konflik.

Dalam melaksanakan Binter, personel Kodim harus mempunyai kemampuan, sesuai dengan Skep Kasad Nomor : Skep / 384 / X / 2002 tanggal 31 Oktober 2002 tentang Buku Petunjuk Induk Teritorial, dalam melaksanakan Binter, setiap prajurit dibekali Lima Kemampuan Teritorial, meliputi; Kemampuan Temu Cepat dan Laporan Cepat, Kemampuan Manajemen Teritorial, Kemampuan Penguasaan Wilayah, Kemampuan Pembinaan Perlawanan Rakyat dan Kemampuan Komunikasi Sosial.

Bila dihadapkan dengan teori Edwards III (1980) Lima kemampuan teritorial dan metode Binter diatas sesuai dengan empat faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik, *Communication, Resources, Disposition* dan *Bureaucratic Structure*, sehingga Binter pada prinsipnya sesuai dengan pengertian administrasi publik; kerjasama, beberapa orang, dan mempunyai tujuan bersama.

C. Kebijakan Dalam Penanganan Konflik di Kabupaten Mimika.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, yang dimaksud dengan konflik adalah sebagai berikut:

1. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
2. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
3. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
4. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

Menurut Robbin dan Stoner dan Freeman, konflik dipahami berdasarkan dua sudut pandang, yaitu: tradisional dan kontemporer. Dalam

pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari adanya konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi (Myers, 1993:234). Apabila telah terjadi konflik, pasti akan menimbulkan sikap emosi dari tiap orang di kelompok atau organisasi itu sehingga akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut pandangan tradisional konflik haruslah dihindari. Dihadapkan dengan kondisi nasional saat ini, khususnya di Kab. Mimika, pandangan tradisional ini kurang tepat diterapkan, karena konflik di Kab. Mimika harus ditangani dengan baik untuk meningkatkan kualitas keamanan dalam negeri. .

Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Namun, yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana meredam konflik, tapi bagaimana menangani konflik, mencegah dan menyelesaikannya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antar pribadi bahkan merusak tujuan organisasi, akan tetapi untuk menciptakan integritas.

Konflik dianggap sebagai suatu hal yang wajar di dalam organisasi. Konflik bukan dijadikan suatu hal yang destruktif, melainkan harus dijadikan suatu hal konstruktif untuk membangun organisasi tersebut, misalnya bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan. Dihadapkan dengan kondisi Kab. Mimika saat ini,

pandangan kontemporer sejalan dengan upaya yang dilakukan Kodim Mimika dalam menangani konflik khususnya yang terjadi di Kab.Mimika dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri guna mendukung program pembangunan Pemda menuju Papua Damai dan Sejahtera.

Selama ini konflik di Kab.Mimika mengedepankan pendekatan Adat, sering mengabaikan hukum positif, namun kenyataannya sulit terwujud. Maka penyelesaian konflik lebih mengedepankan pendekatan Agama, Budaya, dan Kesetaraan yang dilakukan oleh aparat pemerintah secara terpadu. Penyelesaian secara adat yang selama ini dilakukan dengan bayar kepala atau ganti rugi dan bakar batu pasca perang harus ditinggalkan. Maka dibutuhkan Binter terpadu untuk membina masyarakat agar tidak suka berperang.

Demokrasi dan modernisasi sudah dilaksanakan di Kab. Mimika. Disamping itu, dengan adanya PT. Freeport, seharusnya mereka lebih maju dan sejahtera, namun kenyataan tidak. Mengapa ini terjadi? Karena adanya kondisi sosial yang timpang antara masyarakat asli Papua dengan migran dan kekeliruan kebijakan pembangunan di Papua yang berlangsung lama, sebagai berikut :

- 1. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA).**

Eksploras SDA di Papua hanya mengejar kemajuan material, atau kemajuan fisik dengan memakai indikator ekonomi semata-mata, telah menempatkan masyarakat Papua pada posisi marginal di Papua Barat. Pembangunan diarahkan pada eksploitasi sumber daya

alam, seperti tanah, hutan, tambang dan laut untuk kepentingan yang kurang jelas maksudnya. Sedangkan untuk kepentingan masyarakat Papua sebagai pemegang hak adat atas SDA justru kurang mendapat perhatian yang layak.

Eksplorasi SDA telah menampilkan suatu ketidakadilan, berdasar fakta-fakta masyarakat Papua, pemegang hak adat atas SDA tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, padahal semua konsekuensi negatif pasti dipikul oleh mereka bukan oleh pengambil keputusan. SDA merupakan sumber penghidupan utama bagi mereka dengan batas-batas pemilikan, pengakuan, dan penghargaan yang jelas dan tegas di antara para pemegang hak adat. Sebaliknya, agen-agen pembangunan yang mengeksploitasi SDA justru tidak memberikan pengakuan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat asli Papua dan tidak memikirkan alternatif. Sebagai contoh : Kasus pengalihan hak atas tanah untuk keperluan transmigrasi telah mengurangi bahkan menghilangkan sumber-sumber ekonomi keluarga. Masyarakat kehilangan binatang buruan sebagai sumber protein, kayu untuk bangunan, kayu api, rusaknya ekosistem lokal sebagai sumber protein yang mendukung kehidupan masyarakat lokal, hilangnya sagu sebagai sumber karbohidrat bagi masyarakat.

Eksplorasi tambang juga memberi dampak negatif yang besar buat penduduk lokal. Sebagai contoh: kasus *Freeport*, limbah

tailing, telah mencemari sumber-sumber ekonomi seperti Moluska, sumber protein masyarakat Kamoro-Sempan di Omawita. Demikian pula eksploitasi sumber daya laut seperti di Biak, Sorong, Merauke dan Fak-Fak juga merusak ekosistem dan mengganggu populasi ikan, penduduk lokal yang masih menggunakan teknologi penangkapan tradisional, makin sulit mengakses dan memanfaatkan sumber daya laut bagi kesejahteraannya.

2. Dominasi Migran.

Sadar atau tidak, selama pemerintahan Orde Baru, orang Papua kurang diberikan peran dalam bidang pemerintahan. Posisi-posisi utama selalu diberikan kepada orang luar dengan dalih orang Papua belum mampu. Walaupun untuk sebagian peran, dalih itu mungkin ada benarnya, tetapi pada umumnya untuk mencekal orang Papua. Seleksi ketat yang dikenakan terhadap orang Papua dilatarbelakangi oleh kecurigaan dan tuduhan terhadap semua orang Papua sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Adanya kepentingan politik dari sejumlah elite di pemerintahan agar penduduk asli tidak memiliki akses dan duduk di pemerintahan, tidak bisa bersuara untuk membela hak-hak dan kekayaan SDA-nya dengan menggunakan tuduhan OPM sebagai stigma. Tuduhan OPM ini, dijadikan stigma supaya orang Papua dapat dihambat untuk memiliki akses di pemerintahan atau jika

mereka bereaksi dapat ditangkap demi suatu proyek menaikkan kegiatan atau anggaran militer di Irian Jaya.

Dominasi masyarakat pendatang bukan hanya pada sektor pemerintahan saja, tetapi juga pada sektor swasta. Pada kegiatan di sektor industri manufaktur yang memanfaatkan eksploitasi sumber daya alam (SDA) eksploitasi sumber daya alam sebagai bahan baku lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari luar, seperti antara lain pabrik *Plywood* PT. Wapoga, Pabrik Pengalengan Ikan di Biak dan pabrik Pengalengan Ikan PT. Usaha Mina di Sorong.

Sektor perbankan juga didominasi oleh pekerja dari kaum pendatang. Jika kondisi itu dipertanyakan, jawaban yang lazim adalah orang Irian belum siap. Tetapi kenapa belum siap dan bagaimana menyiapkan kesiapan itu, sejauh ini belum mendapat perhatian yang serius dari para pengambil kebijakan. Dominasi dan tekanan-tekanan tersebut makin memantapkan nasionalisme Papua dan memungkinkan tuntutan Papua Merdeka makin gencar di era reformasi.

3. Penyeragaman Identitas Budaya dan Pemerintahan Lokal

Kekuasaan pemerintah Indonesia melalui para petugas negara yang didatangkan dan migran spontan dari luar Papua melihat dan mengukur budaya orang Papua dari sudut budaya, kepentingan dan ideologi pembangunan. Unsur kebudayaan lokal menjadi salah satu

sasaran yang harus “diamankan” supaya sesuai dengan kepentingan budaya dan ideologi pembangunan dan kepentingan pusat.

Kepemimpinan modern juga diintroduksikan kepada masyarakat Papua untuk menggantikan kepemimpinan tradisional dan diharapkan membawa dampak positif bagi penduduk lokal. Tetapi yang terjadi, justru menjadi sumber ketidakpastian dan kekacauan. Padahal pada masa sebelumnya kepemimpinan adat pada umumnya telah menciptakan ketertiban. Secara singkat, pengembangan SDM justru tidak berpijak pada pengetahuan dan kearifan lokal.

Menyadari ancaman terhadap eksistensi orang Papua, tokoh seperti Arnold Ap berusaha untuk menggali dan mengembangkan unsur-unsur budaya lokal. Tetapi, kelihatannya penguasa melalui aparat militer melihatnya secara sempit dan dipahami sebagai ancaman. Arnold Ap dibunuh dengan cara yang melukai hati orang Papua khususnya dan kemanusiaan pada umumnya. Dominasi dan penindasan tersebut, menjadikan identitas dan nasionalisme Papua makin mantap menopang tuntutan Papua Merdeka, maka dibutuhkan pendekatan budaya untuk mengembalikan kondisi Papua yang lebih baik.

4. Tindakan Represif oleh Militer

Penindasan militer di tanah Papua meliputi beberapa bentuk, antara lain intimidasi, teror, penyiksaan, dan pembunuhan. Intimidasi,

teror dan penyiksaan dilakukan berkenaan dengan pengambilalihan hak-hak adat masyarakat Papua atas SDA secara paksa untuk berbagai keperluan, seperti HPH, transmigrasi, pertambangan, dan industri manufaktur maupun jasa wisata. Ketika penduduk asli berusaha mempertahankan hak-haknya atas SDA mereka diintimidasi dan diteror. Dominasi tentara atau militer dalam jangka waktu yang lama dalam arena politik dan jabatan pemerintahan sipil, telah mengakibatkan tumbuhnya budaya kontra produktif bagi rakyat yang beranggapan bahwa militer adalah representasi kekuasaan, militer adalah warga negara kelas satu yang dapat berbuat apa saja tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas pada publik, akibatnya muncul budaya "militerisme" di berbagai kalangan partai politik maupun masyarakat luas lainnya. Berbagai konflik horisontal yang terjadi maupun konflik politik vertikal yang dimanifestasikan dengan tuntutan Papua merdeka sebagai reaksi atas pelaksanaan PEPERA yang dianggap OPM tidak demokratis maupun atas dominasi pusat pada daerah, dalam kurun waktu lama dilakukan melalui kebijakan dalam mengelola konflik yang represif dan kontra produktif, yaitu dengan cara mengirim pasukan militer dan merekrut para tokoh atau elit masyarakat untuk berdamai secara seremonial.

Berdasarkan teori sosial, bahwa setiap manusia memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya, maka perbedaan

pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Teori sosial ini membenarkan kejadian konflik antar suku di Kab. Mimika. Selama 3 bulan, Januari s/d Maret 2014 telah terjadi 12 kali perang suku, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Januari 2014 di Kali Pindah-pindah terjadi aksi bentrokan antara suku Dani dan suku Moni yang mengakibatkan pembakaran camp kedua suku yang bertikai, aksi bentrokan tersebut diakibatkan karena perebutan lahan adat yang diklaim oleh suku Moni.
2. Pada tanggal 2 Februari 2014 di kampung Jayanti telah terjadi aksi perang suku lanjutan antara suku Dani dan Moni. Pertikaian ini disebabkan kesalahpahaman saat suku Dani melakukan aksi buang suara setelah makan siang, kemudian ditanggapi dengan aksi serupa oleh Suku Moni namun situasi menjadi kondusif setelah aparat keamanan melakukan penghalauan dan meminta kedua belah pihak agar mundur dan kembali ke lokasi masing-masing.
3. Pada Tanggal 3 Pebruari 2014 di Jayanti komplek, Distrik Kuala Kencana telah terjadi lanjutan perang suku antara suku Dani (\pm 150 orang) dengan suku Moni (\pm 100 orang) namun pertikaian tidak sempat terjadi karena aparat keamanan gabungan melakukan tindakan pencegahan di lokasi.

4. Pada tanggal 5 Februari 2014 di Jayanti kompleks telah terjadi bentrokan susulan antara suku Dani dan suku Moni terkait masalah sengketa tanah namun pertikaian berhasil dileraikan oleh aparat gabungan TNI/Polri.
5. Pada tanggal 7 Februari 2014 pukul 06.00 WIT masyarakat suku Dani membersihkan alang-alang yang berada di dekat jembatan Jayanti komplek dengan tujuan memasang bendera merah putih tanda perdamaian namun dari kubu masyarakat suku Moni melepaskan panah kearah masyarakat suku Dani, akhirnya dari masyarakat suku Dani mundur dan tidak melanjutkan aktifitasnya.
6. Pada tanggal 4 Maret 2014 di Kampung Jayanti terjadi perang suku lanjutan antara masyarakat suku Dani dengan masyarakat Moni menggunakan alat perang/panah, pertikaian tersebut dipicu orang mabuk dari suku Moni. Dari kejadian tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia a.n. Abe Neban Wanda, alamat SP 13, suku Dani.
7. Pada tanggal 6 Maret 2014 di Jayanti Kompleks telah terjadi aksi bentrokan susulan antara masyarakat suku Dani dan suku Moni terkait sengketa tanah yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dari pihak suku Moni a.n. Yudas Songgonao dan Panuel Mom.

8. Pada tanggal 7 Maret 2014 di Komplek Jayanti telah terjadi perang suku lanjutan antara suku Moni dengan suku Dani terkait atas permasalahan tanah di Kali Pindah - pindah (Iwaka), kegiatan perang suku tersebut diikuti sekitar 600 orang (300 orang suku Dani dan 300 orang suku Moni) yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dari suku Dani a.n. Yunus Wanimbo.
9. Pada tanggal 8 Maret 2014 di Jayanti Komplek terjadi ketegangan antara kedua suku yang bertikai namun aparat gabungan TNI/Polri berhasil mencegah sebelum pertikaian terjadi.
10. Pada tanggal 11 Maret 2014 telah terjadi pembunuhan terhadap Jawame Muyagoni di kolam area 400 Kuala Kencana yang diduga dilakukan oleh suku Dani dengan cara dianiaya menggunakan parang.
11. Pada tanggal 11 Maret 2014 telah terjadi konflik perang suku antara suku Dani dan suku Moni di kompleks Jayanti, sehingga Polri mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan tembakan ke kelompok suku Moni karena dianggap tidak mengindahkan himbauan dari Kepolisian sehingga mengakibatkan jatuh korban tembak 2 orang meninggal dunia dan 1 luka.
12. Pada tanggal 12 Maret 2014 di kompleks Jayanti telah terjadi bentrok lanjutan antara suku Dani dan suku Moni terkait masalah sengketa tanah yang mengakibatkan pembakaran 6 rumah warga suku Dani oleh massa suku Moni.

Sudah beberapa kali diusahakan perdamaian untuk kedua kelompok yang sudah bertikai oleh Pemda dan lembaga adat, namun hal tersebut tidak membuat pertikaian berhenti karena masyarakat lebih mematuhi hukum adat dibandingkan hukum positif. Berkat keuletan dan kesungguhan Kodim 1710/Mimika dalam melaksanakan binter khususnya yang dilakukan babinsa dengan strategi pendekatan agama, budaya dan kesetaraan dalam menjaga keamanan dalam negeri, walau belum menadapat dukungan kebijakan dari Pemkab Mimika. .

Berdasarkan UURI Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, dengan melibatkan TNI secara bersama-sama dengan unsur lain. TNI melaksanakan amanah UU itu melalui Binter guna terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif untuk mendukung kelancaran pembangunan.

D. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan sejak zaman kuno telah dibahas oleh para cerdik pandai. Mereka mengemukakan berbagai definisi dan teori mengenai kepemimpinan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dari semua teori kepemimpinan, peneliti menggunakan teori Hersey, Paul; Blanchard, Kenenth H. & Johnson, D.E (1990), *leadership is the process of*

influencing the activities of an individual or group in efforts toward goal achievement in a given situation. From this definition of leadership process is a function of the leader, the follower, and other situational.

Kepemimpinan dapat terjadi dimana saja, di lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi tentara dan polisi, di masjid, gereja atau di keluarga kepemimpinan memiliki unsur *leader, follower* dan *situation*. Dalam teori ini, fungsi pemimpin di suatu organisasi dapat berbeda dengan fungsi pemimpin di organisasi lainnya. Dikaitkan dengan unsur pemimpin di masyarakat suku Papua, Kepemimpinan diperoleh melalui pencapaian individu pada kemampuan individual dapat ditunjukkan sebagai :

1. One man show, belum ada pembagian kerja dan birokrasi
2. Mengenal hierarki wilayah
3. Kepemimpinan melalui sistem pewarisan
4. Mengenal hierarki wilayah berdasarkan teritorial, tersentral
5. Gaya, prinsip dan teknik kepemimpinan absolut, melekat sifat arogansi dalam wewenang dan kewajiban yang ketat dan tersentralisasi.

Kepemimpinan yang diperoleh melalui sistem pewarisan, mempunyai ciri-ciri khusus:

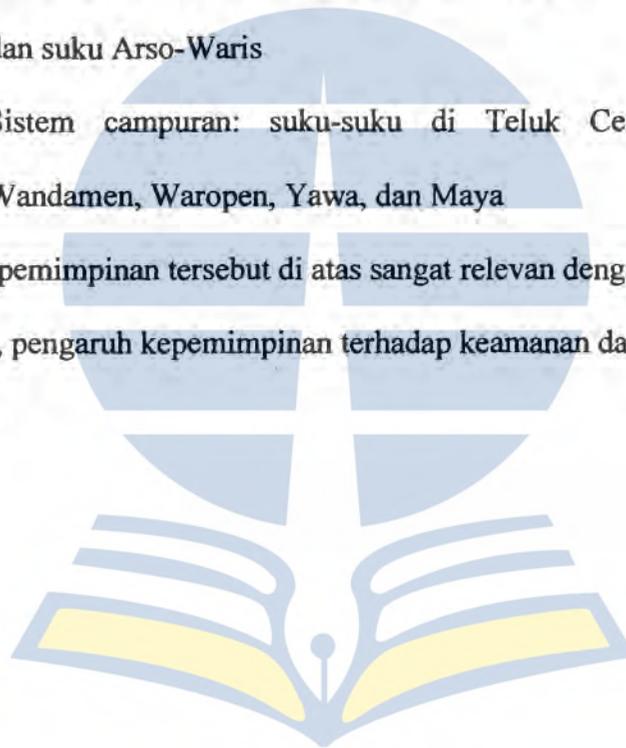
1. Mengenal hierarki wilayah berdasar klan
2. Pusat orientasi kekuasaannya adalah religi
3. Sudah ada pelembagaan dengan struktur yang sederhana

Kepemimpinan diperoleh melalui pewarisan dan pencapaian berbeda dengan organisasi di luar masyarakat suku Papua, antara lain :

1. Tidak ada birokrasi
2. Mengenal hierarki wilayah
3. Pria berwibawa: Suku Dani, suku Asmat, suku Me, suku Meybrat, dan suku Muyu
4. Sistem Kerajaan: Suku di kepulauan Raja Ampat, suku di Semananjung Onin, Teluk Berau, dan daerah Kaimana
5. Sistem Ondoafi: suku Sentani, suku Genyem (Nimboran), suku di Teluk Yos Sudarso, suku Tabla, suku Yaona, suku Yakari-Skao, dan suku Arso-Waris
6. Sistem campuran: suku-suku di Teluk Cendarwasih (Biak, Wandamen, Waropen, Yawa, dan Maya

Teori kepemimpinan tersebut di atas sangat relevan dengan penelitian yang akan di bahas, pengaruh kepemimpinan terhadap keamanan dalam negeri di Kab.

Mimika



hilang, biaya pengobatan untuk kecelakaan, *opportunity cost* dari waktu kerja yang hilang, rasa sakit dan penderitaan, serta berkurangnya nilai kehidupan.

Bagi warga masyarakat Kab. Mimika, konflik akan menimbulkan biaya yang besar, termasuk biaya operasional pengerahan petugas Polres Mimika. Selain itu, tindak kriminal dalam konflik yang dipenjara akan menimbulkan *opportunity cost*, karena berkurangnya tenaga kerja potensial yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan Kab. Mimika. Sesuai dengan pendapat Sullivan. (2009) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi suatu daerah akan berkurang akibat banyaknya tindak kriminal yang dipenjarakan, karena menurunnya minat investasi atau peluang usaha akibat tingginya tingkat kriminalitas. Warga masyarakat yang tinggal di daerah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi menanggung *opportunity cost* dari berkurangnya aktivitas bebas akibat adanya ketakutan terhadap kejahatan.

Salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan rasa aman kepada rakyatnya. Hal ini diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "..... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Maka Rasa aman adalah kebutuhan dasar setiap orang, yang harus dilindungi pemerintah, namun konflik selalu saja ada, padahal hanya karena masalah sepele, menjadi besar dan berkepanjangan, karena fungsi kepentingan manusia sering lebih besar dari kepentingan masyarakat banyak, seperti

yang terjadi di Kabupaten Mimika. Menyadari kondisi tersebut, Kodim 1710/ Mimika dalam menjaga keamanan negara, dengan memahami bahwa “sekecil apa pun konflik” di masyarakat harus disikapi dengan cepat dengan pendekatan yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, sehingga konflik sosial tidak menghambat proses pembangunan nasional.

Konflik bertentangan dengan integrasi yang berproses sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik sosial yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak terpelihara dapat menciptakan konflik. Kondisi ini terus mengalami perubahan dan menjadi rawan dalam waktu yang singkat apabila masyarakat Indonesia yang multi etnis tidak mampu mengatasi persoalan, karena dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan golongan yang lebih besar dari kepentingan nasional serta kurangnya toleransi dan saling menghargai antar sesama, sehingga tanpa disadari menjadi persoalan yang berkepanjangan, seperti yang terjadi di Kecamatan Kuala Kencana, kabupaten Mimika. Maka dibutuhkan kebijakan untuk menangani “sekecil apa pun konflik” di masyarakat harus disikapi dengan cepat dengan pendekatan yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia agar tidak menghambat proses pembangunan nasional di Daerah, khususnya Kabupaten Mimika.

Tindakan pencegahan dan penindakan terhadap kerusuhan sosial di Kabupaten Mimika oleh Pemkab Mimika terkesan sendiri-sendiri. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013, Menjaga keamanan

menjadi bagian dari tugas Kodim 1710/ Mimika dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif untuk mendukung kelancaran pembangunan nasional, perlu kelanjutan pelaksanaan langkah-langkah penanganan konflik sosial melalui keterpaduan, baik antar Aparat Pusat, antar Aparat Daerah, maupun antara Aparat Pusat dan Daerah, sebagaimana termuat dalam.

Dihadapkan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2014 dan potensi konflik di Kabupaten Mimika, penanganan konflik seyogyanya harus terpadu. Kurangnya kesepahaman dapat diatasi dengan pelatihan terpadu di daerah antara Pemda, Polri, TNI dan Masyarakat. Keterpaduan ini dapat dilaksanakan apabila Binter dapat diterima semua pihak. Dihadapkan dengan permasalahan di atas, Kodim 1710/Mimika dalam menjaga keamanan wilayah Kabupaten Mimika tidak cukup hanya dengan menguasai metode Binter, akan tetapi diperlukan pendekatan Binter yang tepat sebagai pintu masuk dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat dan mengetahui perkembangan informasi serta mengetahui potensi konflik yang komprehensif, sehingga dapat mencegahnya dengan menjaga hubungan yang harmonis antar sesama untuk mendukung Polres Mimika memberikan jaminan keamanan di Kabupaten Mimika.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini adalah hubungan persepsi masyarakat tentang perilaku Birokrasi terhadap kualitas pelayanan

publik, di kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat oleh Muhammad soleh (2005). Dalam penelitian itu, berbentuk tuntutan masyarakat tentang pelayanan umum yang optimal tepat waktu dan cepat dari Pemerintah. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara pemberian skor terhadap dimensi-dimensi yang telah ditetapkan baik dari sisi pelayanan maupun dari perilaku birokrasi.

G. Beda Penelitian yang dilakukan dengan Penelitian sebelumnya

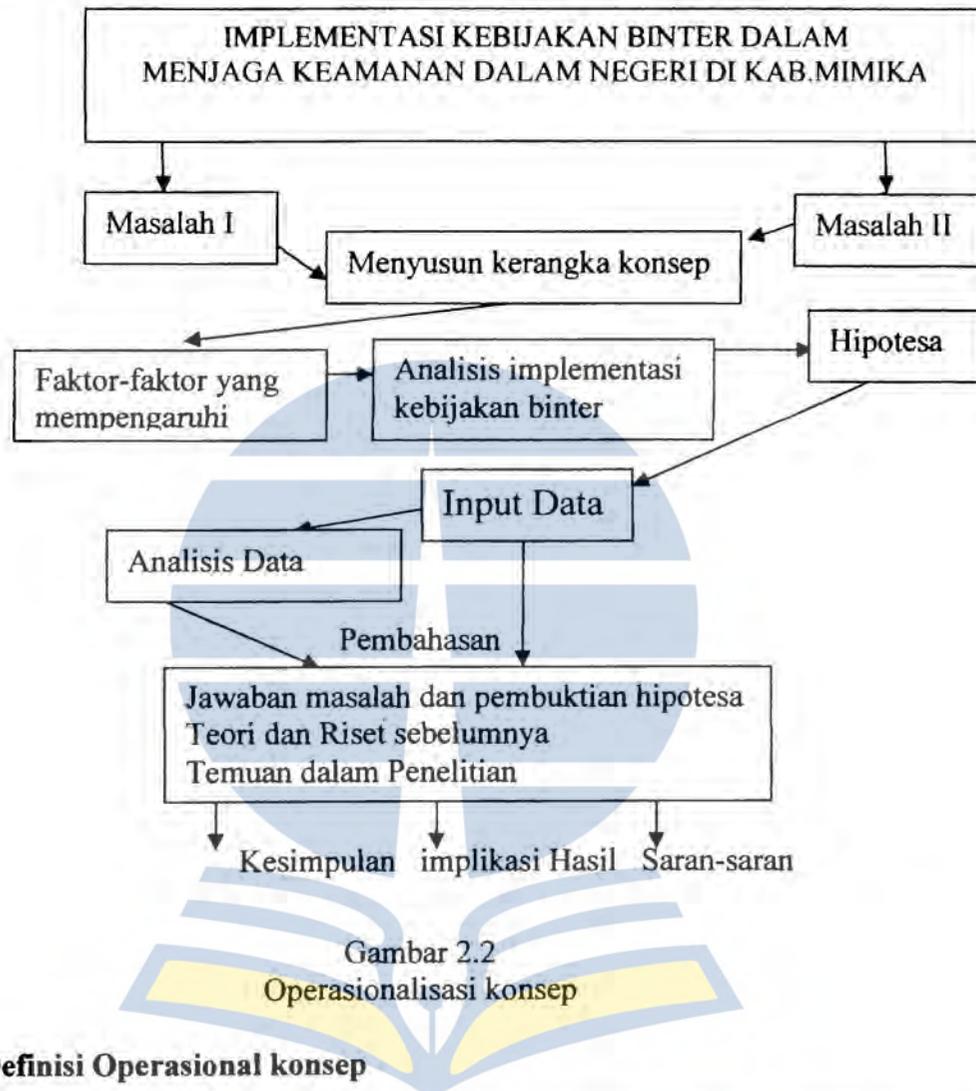
Penelitian persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dengan penerapan Binter dalam pelayanan publik belum pernah dilakukan, namun penelitian yang lalu dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam menjaga keamanan dalam negeri.

Penelitian sebelumnya menitik-beratkan peran aparatur birokrasi dalam melaksanakan pelayanan publik yang optimal dalam rangka pelayanan cepat dan tepat waktu serta peran aparat kepolisian baik secara internal maupun eksternal dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Penelitian sebelumnya dilakukan pada kantor pemerintahan setingkat kecamatan dan pemerintah kabupaten, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada tingkat Kodim yang wilayah pembinaannya membawahi beberapa kecamatan dalam 1 kabupaten dengan titik berat pada peran Babinsa, Babinkamtibmas, Kepala Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Mimika.

H. Operasionalisasi Konsep

Diawali penentuan masalah di Kab Mimika hingga menguji hipotesa dan mengambil kesimpulan dan mengajukan saran sesuai gambar dibawah ini.



I. Definisi Operasional konsep

Pembinaan Teritorial dapat meningkatkan kualitas keamanan dalam negeri dengan 3 (tiga) variabel bebas (*independent variable*); Satu, Implementasi Kebijakan Binter (X_1), Dua, Konflik (X_2) dan Kepemimpinan (X_3) serta 1 (satu) variabel terikat (*dependent variable*) (Y) Kualitas keamanan dalam negeri di Kabupaten Mimika.

J. Operasionalisasi variabel

Variabel dioperasionalkan menggunakan Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Operasionalisasi variabel implementasi kebijakan Binter

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan Binter (X1)	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian isi pesan sosialisasi 2. Kejelasan pesan 3. Kualitas media sosialisasi 4. Kualitas koordinasi antar Lembaga 5. Kecocokan sistem koordinasi
	Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sarana dan prasarana 2. Dampak sarana dan prasarana 3. Kecukupan jumlah Anggaran 4. Dampak dana terhadap tugas 5. Kebutuhan tugas
	Sikap Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Binter 2. Pemahaman teknik Binter 3. Motivasi pelaksana Binter 4. Tujuan pelaksana Binter 5. Sasaran pelaksana Binter
	Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan Babinsa dengan Kades 2. Hubungan Babinsa Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat 3. Hubungan Babinsa Dengan Babinkamtibmas 4. Prosedur kerja Babinsa 5. Metode Pengumpulan Data

Tabel 2.2
Operasionalisasi variabel konflik

Variabel	Dimensi	Indikator
<u>Konflik</u> (X2)	Pertentangan masyarakat dengan Pemkab Mimika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penangkapan atas ketua organisasi 2. Pemberontakan 3. Kejelasan pesan 4. Sosialisasi 5. Koordinasi antar lembaga
	Pertentangan masyarakat asli dengan Migran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Papua menganggap berbeda dari masyarakat Indonesia 2. Secara fisik orang Papua berbeda 3. Pandangan dan cara hidup tersendiri 4. Nasionalisme Papua berbeda 5. Kondisi sosial yang timpang
	Pertentangan masyarakat asli dengan Migran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentrokan antara suku Dani dan suku Moni 2. Pembakaran camp kedua suku 3. Masalah sengketa tanah 4. Tidak ada persatuan antar suku 5. Metode penyelesaian
	Pertentangan antar agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan agama antar suku 2. Perbedaan agama dengan pendatang 3. Perbedaan status agama yang tajam 4. Perbedaan status keagamaan 5. Perbedaan kegiatan ibadah

Tabel 2.3
Operasionalisasi variabel Kepemimpinan

Variabel	Dimensi	Indikator
Kepemimpinan (X3)	Kemampuan	1. Pengalaman 2. Perbuatan 3. Meguasai 4. Hubungan 5. Kesiapan
	Gaya	1. Pengayom 2. Empati 3. Arogansi 4. Menang Sendiri 5. Membimbing
	Prinsip	1. Panutan 2. Memberi 3. Membantu 4. Pengendali 5. Pengikut
	Teknik	1. Menyelami 2. Menghubungi 3. Mempengaruhi 4. Mengajak 5. Mendorong

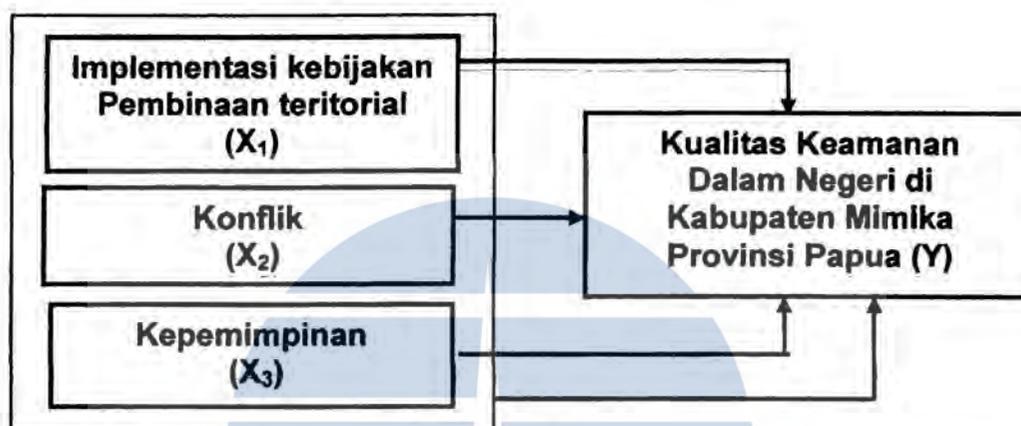
Tabel 2.4
Operasional Variabel Kualitas keamanan dalam negeri di Kabupaten
Mimika Provinsi Papua

Kualitas keamanan (Y)	Berwujud (<i>Tangibles</i>) (Y ₁)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan sarana prasarana 2. Lokasi strategis 3. Kenyamanan 4. Kecukupan petugas
	Kehandalan (<i>Reliability</i>) (Y ₂)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat waktu 2. Kesesuaian prosedur 3. Kesetaraan/perlakuan sama dari petugas 4. Ketepatan
	Ketanggapan (<i>Responsiveness</i>) (Y ₃)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketanggapan kebutuhan 2. Penerimaan kritik dan saran 3. Penuh perhatian 4. Memiliki pengetahuan yg memadai
	Keyakinan/jami nan (<i>Assurance</i>) (Y ₄)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan 2. Kepastian hukum 3. Kepercayaan 4. Tanggungjawab
	Empati (<i>Empathy</i>) (Y ₅)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman kebutuhan 2. Keinginan membantu 3. kepedulian dengan masyarakat 4. Keinginan menindaklanjuti kritik

K. Kerangka Pemikiran.

1. Kerangka Pemikiran Teoritis.

Menurut Muhamad (2009:75) Kerangka pikir adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.



Gambar 2.3

Kerangka pemikiran pengaruh Implementasi kebijakan Pembinaan teritorial, Konflik dan Kepemimpinan terhadap Kualitas Keamanan Dalam Negeri di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

2. Spesifikasi Model.

Untuk menjawab tujuan penelitian yaitu bagaimana pengaruh implementasi kebijakan Binter, konflik, dan kepemimpinan secara bersama-sama terhadap kualitas keamanan di Kab. Mimik, dengan analisa data secara deskriptif dari wawancara, catatan pengamatan, dan menyebarkan angket/kuesioner untuk memperoleh tema dan pola-pola yang di deskripsikan dan diilustrasikan dengan contoh-contoh, termasuk kutipan-kutipan dan rangkuman dari dokumen, koding data dan analisis verbal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain Penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Travers (1978) dalam Umar (205:81) penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, untuk memperoleh jawaban bahwa Binter dapat melaksanakan pelayanan menjaga keamanan dalam negeri di Kab.Mimika.

Agar keberadaan data penelitian yang diperoleh dapat digunakan sebagai ukuran besaran pengaruh dari setiap variabel penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan pengujian kausalitas dari faktor-faktor implementasi pada variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Oleh karena itulah, maka analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier multipel yang dilanjutkan dengan menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*). Dengan teknik *path analysis* akan diketahui besaran pengaruh variabel X terhadap Y baik secara simultan maupun secara parsial.

B. Sumber Data dan Pemilihan Informan

Sumber data dan pemilihan informan diambil dari TNI, Polri dan komponen masyarakat di wilayah Kodim 1710/Mimika melalui Survey, wawancara dan Kuesioner.

Yang dimaksud dengan Sumber informasi dalam penelitian ini adalah semua karakteristik yang berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu tokoh agama (Toga), tokoh adat (Todat), tokoh masyarakat (Tomas) dan tokoh pemuda (Toda), Bintara Pembina Desa (Babinsa) Satkowl, Bintara pembina Keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas), Kepala Desa (Kades).

1. Primer.

Dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara terhadap informan yang dipilih (Bupati Mimika, Dandim 1710/Mimika dan Kapolres Mimika) dengan konfirmasi dahulu). Pemanfaatan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu serta mengumpulkan data tentang pelaksanaan binter di Kab.Mimika.

Pertanyaan yang disiapkan sesuai dengan pedoman dalam wawancara pada lampiran diantaranya : Mengapa? Alasan apa? Bagaimana terjadinya?

Penelitian ini juga menggunakan angket/kuesioner yang disebarakan kepada responden yang relevan.

2. Sekunder.

Dilakukan pencatatan dan pemanfaatan terhadap dokumen-dokumen yang ada yaitu; Dokumentasi, Undang-Undang, Surat Keputusan, Pustaka dan Dokumen lainnya

C. Instrumen Penelitian

Dengan menggunakan Tape recorder, catatan lapangan dan Peneliti sebagai instrumen itu sendiri.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan mencatat dari berbagai sumber atau dokumen yang ada pada berbagai instansi terkait. Untuk menghindari kelemahan dari aspek *representativeness*, maka data yang terkumpul dilengkapi dengan wawancara dengan beberapa orang dari instansi tersebut yang memang punya kapata yang ada. Disamping membandingkan data yang ditemukan dengan data yang tersedia secara regional dan nasional. Demikian juga dalam mengumpulkan data primer mengenai pelaksanaan Binter di Kab. Mimika. Adapun prosedur pengumpulan data melalui:

1. Penyebaran angket/kuesioner kepada responden yang dipilih kepada 20 orang terpilih dan 22 orang acak 42 responden dan memberikan waktu rata-rata 1 (satu) minggu untuk mengisi jawaban kuesioner tersebut.
2. Wawancara mendalam

Seluruh proses wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, baik pertanyaan tertutup maupun pertanyaan terbuka. Pihak-pihak yang akan diwawancarai dipilih dengan sengaja atau menggunakan teknik sampel yang bertujuan (*purposive sampling*). Hal ini dimaksudkan agar peneliti memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya yang paling sesuai dengan konteksnya. Seluruh hasil

wawancara direkonstruksi menjadi berkas-berkas catatan lapangan, kemudian membaca secara cermat, menyusun serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitik, baik untuk mendapatkan informasi yang lebih baik dan mendalam maupun untuk memberikan dasar bagi analisis lebih lanjut.

E. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif didukung dengan statistika deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat generalisasi hasil penelitian. Termasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, persentase, frekuensi, perhitungan mean, median atau modus.

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dengan cara observasi, studi dokumen dan wawancara.

Analisis Kualitatif Deskriptif untuk Pengujian Hipotesa, “ Tanpa Binter konflik sulit ditangani dan tanpa Binter sulit mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif di Kab.Mimika”, sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan Kab.Mimika damai dan bebas konflik.

Pelaksanaan Binter berpengaruh terhadap keamanan dalam negeri sehingga damai dan tidak ada konflik di Kab.Mimika ($H_0=0$).

Pelaksanaan Binter tidak berpengaruh terhadap keamanan dalam negeri sehingga tidak dapat mewujudkan damai dan terjadi konflik silih berganti di Kab.Mimika ($H_0 \neq 0$).

Adapun strategi analisis yang digunakan dengan menggunakan teori dari dasar (Grounded theory, Glaser dan Straus : 1960), yaitu :

1. Koding adalah proses kategorisasi data kualitatif dan juga untuk menguraikan implikasi dan rincian dari kategori-kategorinya.
2. Memoing (membuat memo) adalah proses mencatat pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan dari peneliti sewaktu hal itu muncul selama studi, dilakukan secara ekstensif dalam catatan marginal dan tanggapan-tanggapan yang diberikan dalam catatan lapangan.
3. Diagram terpadu dan sesi digunakan untuk menarik seluruh rincian menjadi satu, untuk membantu agar data itu menjadi berarti dengan mengarahkan diri kepada teori yang muncul.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Mmenjaga keamanan dalam negeri di Kab. Mimika berhubungan langsung dengan penyebaran informasi dan interaksi sosial masyarakat serta pengetahuan dan keterampilan personel Birokrasi tentang potensi dan penanganan konflik dalam satu wilayah. Menangani konflik hanya mengerahkan unsur Pemkab Mimika, baik kekuatan maupun kemampuan kurang maksimal. Maka diperlukan dukungan dari Kodim 1710/Mimika. Oleh sebab itu, menjaga keamanan dalam negeri tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan, akan tetapi diperlukan pendekatan sosial yang tepat melalui implementasi kebijakan Binter sebagai pintu masuk dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat dan mengetahui perkembangan informasi, mengetahui potensi dan cara penanganan konflik untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama di Kab. Mimika.

Kemampuan Babinsa sebagai unsur terdepan Kodim 1710/ Mimika masih kurang untuk melaksanakan peran mempengaruhi tokoh dalam lingkungan masyarakat binaannya, baik tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda. Oleh sebab itu, Babinsa harus bisa berperan sebagai tokoh yang bisa berpengaruh dilingkungan masyarakatnya guna mencegah terjadinya konflik, seandainya tidak ada tokoh yang berpengaruh

dan tidak didengar oleh masyarakatnya, babinsa harus bisa menciptakan tokoh dan menokohkan seseorang untuk memimpin dan mengendalikan masyarakatnya jika terjadi sesuatu yang bertentangan program pemerintah dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan Binter, banyak tantangan yang dihadapi Kodim 1710/ Mimika, beberapa kelompok orang Mimika yang sudah berpendidikan menerima dan menghargai perbedaan. Namun bagi yang belum berpendidikan akan menjadi masalah. Maka Kodim 1710/ Mimika harus terus memantapkan lima kemampuan teritorial dan metode Binter bagi Babinsa untuk mengatasi konflik di Kab, Mimika.

Dari Hasil wawancara yang dilaksanakan dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Mereka meminta perhatian terhadap agama, budaya dan kesetaraan.

1. **Agama**

Mayoritas masyarakat asli Papua memeluk agama kristen Protestan dan Katolik, mereka berharap pendekatan agama harus dilakukan dalam menjaga keamanan dalam negeri di Kab.Mimika. Kami sangat merindukan melaksanakan ibadah bersama dengan pejabat baik Pemda maupun pejabat TNI/Polri.

Dengan mengunjungi masyarakat yang sederhana ke gereja-gereja yang kecil, akan memberikan dampak yang signifikan dari pada mengunjungi gereja – gereja yang besar. Dalam kunjungan ibadah tersebut, disertai dengan membawa Tim Paduan Suara dan

bahan kontak yang diberikan kepada jemaat gereja. Dalam suasana ibadah bersama sangat mudah mendekatkan diri dengan masyarakat dan menciptakan komunikasi dua arah untuk membangun kedamaian dan mencegah konflik.

2. **Budaya**

Disamping pendekatan agama, Mimika mempunyai budaya yang unik, kurang dimanfaatkan sebagai alat untuk menyampaikan pesan persaudaraan, persatuan, kesatuan, pesan sopan santun dan pesan menghindari konflik dengan tidak saling memusuhi.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni sudah dimanfaatkan Kodim 1710/ Mimika sebagai pintu membangun harmonisasi di Papua, namun kadang- kadang saja.

Aplikasi pendekatan budaya harus dilakukan dalam menjaga keamanan wilayah dengan melibatkan Toga dan Todat, menghadiri undangan Kodam/Kodim/Koramil, sehingga tumbuh rasa percaya masyarakat, bahwa Kodim 1710/ Mimika sangat mencintai tanah dan masyarakat Papua (trust building).

Setiap Babinsa sudah ditekankan Kodim 1710/Mmk untuk wajib menghormati kearifan lokal yang ada di wilayahnya. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan Babinsa harus mempertimbangkan

adanya adat istiadat dan tata krama yang berlaku di wilayah sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diterima masyarakat. Dari kegiatan ini, tumbuh rasa simpati masyarakat kepada babinsa dan Kodim 1710/ Mimika.

3. **Kesetaraan**

Dominasi migran dan akibat tindakan represif Militer masa lalu harus segera diobati. Babinsa dituntut harus terus belajar untuk memahami, bahwa kesetaraan dilakukan karena ada keragaman. Keragaman atau kemajemukan merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan dalam kehidupan di masyarakat Kab. Mimika. Hal dilakukan, bahwa pengobatan luka hati masyarakat Papua hanya bisa dilakukan dengan mengangkat harkat martabat suku Papua, melalui kesetaraan, sehingga kualitas keamanan dalam negeri semakin baik.

Keragaman merupakan salah satu realitas yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, kini dan di waktu-waktu mendatang sebagai fakta. Keragaman sering disikapi secara berbeda. Demikian di Papua, banyak pandangan terhadap penyelesaian konflik di Papua khususnya di Kota Timika. Saat ini Kodim 1710/ Mimika mempunyai satu sikap, bahwa hanya dengan kesetaraan yang dapat menyelesaikan keragaman di Papua.

Kesetaraan merupakan hal yang inheren yang dimiliki manusia sejak lahir. Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang

sama yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan atau yang disebut dengan hak asasi manusia (HAM). Maka Kodim 1710/ Mimika dalam menjaga keamanan dalam negeri di Kab. Mimika terus dilandasi kesadaran kesetaraan, bahwa setiap masyarakat asli Papua dilahirkan setara, meskipun dengan keragaman identitas yang disandang.

Implementasi penyelenggaraan Binter pada saat ini di Kab. Mimika berdasarkan keinginan masyarakat. Terkait dengan memori masyarakat pada masa Orde Baru, yang mana Binter sering menggunakan metode represif terhadap masyarakat untuk menjamin stabilitas politik dan pertahanan keamanan pada masa itu, sudah hampir tidak ada lagi. Hal ini disampaikan masyarakat saat wawancara, Mereka meminta agar Binter didukung dengan kebijakan Pemkab Mimika.

B. Hasil

Hasil wawancara dan observasi serta penyebaran angket, ditemukan data penelitian bahwa, banyak hal yang dapat menimbulkan konflik. Di Papua konflik terjadi kebanyakan bersumber dari Pemilu dan hak ulayat tanah. Proses Pemilu Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang belum tuntas, berakibat konflik diantara simpatisan/pendukung dari masing-masing calon Kepala Daerah yang ikut dalam pemilihan, bahkan berkembang menjadi perang antar suku seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Tolikara - Provinsi Papua, pada saat pelaksanaan Pilkada

Bupati 17 pebruari 2012, mengakibatkan 11 orang tewas dan 34 luka parah.

Disamping itu, Sengketa tanah hak ulayat di Papua merupakan potensi konflik yang sangat besar, diperbesar dengan banyaknya pemekaran Kabupaten. Konflik ini diawali dari tuntutan ganti rugi tanah (hak ulayat) sulit diselesaikan, karena antara pengguna dan pemilik hak ulayat tidak ada kesesuaian, kadang tuntutan masyarakat kurang rasional dan kadang pemerintah sebagai pengelola terlalu berpihak kepada investor, bahkan mengabaikan kepentingan rakyat pemilik hak ulayat, sehingga sering diikuti dengan tindakan kekerasan antara kedua belah pihak dan sering memicu timbulnya konflik antar suku/ kelompok bahkan menjadi konflik vertikal. Seperti yang terjadi di Kabupaten Timika, Distrik kuala Kencana, Desa Jayanti antara suku Moni dan suku Dani sebagai suku pendatang ke Kabupaten Mimika dalam perebutan hak ulayat yang dimiliki suku asli Amungme dan Kamoro.

Sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya, kesenjangan ekonomi dalam perekonomian di wilayah Papua yang sering didominasi oleh migran. Hal ini merupakan potensi konflik yang sangat besar, ketika masyarakat pendatang tidak mampu melakukan pendekatan budaya dan kesetaraan. Kondisi ini terjadi karena rendahnya kreativitas dan penguasaan informasi oleh masyarakat asli Papua, sehingga kurang mampu bersaing dengan masyarakat pendatang. Kondisi tersebut merupakan akar

masalah yang menimbulkan sifat antipati orang asli Papua terhadap masyarakat pendatang.

Tantangan yang dihadapi Kodim1710/Mimika adalah beberapa kelompok orang tidak atau belum terbiasa menerima apalagi menghargai perbedaan. Kodim 1710/Mimika terus mencari persamaan melalui pembekalan dan pembinaan babinsa melalui komunikasi sosial babinsa baik dengan Toga, Todat, dan Tomas dan Aparatur Pemda serta Polri dan yang sangat penting adalah masyarakat Papua sendiri telah peduli atas terwujudnya kedamaian dan kesejahteraan di lingkungannya melalui pendekatan kegiatan agama, budaya dan kesetaraan dan pesan-pesan “kasih itu damai dan indah”.

Pada bab ini akan disajikan data hasil penelitian dengan variable-variabel yang diteliti, yaitu; variabel X1 (Kebijakan pembinaan teritorial), Variabel X2 (Konflik di Timika), Variabel X3 (Kepemimpinan) dan Variabel Y (Keamanan dalam Negeri di Timika). Hasil ini akan dianalisa dengan pengujian deskripsi data pengujian persyaratan analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan analisa.

Penelitian ini dilakukan mulai dari 1 September - 8 Oktober 2014 di Timika Kabupaten Mimika Papua, Responden berasal dari masyarakat, sampel yang masuk dalam penelitian tersebut sebanyak 42 responden dengan umur rata-rata antara 18 sampai 50 tahun. Penulis menyebarkan kuesioner kepada 20 orang terpilih dan 22 orang acak dan memberikan

waktu rata-rata 1 (satu) minggu untuk mengisi jawaban kuesioner tersebut, sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Keterangan	Frequency	Percent
Laki-laki	25	60%
Perempuan	17	40%

Hasil Data Olahan

Tabel 4.2.
Karakteristik Berdasarkan Umur Responden

Keterangan	Frequency	Percent
< 20 Tahun	10	24%
20 - 30 Tahun	20	48%
30 - 50 Tahun	12	29%

Hasil Data Olahan

Tabel 4.3.
Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Frequency	Percent
SMA	36	86%
S1	5	11%
S2	1	3%

Hasil Data Olahan

Tabel 4.4.
Karakteristik Berdasarkan Masa Kerja

Keterangan	Frequency	Percent
1 Thn	10	24%
1 – 5 Thn	15	36%
5 – 10 Thn	12	29%
> 10 Thn	5	12%

Hasil Data Olahan

1. Hasil Penelitian

Data penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu, variabel X1 (Kebijakan pembinaan teritorial), Variabel X2 (Konflik di Timika), Variabel X3 (Kepemimpinan) dan Variabel Y (Keamanan dalam Negeri di Timika), untuk selanjutnya hanya disebut sebagai variabel X1, variabel X2, Variabel X3 dan Variabel Y.

Data yang didapat dari responden berupa skor hasil penelitian untuk masing-masing variabel (terlampir). Dari data tersebut ditabulasi dan diakumulasi berdasarkan urutan responden, yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk kolom-kolom.

Deskripsi frekuensi pada setiap variabel diukur berdasarkan jumlah skor pada setiap pertanyaan dari masing-masing responden, yang kemudian diakumulasikan. Jumlah pada setiap skor dapat menentukan tingkat pemilihan pada setiap skor.

Deskripsi frekuensi akan disajikan pada masing-masing variabel tanpa keterikatan satu variabel dengan variabel yang lain, dan akan ditabulasikan dalam bentuk kolom-kolom sebagai berikut:

a. Variabel X_1

Dari hasil perhitungan tabulasi pada masing-masing kuesioner terhadap variabel X_1 , maka dapat dihitung berdasarkan analisis frekuensi terbentuk dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Deskripsi Frekuensi Total Jawaban pada Variabel X_1

Jenis Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	138	16%
Setuju	501	60%
Ragu-ragu	186	22%
Tidak Setuju	15	2%
Sangat Tidak Setuju	0	0%

Hasil Data Olahan

Pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa 16% responden menjawab Sangat Setuju pelaksanaan Binter, 60% menjawab setuju pelaksanaan Binter, 22% menjawab ragu-ragu, dan 2% jawab Tidak setuju pelaksanaan. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa 2% dari semua responden yang menolak pertanyaan yang ada pada variabel X_1 , serta 75% responden menerima pertanyaan X_1 , dan selebihnya

ragu-ragu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua pertanyaan pada variabel X1 dapat diterima baik oleh sebagian besar responden.

b. Variabel X₂

Dari hasil perhitungan tabulasi pada masing-masing kuesioner terhadap variabel X₂, maka dapat dihitung berdasarkan analisis frekuensi terbentuk dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.6.
Deskripsi Frekuensi Total Jawaban pada Variabel X₂

Jenis Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	250	30%
Setuju	420	50%
Ragu-ragu	158	19%
Tidak Setuju	11	1%
Sangat Tidak Setuju	1	0%

Hasil Data Olahan

Pada tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa 30% responden menjawab Sangat Setuju menangani konflik sosial dengan pendekatan Binter komunikasi sosial, 50% menjawab setuju pendekatan Binter komunikasi sosial, dan 19% menjawab ragu-ragu, dan 1 % Tidak setuju pendekatan Binter komunikasi sosial. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa 1% dari semua responden yang menolak pertanyaan

yang ada pada variabel X2, serta 50% responden menerima pertanyaan X2, dan selebihnya ragu-ragu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua pertanyaan pada variabel X2 dapat diterima baik oleh sebagian besar responden.

c. Variabel X₃

Dari hasil perhitungan tabulasi pada masing-masing kuesioner terhadap variabel X₃, maka dapat dihitung berdasarkan analisis frekuensi terbentuk dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Deskripsi Frekuensi Total Jawaban pada Variabel X₃

Jenis Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	127	15%
Setuju	413	49%
Ragu-ragu	236	28%
Tidak Setuju	40	5%
Sangat Tidak Setuju	24	3%

Hasil Data Olahan

Pada tabel 4.10 diatas menunjukkan 15% responden menjawab Sangat Setuju meningkatkan kualitas gaya dan model kepemimpinan menangani konflik sosial, 49% menjawab setuju meningkatkan kualitas gaya dan model kepemimpinan menangani konflik sosial, 28% menjawab ragu-ragu 5% menjawab tidak setuju meningkatkan kualitas

gaya dan model kepemimpinan menangani konflik sosial, dan 3% menjawab sangat tidak setuju meningkatkan kualitas gaya dan model kepemimpinan menangani konflik sosial. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa 8% dari semua responden yang menolak pertanyaan variabel X3, serta 64% responden menerima pertanyaan X3, dan selebihnya ragu-ragu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua pertanyaan pada variabel X3 dapat diterima oleh sebagian besar responden.

d. **Variabel Y**

Dari hasil perhitungan tabulasi pada masing-masing kuesioner terhadap variabel X2, maka dapat dihitung berdasarkan analisis frekuensi terbentuk dalam tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Deskripsi Frekuensi Total Jawaban pada Variabel Y

Jenis Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	169	20%
Setuju	446	53%
Ragu-ragu	201	24%
Tidak Setuju	20	2%
Sangat Tidak Setuju	4	0%

Hasil Data Olahan

Pada tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa 20% responden menjawab Sangat Setuju meningkatkan kualitas keamanan, 53% menjawab setuju meningkatkan kualitas keamanan, dan 24% menjawab ragu-ragu, dan 2% tidak setuju meningkatkan kualitas keamanan. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa 2% dari semua responden yang menolak pertanyaan yang ada pada variabel Y, serta 73% responden menerima pertanyaan Y dan selebihnya ragu-ragu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua pertanyaan pada variabel X2 dapat diterima baik oleh sebagian besar responden.

2. Analisis Hasil Penelitian

a. Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui kehandalan suatu alat ukur maka perlu dilakukan uji reliabilitas Uji ini dilakukan dengan menggunakan Alpha Crobach. Dengan bantuan program komputer SPSS didapat nilai Alpha Crobach untuk masing-masing variable sebagai berikut:

Tabel 4.9. Uji Reliabilitas Variabel Kebijakan Binter

Reliability Statistics

Cronbach's	N of items
.741	20

Tabel 4.10. Uji Reliabilitas Variabel Konflik di Timika

Reliability Statistics	
Cronbach's	N of items
.718	20

Tabel 4.11. Uji Reliabilitas Variabel Kepemimpinan

Reliability Statistics	
Cronbach's	N of items
Alpa	
.917	20

Tabel 4.12. Uji Reliabilitas Variabel Keamanan dalam Negeri di Timika

Reliability Statistics	
Cronbach's	N of items
Alpa	
.761	20

- 1) Skala Kebijakan Binter, Alpha:0,741
- 2) Skala Konflik di Timika; Alpha:0,718
- 3) Skala Kepemimpinan; Alpha : 0,917
- 4) Skala Keamanan dalam Negeri di Timika; Alpha :0,761

Dari nilai Alpha Cronbach menunjukkan bahwa keempat variabel berdasarkan tingkat reliabilitasnya adalah sangat reliabel sehingga dapat dipergunakan untuk mengungkapkan variabel penelitian yang akan dilakukan.

b. Uji Validitas

Dengan melaksanakan uji validitas dengan metode SPSS, ditemukan semua r hitung lebih besar dari r table. Maka semua data tersebut valid untuk dianalisa (data terlampir).

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas data didasarkan pada nilai rasio skewness dan rasio kurtosis, dimana jika nilai kedua rasio tersebut berkisar antara -2 sampai dengan +2, maka data berdistribusi normal. Rumus sebagai berikut:

Rasio Skewness = Error! Reference source not found.

Rasio Kurtosis = Error! Reference source not found.

Sehingga dari keempat variable diatas dapat diambil kesimpulan seperti table dibawah ini.

Tabel 4.13. Tes Normalitas

	Kebijakan Binter	Konflik di Timika	Kepemimpinan	Keamanan dalam Negeri
Rasio Skewness	1,10	-0,45	-2,00	-2,00
Rasio Kurtosis	0,17	2,00	2,00	2,00

Uji Normalitas dengan rasio skewness didapat nilai sebesar 1,10 untuk Kebijakan pembinaan teritorial - 0,45 untuk konflik di Timika - 2,00 untuk kepemimpinan dan - 2,00 untuk Keamanan dalam Negeri di Timika. Sedangkan nilai rasio kurtosis diperoleh nilai sebesar 0,17 untuk Kebijakan pembinaan teritorial, 2,00 untuk Konflik di Timika, 2,00 untuk kepemimpinan dan 2,00 untuk Keamanan dalam Negeri di Timika. Karena rentang nilai rasio skewness dan rasio kurtosis berkisar antara - 2 sampai +2, maka sebaran data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak maka dapat dilihat dari VIF dan Tolerance. Apabila VIF mendekati 1 atau Tolerance mendekati 1 pada output coefficient maka dapat disimpulkan bahwa regresi bebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 4. 14. Uji Multikolinearitas

Coefficients"

Model				Collinearity	
	Zero - Order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Costant)					
Binter	170	110	074	835	1.197
konflik	103	-108	-072	823	1.215
kepemimpinan	739	734	723	951	1.052

a. Dependent Variabel : Keamanan dalam Negeri

Pada tabel Coefficients VIF dan tolerance antara variabel Kebijakan Binter Konflik di Timika dan kepemimpinan memiliki nilai sebesar VIF Kebijakan Binter = 1,197, VIF Konflik di Timika:1,215 dan VIF kepemimpinan :1,052 dan tolerance Kebijakan Binter :0,835, tolerance konflik di Timika :0,823 dan tolerance kepemimpinan :0,951. Baik VIF maupun Tolerance mendekati nilai 1, sehingga model regresi tidak terdeteksi multikolinearitas.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variable dependent tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Dari hasil perhitungan didapat sebagai berikut:

Tabel 4. 15. Uji Autokorelasi**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. error of the estimate	Durbinwatson
1	744 ^a	553	518	4.449	1.954

a. Predictors (Constant), Kebijakan Binter, Kepemimpinan, konflik

b. Dependent variable : Keamanan dalam Negeri

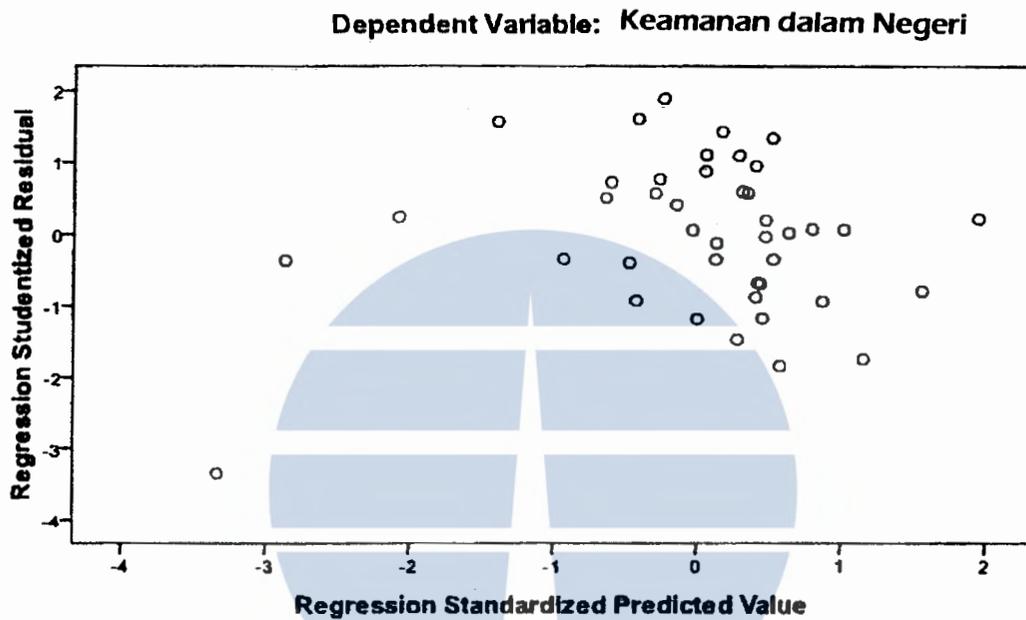
Kolom Durbin-Watson (D-W) menunjukkan nilai D-W sebesar 1,954. Dimana d_L didapat sebesar 1,34 dan d_U sebesar 1,66 Karena $D-W > d_U$ ($1,954 > 1,66$), dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi, sehingga model regresi memenuhi syarat asumsi klasik tentang autokorelasi.

4) Uji Heterokedasitas

Heterokedasitas yaitu varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain dan tidak membentuk pola tertentu. Dimana titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dari grafik pada lampiran Uji Heterokedasitas terlihat diagram pencar residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, serta tersebar baik di atas maupun di bawah

angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Heterokedasitas sehingga regresi ayak digunakan.

Scatterplot

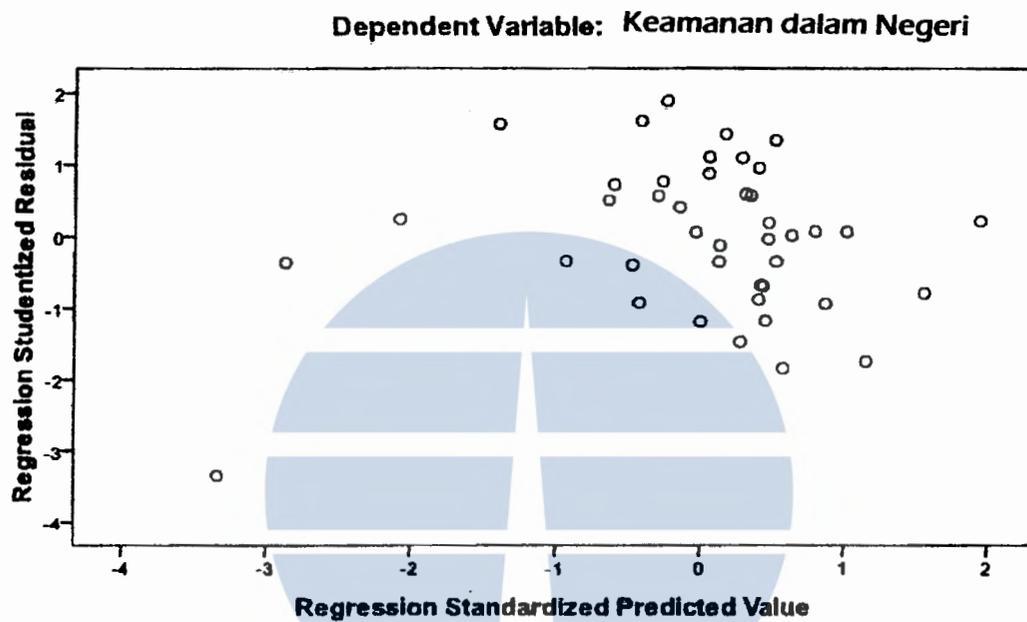


Gambar 4.

Uji Heteroskedastisitas

angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Heterokedasitas sehingga regresi ayak digunakan.

Scatterplot



Gambar 4.

Uji Heteroskedastisitas

5) Uji Linearitas

Tabel 4. 16. Hasil Statistik Uji Linearitas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sai g.
Keamanan Binter	Between	Combined	1283.833	17	75.520	4.529	000
	Groups	Linearity	48.676	1	48.676	2.919	100
		Deviation From	1235.157	16	77.197	4.630	061
	Within	Linearity	400.167	24	16.674		
	groups		1684.000	41			
Total							
Keamanan Konflik	Between	Combined	1361.571	17	80.092	5.962	000
	Groups	Linearity	17.706	1	17.706	1.318	262
		Deviation From	1343.866	16	83.992	6.252	062
	Within	Linearity	322.429	24	13.435		
	groups		1684.000	41			
Total							
Keamanan Kepemimpinan	Between	Combined	1270.783	19	66.883	3.561	003
	Groups	Linearity	918.584	1	918.58	48.90	000
		Deviation From	352.200	18	4	6	458
	Within	Linearity	413.217	22	19.567	1.042	
	groups		1684.000	41	18.783		
Total							

Adanya hubungan variabel bebas dengan variabel terikat yang saling membentuk kurva linear. Kurva linear dapat terbentuk apabila setiap kenaikan skor variabel bebas diikuti oleh kenaikan skor variabel terikat. Deviation from Linearity pada Anova table menunjukkan bahwa hubungan antara Konflik dengan Binter menghasilkan nilai F sebesar 4,630 dengan nilai p sebesar 0,061. Hubungan antara kinerja dengan Konflik di Timika menghasilkan F sebesar 6,252 dan nilai p sebesar 0,062. Hubungan keamanan dalam negeri dengan kepemimpinan menghasilkan F sebesar 1,042 dan nilai p sebesar 0,458. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa baik keamanana dalam negeri dengan kebijakan Binter, keamanan dalam negeri dengan konflik di Timika maupun keamanan dalam negeri dengan kepemimpinan masing-masing mempunyai nilai $p > 0,05$. Artinya, bahwa pada taraf kepercayaan 95 % tidak terjadi penyimpangan terhadap linearitas, sehingga uji asumsi klasik mengenai uji lineairitas dapat dibuktikan.

d. Analisis Regresi Berganda

Digunakannya analisis regresi berganda adalah agar dapat memberikan jawaban mengenai pengaruh tiga variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui koefisien regresi maka digunakan program SPSS dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 17. Koefisien Regresi Variabel X1, X2 dan X3 terhadap Y

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,744 ^a	0,554	0,518	4,449

Predictor : (constant) Kebijakan Binter, konflik, kepemimpinan

Dari tabel 26 diketahui, nilai R adalah 0,744 artinya variabel Kebijakan Binter, Konflik di Timika dan variabel kepemimpinan mempunyai hubungan yang kuat, positif dan searah dengan keamanan dalam negeri dan R² : 0,554 atau 55,4 % artinya keamanan dalam negeri dipengaruhi oleh kebijakan Binter, Konflik di Timika dan kepemimpinan dan sisanya sebesar 44,6 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya

Tabel 4.18. Koefisien Uji F Variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y**ANOVA^b**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	931.674	3	310.558	15.686	000 ^a
Residual	752.326	38	19.798		
Total	1684.000	41			

a. Predictors (Constant) : kepemimpinan, Kebijakan Binter, konflik

b. Dependent variable: Keamanan dalam negeri

Pada tabel 27 diketahui nilai F sebesar 15,686 dengan nilai p sebesar 0,000. Karena $p < 0,05$ maka regresi dapat dipakai untuk memprediksi keamanan dalam negeri.

Tabel 4.19. Persamaan Regresi Variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	45.261	12.192		3.712	001
Binter	096	140	081	681	500
konflik	-090	135	-080	-668	508
kepemimpinan	442	066	742	6.669	000

a. Dependent variable: Keamanan dalam negeri

Pada tabel 28 didapat nilai B constant 45,261 artinya adalah jika kebijakan Binter, Konflik di Timika dan kepemimpinan diabaikan maka nilai dari keamanan dalam negeri akan turun sebesar 45,261. Nilai B kebijakan

Binter sebesar 0,096, artinya adalah jika setiap satu satuan peningkatan kebijakan Binter maka akan meningkatkan keamanan dalam negeri sebesar 0,096. Nilai B konflik di Timika sebesar -0,090, berarti setiap kenaikan satu satuan Konflik di Timika akan menurunkan keamanan dalam negeri sebesar 0,090. Nilai B kepemimpinan sebesar 0,442, artinya adalah jika setiap satu satuan peningkatan kepemimpinan maka akan meningkatkan keamanan dalam negeri sebesar 0,442.

Berdasarkan nilai B constant, B kebijakan Binter, B Konflik di Timika dan B Kepemimpinan, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3$$

$$Y = 45,261 + 0,096X_1 - 0,090X_2 + 0,442X_3$$

3. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji persyaratan analisis pada kuesioner dari masing-masing variabel kemudian dinyatakan bahwa variabel tersebut valid dan reliabel maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis untuk menentukan hipotesis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan serta upaya yang dilakukan.

1. Uji hipotesis pada uji simultan

Untuk menguji hipotesis pertama, yaitu diduga bahwa variabel kebijakan Binter, Konflik di Timika dan kepemimpinan secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keamanan dalam negeri di Timika Kabupaten Mimika Papua maka akan digunakan uji F.

Hipotesis I

Ha: Diduga bahwa variabel kebijakan Binter, Konflik di Timika dan kepemimpinan secara bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap Keamanan dalam Negeri di Timika Kabupaten Mimika Papua.

H0: Diduga bahwa variabel kebijakan Binter, Konflik di Timika dan kepemimpinan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Keamanan dalam Negeri di Timika Kabupaten Mimika Papua.

Tabel 4.20. Koefisien Uji F Variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	931.674	3	310.558	15.686	0,000
2. Residual	752.326	38	19.798		
3. Total	1684.000	41			

ANOVA^b

- a. Predictors (Costant) : Kebijakan Binter, kepemimpinan, konflik
- b. Dependent variable: Keamanan dalam negeri

Dari hasil tabel 4.29 dapat diketatrui bahwa nilai F hitung diperoleh sebesar 15,686 dan $p:0,000$. Karena $p < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan Binter, Konflik di Timika dan kepemimpinan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Keamanan dalam Negeri di Timika di Kabupaten Mimika Papua. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang berbunyi H_a , diduga bahwa variable kebijakan Binter, Konflik di Timika dan kepemimpinan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keamanan dalam negeri di Timika Kabupaten Mimika Papua diterima, dan H_0 yang berbunyi diduga bahwa variabel Kebijakan Binter, Konflik di Timika dan kepemimpinan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Keamanan dalam Negeri di Timika Kabupaten Mimika Papua ditolak. Dengan demikian hipotesis pertama terbukti kebenarannya. Berdasarkan analisis tabel 4.26 terdapat nilai R square (koefisien determinasi) adalah 0,554. Artinya adalah 55,4 % kontribusi variabel kebijakan Binter, Konflik di Timika dan variabel kepemimpinan terhadap Keamanan dalam Negeri di Timika sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini memperkuat adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijakan Binter, keamanan dalam negeri, dimana kebijakan Binter yang berlebihan akan menyebabkan personel tersebut frustrasi dan dapat menurunkan prestasinya. Nelson dan Sutton

(1990) menyebutkan bahwa adanya hubungan yang berkaitan antara konflik dengan kinerja organisasi dan kelompok.

Timika Kabupaten Mimika Papua sebagai salah satu daerah yang sering mengalami konflik yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tidak sehat antara sesama masyarakat. Dengan adanya hubungan yang tidak sehat ini, secara tidak langsung mengakibatkan timbulnya Kebijakan pembinaan teritorial yang secara langsung untuk mengantisipasi adanya timbulnya gejala-gejala yang dialami oleh masyarakat, diantaranya; mudah marah, merasa kehilangan waktu kerja, kehilangan kepercayaan diri, dan sering merasa bosan dengan pekerjaannya (Umar, 1998) Konflik di Timika yang ditimbulkan lebih sering terjadi karena seringnya para tokoh adat salah dalam menginterpretasikan tugas yang harus di sampaikan kepada masyarakatnya. Selain itu, karena banyak diantara para tokoh di Timika Kabupaten Mimika Papua tidak memiliki kematangan dalam memimpin, mempunyai sifat otoriter dalam memimpin, sehingga konflik dan friksi sering timbul diantara kelompok masyarakat. Adanya iklim yang tidak sehat juga mempengaruhi suasana kehidupan masyarakat yang hanya melihat satu sisi yaitu kesalahan dari oknum yang menjadi faktor utama timbulnya konflik dan Kebijakan pembinaan teritorial yang secara langsung mempengaruhi keamanan dalam negeri di Timika

2. Uji hipotesis pada uji Parsial

Untuk menguji hipotesis ke dua yaitu diduga bahwa variabel kebijakan Binter, Konflik di Timika dan kepemimpinan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keamanan dalam Negeri di Timika Kabupaten Mimika Papua, maka pengujian hipotesis akan digunakan uji t.

Hipotesis II.

Ha: Diduga bahwa variabel kebijakan Binter, Konflik di Timika dan kepemimpinan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keamanan dalam Negeri di Timika Kabupaten Mimika Papua.

H₀: Diduga bahwa variabel kebijakan Binter, Konflik di Timika dan kepemimpinan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Keamanan dalam Negeri di Timika di Kabupaten Mimika Papua.

Tabel 4.21. Persamaan Regresi Variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	45.261	12.192		3.712	.001
Binter	0,096	140	.081	-0,681	0,061
konflik	-0,090	135	-.080	0,668	0,062
kepemimpinan	0,442	066	.742	6.669	0,000

Uji t dapat dilihat dari tabel 4.30, dimana nilai t variabel kebijakan Binter - 0,681 dan p: 0,061. Nilai t variabel Konflik di Timika: - 0,668 dan p :0.062. Nilai t variabel kepemimpinan : 6,669 dan p : 0,000. Karena nilai p berada di bawah nilai 0-05 ($p < 0,05$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa H_a , diduga bahwa variabel Kebijakan pembinaan teritorial, Konflik di Timika dan kepemimpinan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keamanan dalam Negeri di Timika Kabupaten Mimika Papua diterima.

H_0 , diduga bahwa variabel kebijakan Binter, konflik di Timika dan kepemimpinan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Keamanan dalam Negeri di Timika, ditolak. Dengan demikian hipotesis ke dua terbukti kebenarannya. Pada tabel tersebut didapat juga nilai B constant 45,261 artinya adalah jika kebijakan Binter, Konflik di Timika dan kepemimpinan diabaikan maka nilai dari keamanan dalam negeri akan turun sebesar 45,261. Nilai B kebijakan Binter sebesar 0,096, artinya adalah jika setiap satu satuan peningkatan kebijakan Binter maka akan meningkatkan keamanan dalam negeri sebesar 0,096. Nilai B konflik sebesar -0,090, berarti setiap kenaikan satu satuan Konflik di Timika akan menurunkan keamanan dalam negeri sebesar 0,090. Nilai B kepemimpinan sebesar 0,442, artinya adalah jika setiap satu

satuan peningkatan kepemimpinan maka akan meningkatkan keamanan dalam negeri sebesar 0,442.

Karena dipengaruhi oleh Kebijakan pembinaan teritorial maka keamanan dalam negeri di Mimika justru dapat terpacu dan cenderung meningkat keamanannya.

Mengapa antara masyarakat sering timbul Konflik yang mengakibatkan kerugian besar, karena faktor kepemimpinan tokoh masyarakat. Pada saat damai tokoh adat mempunyai peran sebagai pengendali, kalau sudah perang panglima perang sebagai tokoh perang yang mempunyai kendali.

Dua faktor ini tidak diteliti, karena pada saat penelitian ini dilaksanakan dalam kondisi damai. Dua faktor ini dipengaruhi gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh para tokoh adat dan tokoh perang.

Dalam konsep kepemimpinan dijelaskan bahwa kepemimpinan di Kab. Mimika diperoleh berdasarkan warisan. Fungsi dan peran tokoh sangat kuat. Terdapatnya sifat yang angkuh pada diri tokoh perang di Kabupaten Mimika Papua, sifat yang otoriter bahkan karena sifatnya tersebut sering membuat suasana tidak kondusif dan sering menimbulkan benturan-benturan dan friksi-friksi antara masyarakat, yang secara tidak langsung dapat menimbulkan konflik yang dapat mempengaruhi keamanan dalam negeri di Timika. Benturan dan friksi tersebut sering tidak disikapi secara baik para

tokoh tetapi sering disikapi secara arogan. Secara material suasana ini sering diciptakan , agar Pemkab Mimika mengucurkan dana untuk melaksanakan prosedur adat, berupa bayar kepala dan bakar batu untuk berdamai. Kejadian ini menjadi siklus, memerlukan penanganan yang terpadu agar hukum positif NKRI berlaku pada saat perang terhadap kelompok yang bertikai.

Langkah –langkah yang diambil adalah meningkatkan kemampuan kepemimpinan Tomas, Unsur Pemkab, Polres Mimika dan Kodim 1710/Mimika.

3. Upaya Integrasi di papua

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Kondisi ini terus mengalami perubahan, dan menjadi rawan ketika masyarakat tidak mampu mengatasi persoalan dalam waktu yang sempit, sehingga tanpa disadari menjadi persoalan yang berkepanjangan .

Tidak ada satu masyarakat pun yang bebas dari konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lain. Pendapat kontemporer terhadap konflik, dimana konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Hal ini tidak boleh terjadi, karena bertentangan dengan jati diri bangsa

Indonesia. Maka dibutuhkan kemampuan penanganan konflik secara terpadu guna menciptakan kedamaian dan kesejahteraan.

Kodim 1710/Mimika sebagai bagian dari TNI AD melalui fungsi dan peran Binter sangat tepat untuk menciptakan situasi yang kondusif di Kab. Mimika. Akan tetapi, dalam melaksanakan Binter tersebut tidak berdisi sendiri, harus selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai pemegang kekuasaan pembinaan wilayah, sehingga kualitas keamanan yang kondusif dapat terwujud.

Dihadapkan dengan keadaan di atas dan persatuan dan kesatuan sebagai center of gravity bangsa Indonesia, menuntut Kodim 1710/Mimika terus meningkatkan kemampuan unsur-unsurnya, khususnya Babinsa.

Dengan berubahnya strategi penanganan Papua dirubah dari operasi militer menjadi operasi teritorial didukung dengan operasi intelijen dan operasi tempur yang disiapkan. Hasil yang diperoleh sangat signifikan terhadap perkembangan penanganan konflik di Papua. Banyak OPM Bersenjata yang mati, akan tetapi tidak pernah ada pemberitaan TNI AD melanggar HAM. Apa sebenarnya yang dilakukan Kodim 1710/Mimika? Metode Binter dilaksanakan dengan pendekatan agama, budaya dan kesetaraan.

Dihadapkan dengan kondisi nyata di lapangan, Babinsa diharapkan terus meningkatkan pengetahuan budaya, agama dan

hak azasi manusia, Sapta Marga, Sumpah prajurit dan 8 wajib TNI agar dapat menjaga dan mewujudkan intergrasi di Papua seduai dengan UURI Nomor 23 Tahun 1959 Tentang **keadaan darurat**, UURI Nomor Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, UURI Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan gangguan Kamdagri.

4. **Upaya Menangani Konflik Terpadu.**

Program ketatalaksanaan teritorial dilaksanakan melalui pengumpulan data teritorial, pembuatan Tabulasi data dan klasifikasi wilayah, menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan menangani konflik. Dihadapkan dengan luasnya wilayah binaan, terkadang seorang Babinsa harus menguasai 2 wilayah desa. Dilain sisi, kadang wilayah antar desa tersebut tidak dihubungkan dengan jalan darat, sehingga para Babinsa tidak bisa sendiri. Oleh sebab itu, pelaksanaan pengumpulan data dan pembinaan wilayah secara terpadu.

Keterpaduan tersebut akan memberikan kemampuan kepada tiap-tiap Babinsa, karena sudah harus mempunyai keahlian khusus. Babinsa yang menguasai Ilmu agama, diarahkan untuk mengumpulkan data dan membina tokoh agama (Toga). Babinsa yang menguasai Budaya, diarahkan untuk mengumpulkan data

kebudayaan dan membina tokoh adat (Todat) dan kepala suku (Kepsuk). Babinsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan pendidikan, diarahkan untuk mengumpulkan data-data pendidikan dan membina tokoh masyarakat (Tomas), tokoh pemuda (Toda) dan tokoh lainnya. Dengan keterpaduan itu, Babinsa melalui pendekatan tokoh-tokoh, akan dapat membina wilayah yang tidak bisa dibina, karena keterbatasan transportasi laut dan udara.

Keterpaduan pembinaan ini dapat ditingkatkan dengan pembentukan komunitas. Membangun Komunitas Binaan Babinsa (KBB) dilakukan sebagai konsep dalam pengembangan kualitas kinerja Babinsa dalam menjaga keamanan wilayah. Beberapa kajian menunjukkan bahwa manfaat komunitas sosial sangat ampuh meningkatkan citra suatu produk atau organisasi. Dalam tesis ini diajukan empat kegiatan untuk mewujudkan KBB, antara lain:

a. Berbagi nilai dan norma kinerja.

Saling berbagi antara babinsa, khususnya dalam pengalaman pengumpulan data dan pembinaan wilayah, akan menciptakan norma kebersamaan, dan akan menciptakan hubungan positif dan konstruktif, sehingga memperlancar upaya dalam menjaga keamanan wilayah. Elemen ini akan mampu menciptakan profesionalitas Babinsa, sehingga mewarnai kegiatannya dalam

menciptakan hubungan baik dengan semua stake holder internal dan eksternal.

b. Kolaborasi peran Babinsa.

Aparat Babinsa seluruhnya yang ada di Koramil harus terlibat secara penuh dan aktif dalam setiap pertemuan dan diskusi yang membahas tentang kehidupan sosial dalam menjaga keamanan wilayah di Kab. Mimika. Upaya ini akan dapat dilakukan bila setiap Babinsa memiliki sikap rela untuk dikritik dan mengkritik tentang kualitas Binter.

c. Deprivatisasi praktis kinerja.

Dalam proses saling memberi kontribusi dan kritik dalam menciptakan hubungan baik dalam Binter, agar Babinsa tidak merasa bahwa metoda dan strategi Binter yang dilakukan dianggap paling benar. Babinsa memiliki keleluasaan untuk sesegera mungkin memperoleh masukan melalui proses observasi sesama aparat pembina wilayah (mitra). Babinsa akan lebih banyak berdiskusi untuk saling memberi masukan secara intensif mengenai sikap yang tepat dalam menciptakan hubungan baik, sehingga rasa percaya diri dan saling menghormati diantara para aparat pembina wilayah dengan stake holder akan saling menciptakan lingkungan yang positif.

d. Membuat Agenda Rutin Komunitas KBB.

Agar komunitas solid dan tercipta keakraban antar anggotanya, maka perlu adanya jadwal kumpul rutin komunitas. Kumpul rutin ini dapat dilakukan tergantung ketetapan dari anggota komunitas itu sendiri. Bisa dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali ataupun 3 (tiga) bulan sekali. Semakin sering diadakan kumpul rutin, semakin solid dan akrab antar anggota. Diharapkan desa yang sulit didatangi setiap hari, melalui mengagendakan kumpul rutin komunitas KBB, dengan membuat forum diskusi kecil yang berhubungan isu-isu yang menarik dengan pembinaan wilayah, saling memberi informasi penting, bersilaturahmi dan saling mengunjungi.

Dalam kegiatan komunitas dibutuhkan biaya. Sesuai dengan teori Edward III, implementasi harus didukung dengan sumber daya. Maka harus dimasukkan dalam anggaran Pemkab Mimika.

5. Upaya pendekatan sosial

Metode Binter yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan hasil yang baik, namun perkembangan demokrasi dan perubahan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pendapat, maka pelaksanaan Binter tidak cukup hanya menggunakan metode Binter, harus didukung dengan

kemampuan untuk melaksanakan metode Binter dengan pendekatan yang tepat, antara lain; pendekatan agama, budaya dan kesetaraan.

a. Pendekatan Agama.

Berdasarkan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pengetahuan Agama diperoleh melalui belajar, tentunya dalam proses menggali ilmu agama, peran seorang Toga (Ustad, Pendeta, Biksu dan lainnya) sangat dominan. Sebagian besar masyarakat Mimika memiliki ketaatan dan kepatuhan kepada pemimpin agamanya, dimana masyarakatnya mayoritas agama kristen, sangat patuh kepada Pendeta dan Pastor.

Melalui pendekatan agama yang disesuaikan dengan kondisi wilayah, merupakan upaya yang strategis, bila digunakan sebagai pendekatan untuk menyampaikan pesan-pesan damai kepada umat yang beragama di wilayah. Pendekatan ini menjadi mutlak, karena disamping mengamalkan sila pertama Pancasila, pendekatan agama ini menjadi daya tarik dan taktik penanganan potensi konflik menjadi kekuatan integritas nasional. Pastilah niat oknum yang ingin menimbulkan konflik dengan berbagai tindakan anarkis akar tertunda dan batal.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai berikut; Ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan sesuai dengan hari besar keagamaan, menjalin hubungan yang harmonis dengan Toga, mewujudkan harmonisasi hubungan dengan masyarakat, kemudian menyampaikan pesan-pesan kasih dan damai secara rutin pada saat melaksanakan Doa Bersama, khususnya jemaah yang berhubungan langsung dengan kelompok yang sering menimbulkan konflik.

b. Pendekatan Budaya

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia . dihadapkan dengan Hukum Adat lebih dominan dalam kehidupan masyarakat Mimika, dapat diatasi pula dengan budaya modern.

Perbedaan latar belakang kebudayaan akan membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Kondisi ini terjadi karena manusia

memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Dengan mengetahui perbedaan budaya tersebut, Binter dengan pendekatan budaya dapat menyampaikan pesan-pesan kedamaian, persatuan, kebersamaan dan toleransi, agar tercipta keseimbangan kehidupan menuju Indonesia damai.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satkowil sebagai aplikasi pendekatan secara budaya sebagai berikut:

- 1) Dalam setiap kegiatan harus memper-timbangkan adat istiadat dan tata krama yang berlaku di Mimika, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diterima masyarakat.
- 2) Menumbuhkan empati dan toleransi terhadap setiap perbedaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Mimika.
- 3) Menumbuh kembangkan sanggar-sanggar seni dan mengaktifkan tampil dalam acara-acara seni budaya nasional

c. Pendekatan Kesetaraan

Semua kesetaraan sosial dihimpun dalam HAM. Dasar-dasar HAM tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat

2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1, selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam yurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.

Perubahan-perubahan nilai yang dalam masyarakat adalah perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Maka ketika Binter melalui kegiatan bakti social, misalnya membangun rumah masyarakat dengan pendekatan kesetaraan pola pikir, sikap dan tindakan masyarakat, perubahan-perubahan harus diupayakan jangan terjadi dalam waktu yang cepat.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi dalam menjaga keamanan wilayah, maka Binter dengan pendekatan kesetaraan harus dapat mensosialisasikan “semangat menghargai pendapat orang lain”, sehingga masyarakat sebelum melakukan perubahan yang sarat dengan kesetaraan dan toleransi serta kepentingan orang lain, tidak akan ada lagi yang terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena menghormati HAM.

Dihadapkan dengan perkembangan pola pikir masyarakat yang semakin kritis dan terbuka terhadap hasil-hasil pembangunan nasional. Timbul titik rawan yang dapat dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan kegiatan yang dapat mengancam kondisi sosial, oleh sebab itu, diperlukan kemampuan Babinsa dalam berkomunikasi sosial untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan konflik vertikal dan horizontal.

Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini. Pencegahan dapat dilakukan melalui komunikasi sosial dengan Toga melalui pendekatan agama, Todat melalui kegiatan budaya dan Tomas serta Toda dengan pendekatan kesetaraan melalui kegiatan bakti sosial, mendahulukan kepentingan rakyat dan lainnya.

Dihadapkan dengan fenomena ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial antar golongan penduduk, antar sektor, antar wilayah dan antar kelembagaan ekonomi yang lebar akan menimbulkan adanya konflik berupa gejala kecemburuan sosial dan keberingasan sosial. Disamping itu akan beredar informasi yang tidak sehat di masyarakat,

kesan ketidakpastian, ketidakadilan, atau ketidakpuasan warga masyarakat dalam penyelesaian suatu masalah dilingkungan, sehingga timbul kerawanan keamanan, pangan, daya beli dan politik. Maka dibutuhkan Binter untuk mengembangkan kreatif masyarakat asli Mimika dan *Entrepreneur Training, Entrepreneurs Mentoring, serta Successful Entrepreneurs.*

6. **Pelatihan Kepemimpinan terpadu mencegah konflik**

Pencegahan konflik dilakukan secara cepat apabila mengetahui gejala atau kejadian yang diduga membawa kemungkinan terjadi kerusuhan sosial, Babinsa dapat mencegah pelaksanaan kegiatan, menghilangkan gejala, atau mengatasi masalah dengan cepat, tepat, dan akurat. Hal-hal yang perlu diwaspadai, diantisipasi karena membawa kemungkinan terjadi kerusuhan social yang ditunggangi oknum tertentu. Beberapa contoh timbulnya konflik di Kab. Mimika adanya penguasaan kawasan baru akan terjadi pengusuran hak penduduk asli dalam jumlah besar akan menimbulkan konflik. Adanya penambahan angkatan kerja asli Mimika di PT. Freeport dan tindakan PHK karyawan yang cukup besar. Adanya tuntutan kenaikan upah dan tunjangan lain dari pekerjaan yang tidak segera diselesaikan oleh PT. Freeport. Adanya kebijakan yang dianggap tidak bijak dari kebijaksanaan yang dianggap tidak bijaksana dalam

penyelesaian suatu masalah besar. Adanya pemogokkan pekerja. Adanya tuntutan ganti rugi yang belum selesai. Semua permasalahan itu seharusnya tidak timbul apabila fungsi dan peran Kepemimpinan hadir dengan cepat dan tepat. Maka diperlukan pelatihan kepemimpinan.

Pengertian pelatihan terpadu dalam tesis ini adalah pelatihan bersama, pelatihan satu atap yang melibatkan Kepala Desa, Babinsa, Babinkamtibmas Polri dan tokoh tokoh masyarakat dari wilayah yang sama. Materi yang diberikan mencakup kemampuan teknis yang harus dimiliki oleh peserta pelatihan untuk mendukung pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 dan Inpres Nomor 1 tahun 2014.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa menjaga keamanan wilayah harus dilaksanakan secara terpadu, oleh sebab itu harus dilatihkan secara terpadu pula, sehingga mekanisme terpadu dalam pengolahan keamanan wilayah dapat diwujudkan.

Pelatihan satu atap akan lebih murah dan lebih praktis serta mencerminkan langkah keterpaduan untuk meningkatkan kualitas keamanan dalam negeri di Kab. Mimika. Keterbatasan tenaga pengajar yang tersedia, dapat dikombinasikan dengan Universitas Terbuka.

Dukungan Logistik. Semua kegiatan penataran terpadu pasti memerlukan biaya, namun karena sudah menjadi kebutuhan

bersama dan menjadi program bersama, perlu disarankan, dukungan logistik sebaiknya didukung dari APBN Kementerian Pertahanan yang disalurkan melalui APBD Kabupaten/ Kota yang diselaraskan dengan kebutuhan personel peserta pelatihan terpadu tersebut.

Dihadapkan dengan sifat arogansi pemimpin tokoh –tokoh masyarakat, dalam pelatihan ini ditanamkan ketahanan moral dan kepatuhan terhadap pemberian sanksi hukum positif bagi masyarakat yang melanggar hukum di wilayah Kabupaten Mimika, sehingga masyarakat patuh dan taat kepada pemimpinnya, khususnya tokoh-tokoh masyarakat.

Banyak macam dari ketahanan moral, akan tetapi yang perlu uraikan dalam tulisan ini merupakan bagian yang mutlak harus dimiliki dalam menjaga keamanan wilayah; ketulusan, mengendalikan marah dan berbuat baik.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk memantapkan ketahanan moral Aparat adalah melaksanakan latihan emosional, memotivasi untuk selalu melakukan ibadah berjemaah bagi yang beragama Islam dan kristen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh variable kebijakan Binter yang signifikan terhadap kualitas keamanan dalam negeri di Kabupaten Mimika. Mengindikasikan bahwa peningkatan fungsi Binter yang akan meningkatkan kualitas keamanan di Kab. Mimika.
2. Terdapat pengaruh variable konflik yang signifikan terhadap kualitas keamanan dalam negeri di Kabupaten Mimika. Mengindikasikan bahwa penurunan konflik akan meningkatkan kualitas keamanan di Kab. Mimika.
3. Terdapat pengaruh variable kepemimpinan yang signifikan terhadap kualitas keamanan dalam negeri di Kabupaten Mimika. Mengindikasikan bahwa gaya kepemimpinan yang tepat dengan kondisi sosial masyarakat Kabupaten akan meningkatkan kualitas keamanan di Kab. Mimika.
4. Secara bersama-sama Terdapat pengaruh variable kebijakan Binter,

variable konflik dan variable kepemimpinan yang signifikan terhadap kualitas keamanan dalam negeri di Kabupaten Mimika. Mengindikasikan bahwa Binter dapat meningkatkan kualitas gaya kepemimpinan Tokoh-tokoh masyarakat untuk mengurangi konflik guna meningkatkan kualitas keamanan di Kab. Mimika.

5. Diperlukan Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas gaya kepemimpinan Tokoh-tokoh masyarakat dalam menangani konflik mengedepankan hukum positif agar kualitas keamanan di Kab. Mimika semakin baik, sebagai berikut :

- a. Upaya Integrasi di papua
- b. Upaya Menangani Konflik Terpadu
- c. Upaya pendekatan sosial
 - 1) Pendekatan Agama
 - 2) Pendekatan Budaya
 - 3) Pendekatan Kesetaraan
- d. Pelatihan Kepemimpinan terpadu mencegah konflik

B. Saran

Guna mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan Binter, meningkatkan gaya kepemimpinan tokoh-tokoh masyarakat dan mengurangi konflik untuk meningkatkan kualitas keamanan dalam negeri di Kab. Mimika, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diperlukan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mendukung komunikasi sosial Binter Kemampuan dalam menghubungi, mempengaruhi dan memberdayakan masyarakat untuk menangani konflik di Kabupaten Mimika.
2. Diperlukan Peraturan Daerah untuk menindak lanjuti Inpres nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
3. Perlu melibatkan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) untuk menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan terpadu Tokoh-tokoh Masyarakat, Babinkamtibmas Polres Mimika dan Babinsa Kodim 1710/Mimika serta Kepala Desa Pemerintah Kabupaten Mimik.
4. Pendekatan agama melalui doa bersama setiap pagi dalam satu kali seminggu yang melibatkab semua unsur pemerintah dan lapisan masyarakat di Kabupaten Mimika guna meningkatkan ketahanan mental, khususnya kesabaran dan keikhlasan serta komunikasi dan

koordinasi guna tercapai keterpaduan dalam menjaga keamanan wilayah.

Demikianlah Tesis Implementasi Binter dalam menjaga keamanan dalam negeri di Kabupaten Mimika dan tidak ada konflik lagi di Timika, menyadari keterbatasan yang saya miliki, mohon masukan untuk perbaikan dikemudian hari .



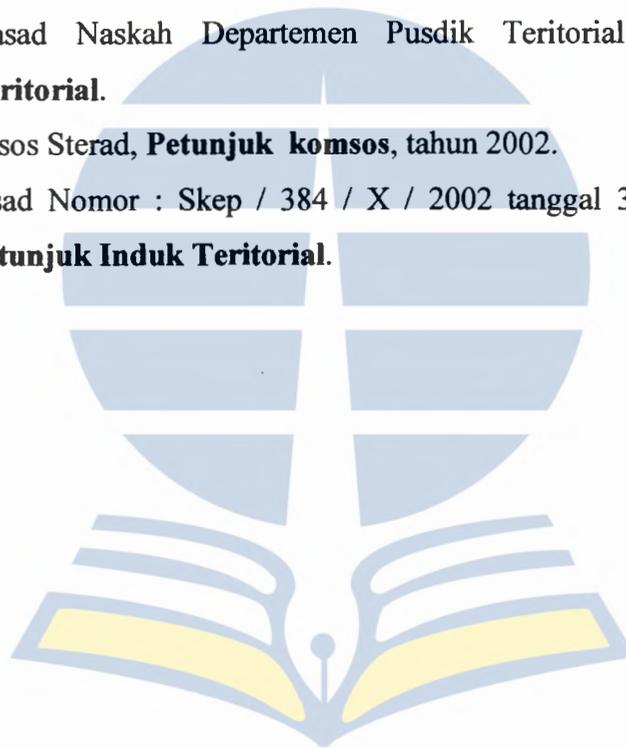
DAFTAR PUSTAKA

1. Davis, K dalam Handoko.(1986).**Komunikasi Sambung Rasa**, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta,.
2. Edwar III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington,
3. Effendy, Onong Uchyana.(1986). **Dinamika Komunikasi**, PT Remaja Rosda Karya, Bandung,
4. Goodnow, F. J. (1900). "*Politics and Administration*" A Study in Government. New York: Russell and Russell.
5. Jones, Charles O.(1996). **Pengantar Keijakan Publik** (Publik Policy) Terjemahan Ricky Ismanto, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
6. Josy Adiwisastra, Prolog, Tachjan. (2006). **Implementasi Kebijakan Publik**. Bandung : Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
DC,Congressional Quarterly Press
7. Moleong, L.L. (1999). **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung : Renanga Rosdakarya
8. Nasikun. (1974). **Sebuah Pendekatan Untuk Mempelajari Sistim Sosial Indonesia**, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik UGM, Yogyakarta
9. Pratikno, Riyono,(1979). **Komunikasi Pembangunan**, Alumni, Bandung
10. Rahim, Samsuddin Abdul, **Empat Teori Akbar**, diterjemahkan dari *Four Theories' of The Press*, oleh Fred S, Siebert., Theodore Peterson dan Wilbur

11. Rogers, Everett M. & F. Floyd Shoemaker.(1981).*Communication of Inovation*, Diterjemahkan oleh Drs. Abdillah Hanafi, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya,.
12. Said, Tribuana, **Budaya Politik Indonesia Dalam Demokrasi Pancasila**,
13. Samovar, Larry A, Cs. (1985). *Understanding Internasional Communication*, Ward worth Publishing Company, California
14. Sembiring Dermawan.(2013). **Ilmu Sosial Budaya Dasar**. Medan. Unimed press
15. Setiawan, Bambang.(1980) **Arti Penting Studi Jaringan Komunikasi di Indonesia**, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik UGM, Yogyakarta
16. Siregar, Ashadi Siregar.(1985). **Etika Komunikasi dan Komunikasi Sosial**, Fakultas Ilmu Sosial & Politik UGM, Yogyakarta
17. Subarsono.(2005). **Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sugiyono.
18. Suharto, Edi. (2005). **Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial**. Bandung : Penerbit Alfabeta.
19. Susanto, Astrid S. Dr. Phil.(1976). **Filsafat Komunikasi**, Binacipta, Bandung
20. Wilson, T. W. (1887). *The Study of Administration*. Political Science Quarterly, Vol. 2, No. 2, pp. 197-222.
21. Wirawan.(2014). **Kepemimpinan - Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian - Contoh Aplikasi untuk Kepemimpinan Wanita, Organisasi Bisnis, Pendidikan, dan Militer**. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Dokumen dan Perundangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1959 Tentang **keadaan darurat.**
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang **Penanganan gangguan Kamdagri**
5. Skep Panglima TNI ,**Reformasi internal TNI .**
6. Skep Kasad Naskah Departemen Pusdik Teritorial tentang **Lima Kemampuan Teritorial.**
7. Staf Komsos Sterad, **Petunjuk komsos, tahun 2002.**
8. Skep Kasad Nomor : Skep / 384 / X / 2002 tanggal 31 Oktober 2002 tentang **Buku Petunjuk Induk Teritorial.**



Lampiran 1:**ANGKET PENELITIAN****No. Responden :.....****Identitas:**

1. Masa Kerja :
2. Tingkat Pendidikan : 1. S3
4. SMU/SMA
2. S2
5. D3/S0
3. S1
3. Jabatan Sekarang :
4. Pangkat/Golongan :
5. Dinas/Instansi :
6. Alamat :

Petunjuk Pengisian Angket:

Bapak/Ibu/Sdr. dapat memilih satu item jawaban dari pertanyaan yang menurut Bapak/Ibu/Sdr paling sesuai dengan pengalaman dan kenyataan di lapangan, dengan memberi tanda silang (X) pada alternatif jawaban yang tersedia.

ANGKET UNTUK VARIABEL BEBAS (X)**A. Implementasi Kebijakan Binter****I. Komunikasi**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah setuju kesesuaian isi pesan sosialisasi Binter dalam menyampaikan program kepada pelaksana kebijakan dilakukan dengan cepat?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kejelasan pesan pengambil kebijakan Binter dalam menyampaikan program kepada pelaksana kebijakan sesuai dengan

aturan Binter?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kualitas media sosialisasi selama ini Binter tidak mengalami kemandekan dalam penyampaian pesan program pemerintah kepada masyarakat?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kualitas koordinasi antar lembaga dalam menyampaikan pesan program kepada masyarakat?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

5. Menurut Bapak/ibu, apakah Kecocokan sistem koordinasi tugas pelaksanaan Binter yang disampaikan kepada masyarakat tidak kontradiktif dengan kebijakan Binter?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

II. Sumber Daya

6. Menurut Bapak/ibu, apakah Jumlah sarana dan prasarana selama pelaksanaan program Binter didukung memadai?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak Setuju

- e. Sangat Tidak Setuju
7. Menurut Bapak/ibu, apakah Dampak sarana dan prasarana relevan dengan program Binter?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
8. Menurut Bapak/ibu, apakah Kecukupan jumlah Anggaran memadai tentang program Binter
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
9. Menurut Bapak/ibu, apakah para pelaksana Binter memiliki keahlian yang memadai?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
10. Menurut Bapak/ibu, apakah Dampak dana terhadap tugas dalam pelaksanaan tahapan program Binter didukung?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju

III. Sikap Pelaksana

11. Menurut Bapak/ibu, apakah Pengetahuan pelaksana Binter mampu dalam melaksanakan program Binter?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju

12. Menurut Bapak/ibu, apakah para pelaksana memahami teknik Binter dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam program Binter?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
13. Menurut Bapak/ibu, apakah Motivasi pelaksana Binter selalu respon terhadap tugas-tugas dalam program Binter?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
14. Menurut Bapak/ibu, apakah tujuan individu pelaksana Binter sesuai dengan keinginan masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dalam program Binter?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
15. Menurut Bapak/ibu, apakah Sasaran pelaksana Binter sesuai dengan program Binter?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju

IV. Struktur Birokrasi

16. Menurut Bapak/ibu, apakah Struktur organisasi pelaksana Binter sederhana dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa/ Kelurahan memiliki struktur yang sederhana?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
17. Menurut Bapak/ibu, apakah Pembagian tugas Binter dari tingkat

Kabupaten, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan memiliki struktur yang fleksibel?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

18. Menurut Bapak/ibu, apakah Hubungan antar pelaksana Binter dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan memiliki tujuan yang jelas?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

19. Menurut Bapak/ibu, apakah Koordinasi antar pelaksana Binter dalam menjalankan program Binter memiliki fungsi yang jelas dalam organisasi pelaku Binter?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

20. Menurut Bapak/ibu, apakah Standar operasional Binter selalu efektif dalam menjalankan program Binter?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

B. Variabel Konflik

I. Pertentangan masyarakat dengan Pemkab Mimika

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah penangkapan atas ketua organisasi OPM sesuai dengan aturan Binter?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemberontakan sesuai keinginan masyarakat?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kejelasan pesan pengambil kebijakan menghindari konflik masyarakat?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

4. Menurut Bapak/ibu, apakah sosialisasi Integrasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak kontradiktif dengan kebijakan Binter?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

5. Menurut Bapak/ibu, apakah koordinasi antar lembaga selama ini sesuai dengan kebijakan Binter ?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

II. Pertentangan masyarakat asli Papua dengan Migran

6. Menurut Bapak/ibu, apakah masyarakat Papua menganggap berbeda dari masyarakat Indonsia dalam program Binter?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

7. Menurut Bapak/ibu, apakah secara fisik orang Papua berbeda dalam menjalankan Program sesuai dengan tahapan program Binter?
 - a. Sangat Setuju

- b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
8. Menurut Bapak/ibu, apakah pandangan dan cara hidup tersendiri orang papua dengan migran berbeda dalam menjalankan Program yang jelas sesuai dengan kebijakan program Binter?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
9. Menurut Bapak/ibu, apakah Nasionalisme Papua berbeda dengan program Binter?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
10. Menurut Bapak/ibu, apakah Kondisi sosial yang timpang Kecukupan jumlah Anggaran memadai tentang program Binter
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
- III. Pertentangan antar suku**
11. Menurut Bapak/ibu, apakah para pelaksana Binter memiliki keahlian yang memadai?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
12. Menurut Bapak/ibu, apakah Dampak dana terhadap tugas dalam pelaksanaan tahapan program Binter didukung?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu

- d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
13. Menurut Bapak/ibu, apakah Pengetahuan pelaksana Binter mampu dalam melaksanakan program Binter?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
14. Menurut Bapak/ibu, apakah para pelaksana memahami teknik Binter dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam program Binter?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
15. Menurut Bapak/ibu, apakah Motivasi pelaksana Binter selalu respon terhadap tugas-tugas dalam program Binter?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
- IV. Pertentangan antar agama**
16. Menurut Bapak/ibu, apakah tujuan individu pelaksana Binter sesuai dengan keinginan masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dalam program Binter?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
17. Menurut Bapak/ibu, apakah Sasaran pelaksana Binter sesuai dengan program Binter?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

18. Menurut Bapak/ibu, apakah Hubungan antar pelaksana Binter dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan memiliki tujuan yang jelas?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
19. Menurut Bapak/ibu, apakah Koordinasi antar pelaksana Binter dalam menjalankan program Binter memiliki fungsi yang jelas dalam organisasi pelaku Binter?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
20. Menurut Bapak/ibu, apakah Standar operasional Binter selalu efektif dalam menjalankan program Binter?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju

C. variabel Kepemimpinan

I. Kemampuan

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah Pengalaman Unsur Pimpinan di Kab. Mimika dalam menyampaikan program kepada pelaksana kebijakan?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah Perbuatan pengambil kebijakan Binter dalam menyampaikan program kepada pelaksana kebijakan sesuai dengan aturan Binter?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu

- d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah Meguasai media sosialisasi selama ini Binter dalam penyampaian pesan program pemerintah kepada masyarakat?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah Hubungan koordinasi antar lembaga dalam menyampaikan pesan program kepada masyarakat?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
5. Menurut Bapak/ibu, apakah Kesiapan koordinasi tugas pelaksanaan Binter yang disampaikan kepada masyarakat tidak kontradiktif dengan kebijakan Binter?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
- II. Gaya**
6. Menurut Bapak/ibu, apakah Pengayom pemimpin selama pelaksanaan program Binter ?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
7. Menurut Bapak/ibu, apakah pemimpin empati dengan program Binter?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu

- d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
8. Menurut Bapak/ibu, apakah Pemimpin Perhatian Anggaran memadai tentang program Binter
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
9. Menurut Bapak/ibu, apakah Pemimpin Mengarahkan para pelaksana Binter memiliki keahlian yang memadai?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
10. Menurut Bapak/ibu, apakah Pemimpin Membimbing terhadap tugas dalam pelaksanaan tahapan program Binter didukung?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
- III. Prinsip**
11. Menurut Bapak/ibu, apakah Pemimpin Panutan pelaksana Binter mampu dalam melaksanakan program Binter?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
12. Menurut Bapak/ibu, apakah Pemimpin Memberi pelaksana memahami teknik Binter dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam program Binter?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

13. Menurut Bapak/ibu, apakah Pemimpin Membantu pelaksana Binter selalu respon terhadap tugas-tugas dalam program Binter?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
14. Menurut Bapak/ibu, apakah Pemimpin Pengendali individu pelaksana Binter sesuai dengan keinginan masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dalam program Binter?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
15. Menurut Bapak/ibu, apakah Pengikut Pemimpin para pelaksana Binter sesuai dengan program Binter?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju

IV. Teknik

16. Menurut Bapak/ibu, apakah Pemimpin Menyelami pelaksana Binter sederhana dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa/ Kelurahan memiliki struktur yang sederhana?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
17. Menurut Bapak/ibu, apakah Pemimpin Menghubungi pelaksana tugas Binter dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan memiliki struktur yang fleksibel?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Ragu-ragu
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju

18. Menurut Bapak/ibu, apakah Pemimpin Mempengaruhi antar pelaksana Binter dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan memiliki tujuan yang jelas?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

19. Menurut Bapak/ibu, apakah Pemimpin Mengajak Koordinasi antar pelaksana Binter dalam menjalankan program Binter memiliki fungsi yang jelas dalam organisasi pelaku Binter?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

20. Menurut Bapak/ibu, apakah Pemimpin Mendorong Standar operasional Binter selalu efektif dalam menjalankan program Binter?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

Variabel Terikat

D. Kualitas keamanan dalam negeri

I. Berwujud

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kelengkapan sarana prasarana kesesuaian keamanan di Mimika didukung Binter?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah Lokasi strategis dalam rogram keamanan di Mimika didukung Binter?
 - a. Sangat Setuju

- b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kenyamanan selama ini keamanan masyarakat di Mimika didukung Binter?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kecukupan petugas antar lembaga dalam keamanan masyarakat di Mimika didukung Binter?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
- II. Kehandalan**
5. Menurut Bapak/ibu, apakah tepat waktu terlaksana dalam keamanan di Mimika didukung Binter?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
6. Menurut Bapak/ibu, apakah Kesesuaian prosedur dalam keamanan di Mimika didukung Binter?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
7. Menurut Bapak/ibu, apakah Kesetaraan/perlakuan sama dari petugas dalam

keamanan di Mimika didukung Binter?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

8. Menurut Bapak/ibu, apakah Ketepatan dalam keamanan di Mimika didukung Binter?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

III. Ketanggapan

9. Menurut Bapak/ibu, apakah Ketanggapan kebutuhan masyarakat dalam keamanan di Mimika didukung Binter?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

10. Menurut Bapak/ibu, apakah Penerimaan kritik dan saran dalam pelaksanaan keamanan di Mimika didukung Binter?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

11. Menurut Bapak/ibu, apakah Penuh perhatian pelaksana dalam melaksanakan program keamanan di Mimika didukung Binter?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

12. Menurut Bapak/ibu, apakah Memiliki pengetahuan yg memadai para pelaksana tugas-tugas keamanan di Mimika didukung Binter?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

IV. Keyakinan/jaminan

13. Menurut Bapak/ibu, apakah Kesiapan selalu respon petugas terhadap keamanan di Mimika didukung Binter?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

14. Menurut Bapak/ibu, apakah Kepastian hukum sesuai dengan keinginan masyarakat dalam keamanan di Mimika didukung Binter?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

15. Menurut Bapak/ibu, apakah Kepercayaan masyarakat terhadap keamanan di Mimika didukung Binter?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

16. Menurut Bapak/ibu, apakah Tanggungjawab Pemimpin tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa/ Kelurahan terhadap keamanan di Mimika didukung Binter?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

V. Empati

17. Menurut Bapak/ibu, apakah Pemahaman kebutuhan keamanan di Mimika didukung Binter?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu

- d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
18. Menurut Bapak/ibu, apakah Keinginan membantu dalam keamanan yang jelas di Mimika didukung Binter?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
19. Menurut Bapak/ibu, apakah kepedulian dengan masyarakat dalam keamanan di Mimika didukung Binter?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
20. Menurut Bapak/ibu, apakah Keinginan menindaklanjuti kritik dalam menjalankan tugas keamanan di Mimika didukung Binter?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sumber daya manusia:
 - a. Menggali informasi dari informan (Bupati Mimika, Dandim 1710/Mimika, Kapolres Mimika) tentang kesiapan dan kemampuan aparat Satkowil dalam melaksanakan Binter di Kabupaten Mimika apakah sesuai dengan yang diharapkan dalam menjaga keamanan dalam negeri di wilayah Kodim 1710/Mimika di Timika.
 - b. Menggali informasi dari informan (Danramil dan Babinsa) tentang kesiapan dan kemampuan serta kekuatan aparat Satkowil dalam melaksanakan Binter di Kabupaten Mimika apakah sesuai dengan yang diharapkan dalam menjaga keamanan dalam negeri di wilayah Kodim 1710/Mimika di Timika.
 - c. Menggali informasi dari informan (Kapolsek dan Babinkamtibmas) tentang kesiapan dan kemampuan serta kekuatan aparat Satkowil dalam melaksanakan Binter di Kabupaten Mimika apakah sesuai dengan kondisi wilayah kabupaten Mimika dalam mendukung tugas Polri di kabupaten Mimika.
 - d. Menggali informasi dari informan (Camat dan Kepala Desa) tentang kesiapan dan kemampuan serta kekuatan aparat Satkowil dalam melaksanakan Binter di Kabupaten Mimika apakah sesuai dengan yang diharapkan dalam menjaga keamanan dalam negeri di wilayah Kodim 1710/Mimika di Timika dalam mendukung tugas Pemda di kabupaten Mimika.
 - e. Menggali informasi dari informan (Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda) tentang kesiapan dan kemampuan serta kekuatan aparat Satkowil dalam melaksanakan Binter di Kabupaten Mimika apakah sesuai dengan

yang diharapkan dalam menjaga keamanan dalam negeri di wilayah Kodim 1710/Mimika di Timika dalam mendukung mendukung mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan di kabupaten Mimika.

2. Struktur Birokrasi:

- a. Menggali informasi dari informan (Bupati Mimika, Dandim 1710/Mimika, Kapolres Mimika) tentang prosedur pelaksanaan Binter di Kabupaten Mimika apakah sesuai dengan UU yang berlaku dan apakah masih dibutuhkan dalam menjaga keamanan dalam negeri di wilayah Kodim 1710/Mimika di Timika.
- b. Menggali informasi dari informan (Danramil dan Babinsa) tentang prosedur pelaksanaan Binter di Kabupaten Mimika apakah tantangan yang dihadapi sesuai dengan kesiapan dan kemampuan yang dimiliki informan, apakah luas wilayah tugas yang dihadapi sesuai dengan tanggung jawab yang menjadi tugas pokok dan fungsi informan, apakah metode Binter dengan bakti TNI, komunikasi sosial dan perlawanan wilayah sudah cukup untuk melaksanakan tugas informan, apakah pendekatan agama, budaya dan kesetaraan sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas di kabupaten Mimika, dan apakah lama penugasan sesuai dengan tantangan yang dihadapi.
- c. Menggali informasi dari informan (Kapolsek dan Babinkamtibmas) tentang prosedur pelaksanaan Binter di Kabupaten Mimika apakah sesuai dengan sistem koordinasi yang berlaku dengan Polri, apakah ada masalah kesulitan selama bekerjasama dengan Satkowil dalam menjaga keamanan dalam negeri di wilayah kabupaten Mimika, apakah pendekatan Binter sesuai dengan kondisi wilayah kabupaten Mimika, dan apakah Binter mendukung tugas Polri di kabupaten Mimika.

- d. Menggali informasi dari informan (Camat dan Kepala Desa) tentang prosedur pelaksanaan Binter di Kabupaten Mimika apakah sesuai dengan sistem koordinasi yang berlaku dengan Pemda, apakah ada masalah kesulitan selama berekerjasama dengan Satkowil dalam menjaga keamanan dalam negeri di wilayah kabupaten Mimika, apakah pendekatan Binter sesuai dengan kondisi wilayah kabupaten Mimika, dan apakah Binter mendukung tugas Pemda di kabupaten Mimika.
 - e. Menggali informasi dari informan (Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda) tentang prosedur pelaksanaan Binter di Kabupaten Mimika apakah sesuai dengan sistem kehidupan sosial di wilayah kabupaten Mimika, apakah ada masalah keterlibatan Binter dalam menjaga keamanan dalam negeri di wilayah kabupaten Mimika, apakah pendekatan Binter sesuai dengan kondisi sosial masyarakat wilayah kabupaten Mimika, dan apakah Binter mendukung mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan di kabupaten Mimika.
3. Komunikasi:
- a. Menggali informasi dari informan (Bupati Mimika, Dandim 1710/Mimika, Kapolres Mimika) tentang kesiapan dan kemampuan aparat Satkowil dalam melaksanakan Binter di Kabupaten Mimika apakah ada masalah dalam berkomunikasi dalam menjaga keamanan dalam negeri di wilayah Kodim 1710/Mimika di Timika.
 - b. Menggali informasi dari informan (Danramil dan Babinsa) tentang kesiapan dan kemampuan tentang kesiapan dan kemampuan aparat Satkowil dalam melaksanakan Binter di Kabupaten Mimika apakah ada masalah dalam berkomunikasi dalam menjaga keamanan dalam negeri di wilayah Kodim 1710/Mimika di Timika.

- c. Menggali informasi dari informan (Kapolsek dan Babinkamtibmas) tentang kesiapan dan kemampuan aparat Satkowil dalam melaksanakan Binter di Kabupaten Mimika apakah ada masalah dalam berkomunikasi dalam menjaga keamanan dalam negeri di wilayah Kodim 1710/Mimika di Timika dengan unsur Polri.
 - d. Menggali informasi dari informan (Camat dan Kepala Desa) tentang kesiapan dan kemampuan aparat Satkowil dalam melaksanakan Binter di Kabupaten Mimika apakah ada masalah komunikasi dalam menjaga keamanan dalam negeri di wilayah Kodim 1710/Mimika di Timika dalam mendukung tugas Pemda di kabupaten Mimika.
 - e. Menggali informasi dari informan (Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda) tentang kesiapan dan kemampuan aparat Satkowil dalam melaksanakan Binter di Kabupaten Mimika apakah ada masalah komunikasi dalam menjaga keamanan dalam negeri di wilayah Kodim 1710/Mimika di Timika mendukung mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan di kabupaten Mimika.
4. Sikap.
- a. Menggali informasi dari informan (Bupati Mimika, Dandim 1710/Mimika, Kapolres Mimika) tentang sikap aparat Satkowil dalam melaksanakan Binter di Kabupaten Mimika apakah ada masalah sikap dalam menjaga keamanan dalam negeri di wilayah Kodim 1710/Mimika di Timika.
 - b. Menggali informasi dari informan (Danramil dan Babinsa) tentang sikap masyarakat terhadap aparat Satkowil dalam melaksanakan Binter di Kabupaten Mimika apakah ada masalah sikap dalam menjaga keamanan dalam negeri di wilayah Kodim 1710/Mimika di Timika.

- c. Menggali informasi dari informan (Kapolsek dan Babinkamtibmas) tentang sikap aparat Satkowil dalam melaksanakan Binter di Kabupaten Mimika apakah ada masalah sikap dalam menjaga keamanan dalam negeri di wilayah Kodim 1710/Mimika di Timika dengan unsur Polri.
- d. Menggali informasi dari informan (Camat dan Kepala Desa) tentang sikap aparat Satkowil dalam melaksanakan Binter di Kabupaten Mimika apakah ada masalah sikap dalam menjaga keamanan dalam negeri di wilayah Kodim 1710/Mimika di Timika dalam mendukung tugas Pemda di kabupaten Mimika.
- e. Menggali informasi dari informan (Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda) tentang sikap aparat Satkowil dalam melaksanakan Binter di Kabupaten Mimika apakah ada masalah sikap dalam menjaga keamanan dalam negeri di wilayah Kodim 1710/Mimika di Timika mendukung mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan di kabupaten Mimika.



Lampiran 3

TRANSKRIP WAWANCARA

TIMIKA 1

Pertama sekali saya ucapkan terimakasih, saya Albiner Sitompul mau menyelesaikan studi S2 yang saya mulai waktu saya masih Aster, tapi keburu pindah ke Jakarta. Saat ini ada wktu luang, saya mamfaatkan untuk penelitian, karena lembaga juga minta, kalau saya sudah mulai harus saya akhiri, melalui wawancara dengan ini judul tesis saya Implementasi kebijakan Binter, konflik dan kepemimpinan terhadap kualitas keamanan dalam negeri di Kabupaten Mimika. Pertanyaannya saya tentang kualitas aspek dari keamanan. Bagaimana perasaan bapak-bapak apakah rasa aman itu sudah cukup atau perlu ditingkatkan di Kabupaten Mimika, masing-masing mohon jawabannya

Bapak wilhelmos herdetme. sehari-hari dipanggil widi dalam keseharian sebagai wakil ketua DPD Bidang politik dan pemerintahan jadi kita melihat keamanan dari sisi pembinaan Teritorial yang dilakukan oleh dalam hal ini TNI tapi secara khusus Kodam Cenderawasih tingkat keberhasilan untuk Kodim 1710/Timika kita melihat itu tolak ukurnya itu ada di desa-desa atau di kampung-kampung artinya bahwa kerja dari Babinsa sebagai perpanjangan tangan dari Kodim 1710/Timika saya lihat selama saya hidup di Timika dan orang asli disini saya lihat dari tahun ke tahun sudah menunjukkan ada peningkatan, peningkatan dalam arti bahwa TNI sendiri sudah bisa menyadari dan menposisikan diri mereka apalagi sejak adanya refosisi TNI dan Polri dimana TNI lebih pada aspek menjaga Kedaulatan Negara disini posisi Babinsa dari tahun ketahun telah menampilkan harapan dari reformasi

itu sendiri, jadi dulu kita di Papua apalagi di Timika sejak pemberlakuan DOM itu rakyat merasa seperti ada jarak antara negara dan warga sipil sendiri disini sejak terjadinya reformasi TNI sudah belajar dari kesalahan-kesalahan masalalu dan dalam hal pembinaan Teritorial TNI sendiri,

(mohon maaf, apakah ada pengakuan dari TNI dengan kesalahan itu)

Bapak wilhelmos herdetme. secara institusi tidak ada tapi secara individu-individu bahwa mereka mengakui bahwa ada kesalahan dari pemberlakuan DOM pada saat itu,

(Pangdam waktu itu pernah mngatakan kami ada kesalahan pangdam mengatakan maafkan kesalahan kami)

Bapak wilhelmos herdetme. kalau pernyataan itu memang ada saya sebagai anak mantan kepala suku besar Amumai Timika yang sendiri langsung merasakan dampak dari pemberlakuan DOM pada saat itu saya patut mengajungkan jempol dan juga menyatakan berterimakasih juga atas kesadaran dan permintaan maaf dari pimpinan TNI Panglima Kodam Mayjen Kristian Zebua, dalam hal pembinaan Teritorial saya melihat bahwa semakin hari semakin baik artinya TNI sudah berperan aktif dalam semua segi pembangunan banyak anggota-anggota TNI yang kita lihat di kampung-kampung misalnya yang menjadi guru

Menjadi guru, perawat saya sendiri anak dari mantan pejuang dari Trikora. Sejak terjadinya adanya revolusi TNI sebenarnya itu agak kurang setuju saya sendiri secara pribadi artinya saat sekarang ini perkembangan dinamika yang terjadi pada saat ini dimana kita lihat kualitas hidup dan dari sisi kesejahtraan juga itu seperti

antara ada langit dan bumi antara TNI dan Polri seperti TNI anak tiri Polri itu anak kandung, kita sangat prihatin terhadap kehidupan-kehidupan anggota TNI di mana-mana tetapi kita bersyukur juga bahwa mereka tetap berpegang teguh pada Sapta Marga, kita bersyukur seperti itu bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum itu kita tidak bisa menjernerisasi bahwa itu adalah kesalahan institusi bahwa kegagalan yang dilakukan oleh oknum-oknum itu bukan, adalah kesalahan dari institusi jadi secara umum saya dapat menyatakan bahwa pembangunan Teritorial terutama kepada anggota TNI sendiri dan juga kepada rakyat dan daerah Teritorial saya lihat sudah sangat berhasil, cuman dari saya sendiri pribadi mungkin saya juga mending meminta kepada negara agar bagaimana tidak terjadi kesenjangan antara TNI-Polri (dalam pembangunan Teritorial) dimana dalam hal pendanaan kita tidak usah jauh-jauh markas kita yang sekarang ini koramil yang berada di kota ini, ini kan dari jaman saya kecil sampai sekarang ini belum ada terenovasi yang terlalu luar biasa untuk markas ini (maskas Koramil) bagaimana TNI dia mau memaksimalkan pembangunannya kebawah kalau dia dalam tubuh dia sendiri tidak dibina oleh negara (trms).

Lasaruskaran. Kepala suku di Timika forum pembangunan kebangsaan menyangkut Komando kewilayahan (wilayah Teritorial) khusus Kab. Timika kodim ini terbentuk 26 Desember 1996 dipimpin oleh Letkol Tomy Rompis orang pertama, yang berikutnya menyangkut komando ke wilayahan di daerah ini tadinya tahun 1996 berjalan bagus dalam perjalanannya lahirlah Revormasi UUD Nomor 34 tahun 2004 revormasi Tugu TNI dirubah.

(Bapak tau itu ada UU Nomor 34 tahun 2004)

Lasaruskaran. Iya kebijakan revormasi tiga tokoh termasuk Aminrais tiga tokoh itu lahirlah revormasi rezim yang lama, akan akan lahirlah Demokrasisasi revormasi-revormasi kedaulatan maka kelepasan politik bagi rakyat Indonesia bisa pilih Presiden, Gubernur, Bupati, secara langsung lahirlah UU Nomor 3 tahun 2002 TNI menjaga keutuhan wilayah UU Nomor 22 tahun 2002 Polisi adalah alat negara dan lembaga negara bicara tentang komando kewilayahan di Timika Teritorial tetap berjalan sampai sekarang aman terkendali luar biasa hanya kendala-kendala yang tadi disampaikan wilayah ini letaknya luas terdiri daerah ketinggian daerah pegunungan dan pesisir pantai dan dataran rendah orientasi satuan Teritorial ini bahwa wilayah ikut jelas ada kesulitan-kesulitan untuk kelaut kesulitan Transportasi kegunung pun juga penerbangan terbatas jadi kendala-kendala yang dihadapi oleh pimpinan wilayah Komando Satuan Kodim 1710/Mimika lalu di wilayah kampung-kampung itu sudah ada Babinsa tetapi masih kurang harus musti maksimum mungkin struktur dari Kodam bisa 1 kampung itu 2 atau 3 sementara ini para Danramil 1 merangkap 3 - 4 kampung hingga pulang pergi jarak jauh.

TIMIKA 2

Jadi begitu memang Kab. Ini tidak menentu apa yang tadi saya sampaikan masyarakat terisolir, kalau dikatakan 3 kelompok untuk terlalu pintar dan bodoh ada juga disini sulit menghadapi itu, apalagi satuan TNI pengawalan ketat dulu

beda dengan kondisi sekarang musti bertindak hati-hati sekali. Berdasarkan revormasi demokrasi itu, jadi ini hanya pengawal negara kita bergerak seperti yang dulu-dulu maka timika itu adalah satuan-satuan ada Kaveleri, Brigif dan Yonif 754/ENK itu pasukan pemukul tetapi kepuasan dan wilayah komando kewilayahan dan satuan binaan Teritorial itu sampai hari ini berjalan juga dengan bagus luar biasa Kodim sebagai pengendali yang bagus sampai saat ini.

(Kengapa bapak tertarik dengan satuan Teritorialnya mereka kan tidak punya senjata apa bapak yakin kualitas keamanan bisa ditingkatkan oleh satuan Teritorial dia tanpa senjata?

Lasaruskaran. Walaupun dia tanpa senjata saya, wilayah binaan Kodim berhasil dengan pendekatan melanyani masyarakat, Mereka diberi jabatan dan dipercayai masyarakat diberi jabatan, sebagainya tokoh-tokoh Pemerintan TNI-Polri mengamankan kota ini walaupun tidak ada senjata tetapi kami mengamankan dengan kondisi yang ada, bukti sekarang satuan seperti Kodim turun dikampung-kampung tidak ada senjata, orang jalan dengan yakin dan percaya, kalau dulu dibekali senjata kalau sekarang tidak.

(Bagaimana hubungan satuan personel satuan kewilayahan Kodim ini dengan masyarakat)

Lasaruskaran. Itupun kalau terjadi sesuatu jelas kami lapor kepada Dandim lapor ke Polisi lalu Polisi mempunyai kebijakan dengan hukum tidak ada yang langsung kami tangani tidak bisa juga lapor ke komando kesatuan tetapi wajib lapor ke Polisi juga.

(Bagaimana bapak Ratakan hubungan personel satuan Teritorial Kodim 1710/Mimika dengan masyarakat)

Lasaruskaran. Kami sangat dekat tidak takut komunikasi kami sangat baik sekali (apakah personel itu melaksanakan tugas dengan senjata)

Lasaruskaran. Tidak mereka menggunakan pendekatan-pendekatan dalam kemanusiaan.

Pendeta Moses Logmeres. Wakil rakyat taube wakil ketua dua Forum Komunikasi Umat Beragama kalau kita mau menyampaikan bahwa kualitas keamanan dalam negeri di Kab. Timika itu memang memang di daerah ini banyak masalah sosial yang terjadi yang pernah kita dengar sampai dengan hari ini kami bisa menyampaikan bahwa situasi keamanan di Kabupaten Timika ini sangat aman, tetapi memang para TNI-Polri yang ada disini memberikan keamanan bagi masyarakat di Kabupaten Mimika sehingga kami merasakan keamanan itu sampai saat ini tidak ada masalah dan apalagi salah satu pemicu yang terjadi di Kab. Timika itu hanya miras, tetapi kemarin tanggal 10 September sudah di Deklarasikan ini sekarang akan membangun posko supaya dapat menolak pergerakan miras di Kab. Timika ini, salah satu pemicu keamanan di Kab. Timika itu baik itu korban di rumah tangga korban di jalan dan lain sebagainya tetapi karena da generasi, bahwa tidak boleh ada peredaran miras di Kab. Timika.

(Ada kebijakan pimpinan daerah tentang ini pak maksudnya ada SK Bupati)

Pendeta Moses Logmeres. Ada pak, Bupati sendiri sudah menyatakan tidak boleh kemudian Dandim sudah mempertaruhkan jabatannya, tidak boleh ada penjualan miras di Kab. Timika ini karena itu sudah satu faktor yang bisa membuat masyarakat ini tidak aman dan kekerasannya banyak.

(Ada kerjasama FKUB dengan Kodim untuk kegiatan diluar)

Pendeta Moses Logmeres. Ada pak jadi dia lewat deklarasi pak, deklarasi ini salah satu ikon mengajak masyarakat LMS-LMS yang mempunyai aktivitas tinggi di daerah ini mereka membuat komitmen dengan deklarasi tersebut kalau secara Yuridis ini salah satu belum pernah di buat oleh TNI.

Luki Matena SH. Msi. Ketua FKDM Kab. Mimika suku ambon agama Kristen pekerjaan sehari-hari di humas RSUD Kab. Mimika. Dalam rangka penulisan bapak dalam tes ini saya melihat sebuah aspek yang secara akademis saat ini timika lagi menjadi pergulutan bahkan perkumpulan besar terkait dengan eksalasi keamanan Kab. Timika sebenarnya eklarasi dalam kontek umum ada sebuah aksi pergerakan Cuma dia sifatnya pada cipta kondisi dari kelompok-kelompok masyarakat ini menjadi sebuah retakan, miras ini salah satu menjadi pintu masuk semua Komponen TNI-Polri pemerintah sudah melaksanakan sebuah fungsi cuman didalam sebuah Inflementasi hubungan konflik antara stafholder yang mempunyai stabilitas tentang keamanan ini tidak menyatu, TNI-Polri unsur-unsur kemasyarakatan ini dia tidak menyatu sebuah kristal seharusnya yang punya regulasi itu adalah Pemkab, saya ambil kata dari tahun 2000 sampai sekarang ini kita melihat analisis Pemda ini apasih yang mereka sudah lakukan dengan

regulasinya dan apa yang mereka sudah mantabkan dengan stafholder ini semua, jumlah kriminal di pemda saja tidak tau di anggap beban itu adalah persoalan teritoris dan dia mengharapkan masyarakat punya peduli untuk membangun, sebatas itu yang di harapkan. Dan saya melihat hubungan masyarakat dengan Pemda ini putus tetapi yang lebih menyentuh itu TNI-Polri ada perhatian yang sangat besar kepada masyarakat TNI-Polri sangat peduli, berapa banyak kegiatan Pemda ini yang mengajak masyarakat yang sifatnya mewujudkan stabilitas cuman dia semua sifatnya program misalnya Kesbampol pemerintahan tentang kampung cuma dia sifatnya mengajak tapi setelah itu dia tidak terbekasi.

TIMIKA III

Jadi masyarakat ini terputus sekali pak ketika ada konflik baru di ajak sedangkan tujuan dari bupati yang sekarang ini adalah melaksanakan Timika damai dan sejahtera, akhirnya masyarakat ini selalu di respon dari TNI-Polri dari TNI lebih banyak itu

(Seperti apa ajakan Pemkab dengan masyarakat ketika ada Konflik horizontal.)

Luki Matena. Boleh dikatakan bahwa tokoh-tokoh banyak jadi Bemter saja dalam dalam situasi seperti itu artinya begini pak kami sadar bahwa punya tanggung jawab besar untuk membudidayakan tapi bagaimana dia dengan infrastruktur yang tadi itu sehingga lebih kristal itu tidak jalan kebijakan- kebijakan itu tidak dikawal.

(Apa material yang diberikan oleh Pemkab untuk menghadapi Konflik dan bakar batu itu apakah masih di manfaatkan)

Luki Matena. Tidak ada material pak, dan untuk bakar batu itu pada saat pertikaiaan baru dikeluarkan senjatanya itu padahal yang diharapkan adalah sebuah insentitas yang tinggi.

(menurut pendapat bapak mana lebih efisien pada saat terjadi konflik ada bakar batu atau sebelum terjadi konflik materi yang diberikan bakar batu itu dimanfaatkan untuk kegiatan)

Luki Matena. Konflik terjadi baru kita lakukan bakar batu tidak efektif cuman dia sifatnya seperti gunung es pak nanti suatu ketika sudah tidak membekas lagi.

(Dengan kejadian di Jayanti berlalu beberapa saat beberapa tahun dengan sekarang apakah ada peningkatan, dan apakah bapak tau Nomor 2 Impres tahun 2013 dan Nomor 1 tentang pengamanan gangguan Kamdagri)

Luki Matena. Peningkatan- peningkatan keamanan ini ada pak pemerintah sudah membuat forum termasuk Impres Nomor 1 tahun 2014 itu Bupati sendiri sebagai ketuanya dan itu tidak terlaksana dan tidak bunya, persoalan miras menurut saya masyarakat dan TNI-Polri ini sebagai inplementasi lapangan saja yang mempunyai regulator adalah mereka berani tidak sekarang bicara persoalan miras, miras ini bukan miras lokal saja yag menjadi senter industri saja disenter tidak terkecuali cuman persoalannya deklarasi ini sebuah semangat, mohon maaf ini deklarasi cukup memberikan sebuah Sokterapi tapi dia belum mematikan alat belum

mematikan instrumen tadi itu karena ada indikasi sampai sekarang peredaran miras ini masih Disperindak pak.

(Untuk kesejahtraan apa yang pas yang bisa menyelesaikan masalah itu dan terlibatnya TNI bentuk apa dan apakah di perlukan kebijakan Pemkab)

Luki Matena. Pemerintah mempunyai satuan-satuan dinas ada ketahanan pangan, Informatika, Pariwisata dan Koperasi dapat saya katakan bahwa Timika masih menyentuh potensi 3 Distrik saja dari 12 Distrik seluruhnya. Kebijakan Pemkab diperlukan sekali misalnya saudara-saudara kita orang Papua misalnya teman-teman yang terus terang tidak dapat sekolah kenapa mereka tidak dibuat sekolah kasi sekolah jangan tunggu Friport gurunya nanti kita hadirkan dari sisi kemasyarakatan orang Papua akan dibentuk jadi guru disana.

(apakah ada personel dari satuan kewilayahan yang melaksanakan ajar-mengajar di jayanti)

Luki Matena. Itu memang ada pak.

Bapak Robot. Suku Biak 16 tahun di Timika Istri orang Biak. Sampai saat ini saya bingung saya ini warga negara mana sampai saat ini saya belum pernah merasakan bahwa ada sentuhan Pemerintah Indonesia (pemerintah pusat) itu. Pertanyaan saya menarik pak saya sangat bingung pak saya ini warga negara mana dan saya butuh yang menjawab itu serius pak saya ini warga negara mana karena yang datang kesana sampai saat ini belum ada Bapak Pangdam, Bapak Kapolda itu yang saya ceritakan pak bahwa setelah konflik selesai, bangun rehabilitasi itu

bangun semua pola-pola psikologis masyarakat bersama-sama ini hanya TNI-Polri yang diminta lalu kalian dimana dalam konteks tugas pemerintahan, pernah tidak ada Kesbangpol pergi kesana lihat bagaimana perkembangan dari yang konflik itu sampai sekarang apakah ada perubahan, ini tidak ada Cuma dapat laporan saja rehabilitasi belum ada, masih enak yang kejadian di medan yang gunung sinabung bangun 30 unit rumah itu jelas pak.

Pendeta Alun Sawaki. Suku Serui bertugas di Timika selama 25 tahun. Selama ini kita mengharapkan ada perubahan itu kembali kepada tokoh agama, masyarakat kita yang mempunyai hati untuk Timika ini kalau dari sisi nurani saya percaya untuk pembangunan di daerah ini, dan perubahan satu kota itu ada pada orang-orang yang percaya pada dengan membentuk kata-kata positif.

(Apakah pernah pernah ada doa bersama FKUB dengan TNI dan apakah bapak membutuhkan doa bersama FKUB dengan TNI-Polri didalam pembinaan Teritorial apakah butuh dan apakah sudah pernah)

Pendeta Alun Sawaki. Selama ini kami mulai membangun kerjasama dengan kami sudah lakukan dengan agama lain seperti muslim tempat-tempat kegiatan ibadah mereka kami menjaga dan kerjasama dengan TNI juga ada. Selama ini kegiatan itu pernah sekali dilapangan Brigif oleh bapak Immanuel Ginting, (waktu bapak menjadi Aster)

(Pernah sekali waktu saya menjadi Aster datang Kasdam, Danrem dari merauke dan ada seni waktu itu saat ini apakah masih dibutuhkan sama FKUB)

Pendeta Alun Sawaki. Selama ini tidak ada pak, dan sangat dibutuhkan pak.

(apakah ada program pemerintah Pemkab Mimika untuk melaksanakan doa FKUB
1 hari 3 kali atau 1 hari 2 kali apakah ada atau di tempat-tempat lain)

Pendeta Alun Sawaki. Untuk sementara ini belum ada pak dan dikantor itu ada
setiap hari jumat dilakukan pak.

(program FKUB apakah ada dukungan dari Pemkab untuk melaksanakan doa-doa
bersama ini apakah dibutuhkan)

Pendeta Alun Sawaki. Mungkin selama ini belum ada pak, itu sangat dibutuhkan
kami pak kami itu butuh sekali dan kita dalam melaksanakan segala aktivitas
hanya bergantung pada doa, doa akan menjawab segala sesuatu pak.

TIMIKA IV

(Bapak-bapak sekalian dalam pembinaan TNI-Polri sudah bapak rasakan sendiri,
masih perlukah kehadiran TNI dan Polri dalam melaksanakan pembinaan
Teritorial di dalam meningkatkan keamanan , masih perlukah pembinaan Teritorial
yang dibawah Pemkab Mimika)

Jhon Lembaga. tokoh masyarakat. Menurut pribadi saya juga kerja dilembaga
swadaya adat jadi kalau dibandingkan dengan situasi keamanan beberapa tahun
lalu tahun 1960 sampai tahun 1980 itu ada sistem yang dibangun bersama Pemda
waktu itu bersama Pemda pada waktu itu sistem keamanan sangat bagus karena
pada waktu itu sampai di tingkat kampung ada yang disebut Babinsa-Babinsa di
setiap kampung ada jadi Babinsa itu tugasnya menjaga keamanan rakyat

(kampung) sehingga kampung pada tahu 1960 sampai tahun 1980 waktu itu sangat bagus itu Babinsa dulu dari Abri sedangkan Polisi itu dari Linmas, jadi sekarang itu situasinya semakin kacau baik di kampung-kampung bila ada pesta pasti ada miras pak di setiap ada kampung ada miras pak dan perkelahian itu selalu ada pak, jadi menurut saya keamanan di timika saat ini tidak terkendali pak. Sekarang masyarakat itu terlepas seperti anak ayam kehilangan induknya, tidak ada yang memimpin mereka, tidak seperti yang dulu lagi pak dulu itu di kampung-kampung guru yang tidak ada, guru hanya Babinsa-Babinsa TNI-Polri mengajak untuk mengajar membina sangat luar biasa pak dengan sukarela dan itu yang perlu dikembalikan pak.

Wakil Masyarakat. Semua orang membutuhkan keamanan, kedamaian, kita kembali intropeksi siapa kita keamanan itu datang dari siapa kalau bukan dari kita, kalau daerah aman dan damai siapa pemimpin yang mengamankan, kalau daerah itu ribut terus dari mana barang itu siapa yang bikin kacau dan juga itu menjadi pembesokan kita. Semua orang membutuhkan kedamaian, kenyamanan itulah sebagai saran saya pak.

Ketua kerukunan Timika. Kami melihat di Papua bahkan di Timika ini tidak tenang itu karena termasuk pemuda-pemudi mereka yang pengaruh miras dan keamanan yang sekarang perlu ditingkatkan pak.

Kepala suku Mori. Keadaan timika ini selalu kacau terus pak dalam 3 bulan ini dari jayapura datang, dari jakarta datang tetapi Cuma ambil data saja, sampai sekarang ini belum juga ada perubahan datang kesini Cuma ambil data kumpul-

kumpul di Kepala Suku itu percuma pak perubahan yang kita mau pak tapi harus ada 3 hukum itu harus dilakukan hukum Pemerintah, agama, dan adat. Orang pikir di Papua ini miras itu keturunan, darimana datangnya miras itu bukan sejarah orang Papua bukan keturunan orang Papua kalau kamu mau majukan Papua kita orang Indonesia coba lihat baik pak, cabut itu miras jangan bapak datang kesini hanya cari pangkat cari jabatan, datang pergi kesana diam, kenapa tidak bisa dikembangkan di Papua kunci pertama itu pak miras cabut itu miras pak, itu bukan keturunan orang Papua trimakasih.

POLRES

(Apakah ada kebijakan dari Pemkab tentang pelaksanaan tugas pembinaan diwilayah Timika ini apakah ada suratnya terus bagaimana harapan bapak Kapolres)

Kapolsek Kuanki Lamo Mimika. Mohon ijin, sudah selama 10 bulan kami disini sampai sekarang ini belum ada kami terima bentuk surat, untuk surat keputusan dari Pemda Kab. Mimika berkaitan dengan bentuk kerjasama kita dengan pemuda maupun dengan TNI sampai sekarang kami belum pernah terima, Cuma secara operasional dilapangan itu sudah kita laksanakan.

(secara Defakto itu sudah dilaksanakan tapi secara dejure belum dilaksanakan terus harapan bapak Kapolres seperti apa)

Kabag Dalmas Polres Mimika. Harapan kami sebagai payung hukum mungkin dari Pemda juga mengeluarkan apa sudah disampaikan sehingga kami pun

bertindak ada dasar yang kuat bahwa saya kelaborasi yang terbentuk ini memang ini kebijakan dari Pemda.

(Tingkat Polres apakah ada surat dari Pemkab, Pemprov tentang pelaksanaan kalau pelaksanaan pemili ada suratnya dan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apakah ada dari Pemkab ke Polres)

Staf Polres Mimika. Tidak ada surat perintah pelaksanaan kerja samanya dan secara defaktonya tidak pernah melihat itu baik dari puncak pimpinan sebagai tugas dan jabatan saya selalu ada penugasan sehari-hari dan kerja sama selalu kita harapkan tetapi melalui surat belum pernah ada.



Lampiran 4

TABEL-TABEL

Tabel Deskripsi Frekuensi Jawaban Tiap Pertanyaan Pada Variabel X_1

Jwb	Pertanyaan																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SS	12	4	3	8	8	3	4	11	7	10	9	1	2	4	10	8	9	7	7	11
S	26	25	26	26	27	35	27	21	23	24	29	29	21	22	22	25	25	27	22	19
R	4	13	13	6	7	4	10	9	12	8	4	11	16	15	10	8	8	6	11	11
TS	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	3	1	0	1	0	2	2	1
STS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hasil Data Olahan

Tabel Deskripsi Frekuensi Jawaban Tiap Pertanyaan pada Variabel X_2

Jwb	Pertanyaan																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SS	6	12	3	16	17	11	8	20	21	16	3	14	8	10	12	11	7	16	23	16
S	30	27	31	24	23	24	24	15	13	11	20	21	20	26	25	19	24	18	13	12
R	6	3	8	2	2	7	10	7	8	15	17	6	13	5	3	12	11	7	6	10
TS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	11	2	0	0	1	0	4
STS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Hasil Data Olahan

Tabel Deskripsi Frekuensi Jawaban Tiap Pertanyaan pada Variabel X₃

Jwb	Pertanyaan																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SS	2	10	8	1	2	12	8	6	1	4	6	12	9	7	5	13	9	7	1	4
S	22	28	19	21	23	22	25	27	16	25	18	17	25	18	17	18	20	20	12	20
R	13	4	10	19	14	6	5	8	21	11	13	7	6	13	17	9	9	12	24	15
TS	3	0	2	1	0	2	3	1	3	2	3	5	2	4	1	0	1	1	3	3
STS	2	0	3	0	3	0	1	0	1	0	2	1	0	0	2	2	3	2	2	0

Hasil Data Olahan

Tabel Deskripsi Frekuensi Jawaban Tiap Pertanyaan pada Variabel Y

Jwb	Pertanyaan																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SS	15	10	6	6	11	13	12	15	9	10	4	3	5	7	2	3	10	7	10	11
S	13	22	24	22	16	20	21	17	16	27	24	25	27	27	35	27	21	22	23	17
R	13	10	10	12	13	6	8	9	15	4	13	14	8	7	3	12	10	12	9	11
TS	1	0	2	1	2	2	0	1	2	0	1	0	2	1	0	0	1	1	0	3
STS	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hasil Data Olahan

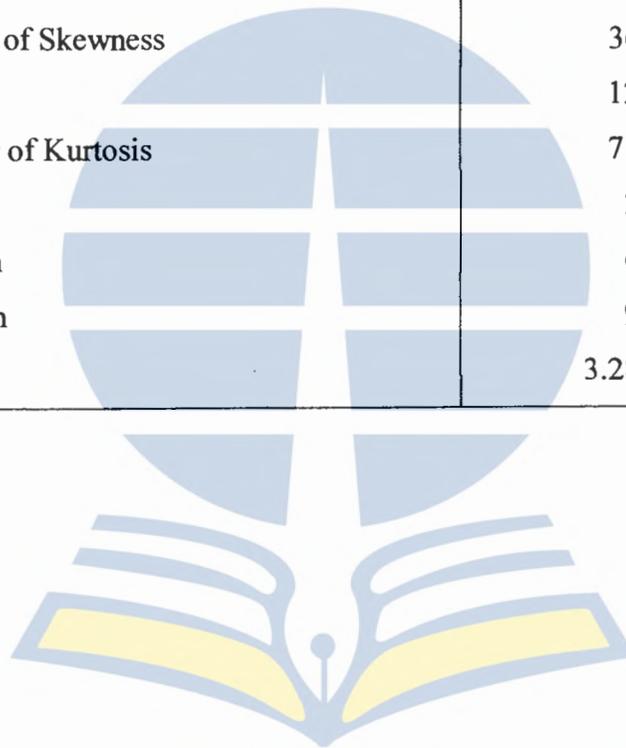
Tabel Uji Validitas

No Pert.	r^{hitung} X1	Ket.	r^{hitung} X2	Ket.	r^{hitung} X3	Ket.	r^{hitung} Y	Ket.	r^{tabel}
1	0.347	Valid	0.413	Valid	0.535	Valid	0.414	Valid	0.304
2	0.373	Valid	0.416	Valid	0.329	Valid	0.332	Valid	0.304
3	0.378	Valid	0.366	Valid	0.498	Valid	0.401	Valid	0.304
4	0.390	Valid	0.359	Valid	0.359	Valid	0.593	Valid	0.304
5	0.19	Valid	0.388	Valid	0.521	Valid	0.358	Valid	0.304
6	0.395	Valid	0.371	Valid	0.512	Valid	0.605	Valid	0.304
7	0.342	Valid	0.443	Valid	0.364	Valid	0.611	Valid	0.304
8	0.477	Valid	0.351	Valid	0.366	Valid	0.362	Valid	0.304
9	0.354	Valid	0.508	Valid	0.432	Valid	0.434	Valid	0.304
10	0.325	Valid	0.373	Valid	0.505	Valid	0.475	Valid	0.304
11	0.420	Valid	0.511	Valid	0.468	Valid	0.389	Valid	0.304
12	0.372	Valid	0.380	Valid	0.486	Valid	0.311	Valid	0.304
13	0.432	Valid	0.396	Valid	0.508	Valid	0.443	Valid	0.304
14	0.502	Valid	0.553	Valid	0.335	Valid	0.490	Valid	0.304
15	0.406	Valid	0.471	Valid	0.519	Valid	0.393	Valid	0.304
16	0.570	Valid	0.411	Valid	0.471	Valid	0.310	Valid	0.304
17	0.552	Valid	0.350	Valid	0.556	Valid	0.384	Valid	0.304
18	0.325	Valid	0.394	Valid	0.525	Valid	0.349	Valid	0.304
19	0.420	Valid	0.315	Valid	0.489	Valid	0.503	Valid	0.304
20	0.523	Valid	0.307	Valid	0.442	Valid	0.347	Valid	0.304



Tabel Data statistic skewness dan kurtosis variable Kebijakan Binter

N	Valid	42
Missing		0
Mean		78,14
Std. error of mean		836
Median		78.14 ^a
Mode		75 ^b
Std. deviation		5.417
Variance		29.345
Skewness		402
Std. Enor of Skewness		365
Kurtosis		125
Std. Error of Kurtosis		717
Range		24
Minimum		67
Maximum		91
Sum		3.282



Tabel Data Statistik Skewness dan Kurtosis Variabel Konflik di Timika

N	Valid	42
Missing		0
Mean		81.60
Std. error of mean		876
Median		82.25 ^a
Mode		83
Std. deviation		5.679
Variance		32.247
Skewness		-163
Std. Enor of Skewness		365
Kurtosis		1.496
Std. Error of Kurtosis		717
Range		32
Minimum		65
Maximum		97
Sum		3427

Tabel Data Statistik Skewness dan Kurtosis Variabel Kepemimpinan

N	Valid	42
Missing		0
Mean		73.79
Std. error of mean		1.659
Median		75.63 ^a
Mode		75 ^b
Std. deviation		10.749
Variance		115.538
Skewness		-1.596
Std. Enor of Skewness		365
Kurtosis		4.269
Std. Error of Kurtosis		717
Range		58
Minimum		37
Maximum		95
Sum		3099

Tabel Data Statistik Skewness dan Kurtosis Variabel Keamanan dalam Negeri di Timika

N	Valid	42
Missing		0
Mean		78.00
Std. error of mean		989
Median		78.63 ^a
Mode		78 ^b
Std. deviation		6.409
Variance		41.073
Skewness		-1.868
Std. Enor of Skewness		365
Kurtosis		5.870
Std. Error of Kurtosis		717
Range		36
Minimum		52
Maximum		88
Sum		3276

TABEL JAWABAN KUESIONER

Res	Jawaban pertanyaan Variabel X ₁ (Kebijakan Pembinaan Teritorial)																				Skor X ₁
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	5	4	3	4	4	4	2	4	4	5	4	5	4	4	3	4	3	4	5	4	79
2	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	76
3	5	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	3	4	82
4	4	4	3	2	3	4	4	5	4	4	4	3	2	4	3	4	4	4	4	4	73
5	5	4	5	4	4	5	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	82
6	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	4	5	77
7	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	3	4	2	4	5	78
8	5	4	3	3	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	2	77
9	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	5	3	4	5	4	79
10	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	78
11	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
12	3	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4	4	5	4	77
13	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	4	77
14	3	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	4	5	81

15	3	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	5	2	4	3	77	
16	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	3	4	3	4	3	80
17	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	3	4	3	80
18	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	3	4	5	4	3	80
19	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	3	4	81
20	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	85
21	4	4	4	3	3	4	4	4	5	4	4	3	4	4	5	4	5	4	5	4	81
22	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	3	4	5	4	3	4	2	4	77
23	5	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	73
24	4	4	4	4	4	4	4	2	5	4	4	4	3	3	4	3	4	5	4	3	76
25	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	5	4	5	4	4	4	3	77
26	4	3	4	4	4	4	4	5	3	5	4	3	3	3	4	3	4	4	4	5	77
27	4	3	4	5	4	4	4	3	5	3	4	4	2	5	4	5	4	5	4	5	81
28	4	3	4	4	5	4	3	3	4	5	4	4	3	3	4	4	4	5	4	3	77
29	4	3	4	5	5	4	5	5	3	3	4	4	3	3	4	4	5	4	3	4	79
30	4	3	4	4	5	4	3	3	4	5	5	3	3	5	3	4	3	4	3	4	76
31	4	3	4	5	4	4	4	3	3	3	5	3	3	3	3	4	3	4	3	4	72
32	4	3	4	4	5	4	4	3	4	5	5	3	3	5	3	4	5	4	3	4	79
33	4	5	4	5	4	4	4	4	3	3	5	4	3	3	4	5	4	4	3	4	79
34	4	3	4	4	5	4	4	5	4	3	4	4	3	3	4	5	4	3	4	3	77
35	3	5	4	5	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	5	4	3	76
36	4	3	4	4	5	3	4	3	3	5	4	3	3	3	4	4	4	4	4	5	76
37	4	5	3	5	4	3	4	4	5	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	5	79
38	5	3	3	4	5	3	3	3	3	4	5	4	4	3	4	4	5	4	4	5	78
39	4	3	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	3	3	4	4	5	4	3	3	79
40	4	3	3	5	5	4	4	5	3	5	5	4	3	3	3	4	4	4	5	3	79
41	3	3	3	5	4	3	4	3	5	4	5	4	3	3	5	5	4	3	5	5	79
42	5	5	3	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	3	5	3	5	4	3	5	82

Res	Jawaban pertanyaan Variabel X ₂ (Konflik)																				Skor X ₂
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	4	3	4	4	5	5	4	5	3	5	4	4	3	4	2	4	5	4	5	4	81
2	4	5	4	4	4	3	4	4	5	3	4	2	4	4	5	4	3	4	5	4	79
3	4	5	4	4	4	4	3	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	2	5	4	81
4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	2	80
5	4	4	4	4	2	4	4	4	5	3	4	5	4	4	4	4	4	4	3	5	79
6	5	4	3	5	4	4	3	4	5	5	2	3	4	5	4	3	4	3	5	5	80
7	3	4	3	5	5	4	3	5	3	5	4	5	3	4	4	3	4	5	3	5	80
8	4	4	5	4	5	3	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	3	4	5	5	88
9	4	5	4	4	5	4	5	3	5	5	4	5	5	4	2	4	5	4	5	2	84
10	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	3	4	5	5	4	4	5	3	86
11	4	5	4	4	4	4	4	3	5	3	4	4	3	4	5	4	4	4	5	3	80

12	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	2	4	5	4	4	4	4	3	5	79	
13	5	4	4	5	4	4	4	3	5	4	5	4	3	5	4	3	4	5	4	5	84
14	3	4	3	5	4	5	4	5	4	3	3	4	5	4	4	3	4	3	5	5	80
15	3	4	3	5	4	5	5	5	4	3	3	5	4	3	4	5	3	3	5	5	81
16	4	4	3	5	4	4	5	5	4	3	3	3	4	3	4	5	4	5	4	3	79
17	4	5	4	5	4	4	5	4	5	3	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	88
18	5	4	4	5	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	85
19	4	4	4	5	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	85
20	3	4	4	5	4	4	4	4	5	3	4	4	5	4	4	3	4	5	4	5	82
21	4	4	4	2	5	5	4	4	5	5	4	4	3	4	4	3	3	4	5	4	80
22	4	4	5	4	5	3	4	5	3	5	3	4	3	4	4	5	5	4	5	4	83
23	4	5	4	4	5	4	3	5	3	5	3	5	4	4	3	4	3	4	5	4	81
24	4	5	4	4	5	4	3	5	3	5	4	3	4	4	5	4	3	4	5	3	81
25	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	3	4	5	4	4	4	5	4	5	87
26	5	4	4	4	2	4	3	5	3	3	4	5	4	5	4	4	4	5	3	5	80
27	3	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	3	5	83
28	4	4	5	5	4	5	4	4	5	3	4	5	3	4	4	5	4	5	4	5	86
29	4	4	3	4	4	5	4	4	5	4	3	4	5	4	4	5	3	4	5	3	81
30	4	4	3	4	4	5	4	4	5	3	5	4	3	4	5	4	3	4	5	3	80
31	4	5	4	4	4	3	4	4	5	4	3	4	3	4	5	4	3	4	5	4	80
32	4	5	4	4	5	4	4	4	5	3	5	4	4	4	3	5	4	4	5	4	84
33	5	4	4	4	5	4	3	3	4	5	3	4	4	5	4	5	4	4	4	4	82
34	3	4	4	5	4	4	3	5	4	5	3	3	4	5	4	3	4	3	5	3	78
35	4	4	4	2	4	4	4	5	5	5	3	5	4	3	4	3	4	5	5	3	80
36	4	4	3	4	4	5	4	3	4	5	3	4	4	5	4	5	4	3	5	4	81
37	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	3	4	5	4	4	3	5	3	4	4	83
38	4	5	4	4	4	5	4	3	3	4	3	4	3	4	5	3	5	3	3	4	77
39	4	3	4	4	5	3	4	5	3	4	3	4	3	4	3	5	3	5	4	3	76
40	5	4	4	4	5	5	3	5	4	4	3	4	5	4	5	5	3	5	4	2	83
41	4	3	4	5	5	3	5	5	4	4	3	5	3	4	5	3	5	5	4	3	82
42	4	4	4	5	5	3	3	5	4	3	3	5	3	3	5	3	5	5	4	2	78



Res	Jawaban pertanyaan Variabel X_3 (Kepemimpinan)																				Skor X_3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	4	3	4	3	4	2	4	2	5	4	1	4	3	4	3	4	1	4	5	4	68
2	4	3	4	5	4	3	4	3	3	4	2	4	5	4	3	4	3	4	2	4	72
3	4	5	4	3	4	5	4	3	3	4	5	4	5	4	3	4	5	4	2	4	79
4	4	4	4	3	4	5	4	4	3	4	5	4	5	4	2	4	4	4	3	4	78
5	5	4	5	4	3	4	1	4	3	5	4	5	4	3	4	3	4	2	4	3	74
6	2	4	5	4	3	4	2	4	4	3	4	5	4	3	4	3	4	1	4	3	70
7	4	4	2	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	70
8	4	5	4	4	1	4	3	3	3	4	4	3	4	2	4	5	3	4	4	2	70
9	4	3	4	3	4	5	4	4	3	4	5	4	3	4	3	4	2	4	3	4	74
10	4	3	4	2	4	3	4	4	3	4	5	4	3	4	3	4	5	4	3	4	74
11	1	4	4	3	4	5	4	4	3	4	1	4	5	4	3	4	5	4	3	4	73
12	3	4	2	4	4	5	4	3	4	3	4	4	5	4	1	4	3	3	4	4	72
13	3	4	5	4	3	4	3	4	4	5	4	3	4	2	4	5	4	3	4	3	75
14	4	4	3	4	3	4	2	4	4	3	4	5	4	5	4	1	4	3	4	3	72
15	4	5	4	4	3	4	3	4	4	3	4	5	4	5	4	5	4	1	4	3	77
16	4	5	4	3	4	4	5	4	3	4	3	4	4	5	4	5	4	3	3	4	79
17	4	5	4	3	4	3	4	5	3	4	3	4	3	4	3	4	1	4	3	4	72
18	3	4	4	3	4	5	4	5	3	4	3	4	3	4	3	4	1	4	3	4	72
19	3	4	3	4	4	2	4	5	3	4	3	4	5	4	3	4	5	4	3	4	75
20	3	4	3	4	5	4	4	5	4	2	4	3	4	4	1	4	3	4	3	2	70
21	3	4	3	4	3	4	3	4	4	2	4	3	4	3	4	1	4	3	1	5	66
22	4	5	3	4	3	4	5	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	74
23	4	4	5	3	4	4	5	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	75
24	4	4	5	3	4	5	4	4	3	4	5	4	3	4	4	3	4	3	3	4	77
25	4	5	3	4	4	5	4	5	3	4	5	4	2	4	3	4	3	4	2	4	76
26	3	4	3	4	4	4	4	5	4	3	4	4	2	4	3	4	3	4	3	3	72
27	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	5	4	5	4	3	4	3	3	74
28	4	4	5	4	3	4	2	4	3	4	4	5	4	5	4	4	3	4	3	3	76
29	4	4	1	3	4	4	5	4	3	4	4	5	4	2	4	3	4	3	1	5	71
30	4	5	4	3	4	3	4	4	3	4	3	2	4	2	4	3	4	5	3	4	72
31	4	5	4	3	4	5	4	4	3	4	3	1	4	5	4	3	4	5	3	4	76
32	1	4	4	3	4	5	4	3	4	3	4	2	5	4	5	5	4	5	3	4	76
33	3	4	5	3	3	4	4	3	4	3	4	5	4	3	4	5	3	4	3	4	75
34	5	4	5	3	3	4	5	4	4	5	3	5	4	3	3	5	5	4	3	3	80
35	4	4	3	3	4	4	5	4	3	4	3	4	4	3	3	4	5	4	3	3	74
36	4	5	1	4	3	4	4	4	2	4	3	5	4	3	3	4	5	4	3	3	72
37	3	4	4	4	1	3	4	4	2	4	2	2	5	4	5	5	4	5	4	3	72
38	3	4	4	4	5	5	4	3	4	4	3	5	4	5	5	5	4	5	4	3	83
39	2	4	3	4	1	4	4	4	2	5	2	2	4	5	3	5	4	3	4	3	68
40	3	4	1	4	3	4	5	4	4	3	3	5	4	3	3	5	4	3	4	5	74
41	2	4	4	3	4	3	5	4	4	3	3	5	4	3	3	5	5	5	3	5	77
42	3	4	4	3	4	5	4	4	1	4	3	2	4	3	5	5	5	5	3	2	73

Res	Jawaban pertanyaan Variabel Y (Kualitas Keamanan)																				Skor X_3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	5	4	3	4	2	5	4	5	5	4	1	4	3	4	4	3	4	5	4	3	76
2	5	4	3	4	3	4	4	5	5	4	5	4	3	4	4	4	4	5	4	3	81
3	5	4	3	4	2	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	3	78
4	4	3	4	5	4	5	5	4	4	5	3	4	4	3	4	4	2	4	5	4	80
5	3	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3	4	4	5	4	83
6	5	4	4	1	4	4	5	4	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	78
7	5	4	3	4	3	4	5	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	2	79
8	5	3	4	4	3	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	77
9	4	5	4	4	3	5	4	5	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	5	4	80
10	4	5	4	2	4	5	4	5	4	3	4	5	4	5	4	3	4	4	3	4	80
11	4	3	4	5	4	5	4	5	5	3	4	5	4	4	4	3	4	5	4	4	83
12	3	5	4	3	4	4	5	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	3	80
13	3	5	4	3	3	4	1	4	3	4	5	4	3	4	4	4	5	4	4	5	76
14	3	5	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	5	4	5	4	76
15	2	3	4	5	3	5	4	5	4	4	4	5	3	4	4	3	4	4	5	4	79
16	3	4	5	4	3	5	4	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4	80
17	5	4	3	4	3	3	4	5	4	1	4	3	5	4	4	4	4	2	4	3	73
18	5	4	3	4	5	3	3	3	5	4	4	4	5	5	4	4	3	4	4	3	79
19	5	3	4	5	5	4	3	5	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	5	4	80
20	4	5	4	3	5	4	3	5	4	4	4	3	4	4	5	4	3	4	5	4	81
21	4	5	2	4	5	4	3	5	4	5	4	3	4	4	5	4	5	3	4	4	81
22	4	5	4	4	5	3	4	3	3	5	4	3	4	3	4	4	4	3	4	5	78
23	3	4	5	4	4	5	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	5	77
24	3	4	5	3	4	5	4	3	4	4	5	4	4	5	4	3	4	3	3	4	78
25	3	4	5	4	4	5	3	4	4	4	5	4	2	4	3	4	5	4	3	4	78
26	3	5	4	4	3	4	5	4	3	5	4	4	5	2	4	4	5	4	3	4	79
27	5	3	4	4	3	4	5	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	78
28	5	4	4	3	3	4	5	4	4	5	4	3	4	5	4	3	4	3	4	3	78
29	5	4	5	4	3	3	5	4	2	5	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	75
30	4	4	5	4	3	4	5	4	3	4	4	3	4	3	4	4	5	4	4	5	80
31	4	5	4	4	5	4	3	5	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	77
32	4	3	4	5	4	4	3	5	3	4	3	4	4	5	4	3	3	4	5	4	78
33	3	4	4	3	4	3	5	5	2	5	4	4	3	4	2	4	3	3	3	5	73
34	3	4	3	4	4	4	5	4	5	5	4	4	3	4	2	4	3	4	5	3	77
35	3	4	5	4	5	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	5	77
36	5	4	3	4	5	4	3	4	3	4	3	4	2	4	4	3	5	4	3	5	76
37	5	4	3	3	5	5	4	3	3	4	3	4	5	4	4	5	5	3	4	5	81
38	5	4	3	4	5	5	4	3	5	5	3	4	5	4	4	4	5	4	5	5	86
39	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	5	3	4	5	75
40	4	3	4	3	4	2	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	2	70
41	4	3	4	3	4	2	4	3	3	4	3	4	4	5	4	5	4	3	4	2	72
42	3	4	4	3	5	1	4	2	5	4	4	3	4	4	4	5	4	3	4	3	73

**Lampiran 4 :Tabel r Pearson (*Product Moment*) , nilai t, dan nilai F
Tabel Nilai r Pearson (*Product Moment*)**

N	5% (0,05)	1% (0,01)	N	5% (0,05)	1% (0,01)
5	0,878	0,959	38	0,320	0,413
6	0,811	0,917	39	0,316	0,408
7	0,754	0,874	40	0,312	0,403
8	0,707	0,834	41	0,308	0,398
9	0,666	0,798	42	0,304	0,393
10	0,632	0,765	43	0,301	0,389
11	0,602	0,735	44	0,297	0,384
12	0,576	0,708	45	0,294	0,380
13	0,553	0,684	46	0,291	0,376
14	0,532	0,661	47	0,288	0,372
15	0,514	0,641	48	0,284	0,368
16	0,497	0,623	49	0,281	0,364
17	0,482	0,606	50	0,279	0,361
18	0,468	0,590	55	0,266	0,345
19	0,456	0,575	60	0,254	0,330
20	0,444	0,561	65	0,244	0,317
21	0,433	0,549	70	0,235	0,306
22	0,423	0,537	75	0,227	0,296
23	0,413	0,526	80	0,220	0,286
24	0,404	0,515	85	0,213	0,278
25	0,396	0,505	90	0,207	0,270
26	0,388	0,496	95	0,202	0,263
27	0,381	0,487	100	0,195	0,256
28	0,374	0,478	125	0,176	0,210
29	0,367	0,470	150	1,159	0,210
30	0,361	0,463	175	0,148	0,194
31	0,355	0,456	200	0,138	0,181
32	0,349	0,449	300	0,113	0,148
33	0,344	0,442	400	0,098	0,128
34	0,339	0,436	500	0,088	0,115
35	0,334	0,430	600	0,080	0,105
36	0,329	0,424	Sumber : Sugiyono, 2004		
37	0,325	0,418			

Tabel Nilai t

db	5% (0,05)	1% (0,01)	db	5% (0,05)	1% (0,01)
3	2,353	4,541	52	1,675	2,400
4	2,132	3,747	53	1,674	2,399
5	2,015	3,365	54	1,674	2,397
6	1,943	3,143	55	1,673	2,396
7	1,895	2,998	56	1,673	2,395
8	1,860	2,896	57	1,672	2,394
9	1,833	2,821	58	1,672	2,392
10	1,812	2,764	59	1,671	2,391
11	1,796	2,718	60	1,671	2,390
12	1,782	2,681	61	1,670	2,389
13	1,771	2,650	62	1,670	2,388
14	1,761	2,624	63	1,669	2,387
15	1,753	2,602	64	1,669	2,386
16	1,746	2,583	65	1,669	2,385
17	1,740	2,567	66	1,668	2,384
18	1,734	2,552	67	1,668	2,383
19	1,729	2,539	68	1,668	2,382
20	1,725	2,528	69	1,667	2,382
21	1,721	2,518	70	1,667	2,381
22	1,717	2,508	71	1,667	2,380
23	1,714	2,500	72	1,666	2,379
24	1,711	2,492	73	1,666	2,379
25	1,708	2,485	74	1,666	2,378
26	1,706	2,479	75	1,665	2,377
27	1,703	2,473	76	1,665	2,376
28	1,701	2,467	77	1,665	2,376
29	1,699	2,462	78	1,665	2,375
30	1,697	2,457	79	1,664	2,374
31	1,696	2,453	80	1,664	2,374
32	1,694	2,449	81	1,664	2,373
33	1,692	2,445	82	1,664	2,373
34	1,691	2,441	83	1,663	2,372
35	1,690	2,438	84	1,663	2,372
36	1,688	2,434	85	1,663	2,371
37	1,687	2,431	86	1,663	2,370
38	1,686	2,429	87	1,663	2,370
39	1,685	2,426	88	1,662	2,369
40	1,684	2,423	89	1,662	2,369
41	1,683	2,421	90	1,662	2,368
42	1,682	2,418	91	1,662	2,368
43	1,681	2,416	92	1,662	2,368
44	1,680	2,414	93	1,661	2,367
45	1,679	2,412	94	1,661	2,367
46	1,679	2,410	95	1,661	2,366
47	1,678	2,408	96	1,661	2,366
48	1,677	2,407	97	1,661	2,365
49	1,677	2,405	98	1,661	2,365
50	1,676	2,403	99	1,660	2,365
51	1,675	2,402	100	1,660	2,364

Tabel Nilai F (5%)

db Penyebut	db Pembilang									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217	3,135	3,072	3,020	2,978
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095	3,012	2,948	2,896	2,854
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996	2,913	2,849	2,796	2,753
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915	2,832	2,767	2,714	2,671
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848	2,764	2,699	2,646	2,602
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790	2,707	2,641	2,588	2,544
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741	2,657	2,591	2,538	2,494
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699	2,614	2,548	2,494	2,450
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661	2,577	2,510	2,456	2,412
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628	2,544	2,477	2,423	2,378
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599	2,514	2,447	2,393	2,348
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573	2,488	2,420	2,366	2,321
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549	2,464	2,397	2,342	2,297
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528	2,442	2,375	2,320	2,275
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508	2,423	2,355	2,300	2,255
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490	2,405	2,337	2,282	2,236
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474	2,388	2,321	2,265	2,220
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459	2,373	2,305	2,250	2,204
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445	2,359	2,291	2,236	2,190
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432	2,346	2,278	2,223	2,177
30	4,171	3,316	2,922	2,690	2,534	2,421	2,334	2,266	2,211	2,165
31	4,160	3,305	2,911	2,679	2,523	2,409	2,323	2,255	2,199	2,153
32	4,149	3,295	2,901	2,668	2,512	2,399	2,313	2,244	2,189	2,142
33	4,139	3,285	2,892	2,659	2,503	2,389	2,303	2,235	2,179	2,133
34	4,130	3,276	2,883	2,650	2,494	2,380	2,294	2,225	2,170	2,123
35	4,121	3,267	2,874	2,641	2,485	2,372	2,285	2,217	2,161	2,114
36	4,113	3,259	2,866	2,634	2,477	2,364	2,277	2,209	2,153	2,106
37	4,105	3,252	2,859	2,626	2,470	2,356	2,270	2,201	2,145	2,098
38	4,098	3,245	2,852	2,619	2,463	2,349	2,262	2,194	2,138	2,091
39	4,091	3,238	2,845	2,612	2,456	2,342	2,255	2,187	2,131	2,084
40	4,085	3,232	2,839	2,606	2,449	2,336	2,249	2,180	2,124	2,077
41	4,079	3,226	2,833	2,600	2,443	2,330	2,243	2,174	2,118	2,071
42	4,073	3,220	2,827	2,594	2,438	2,324	2,237	2,168	2,112	2,065
43	4,067	3,214	2,822	2,589	2,432	2,318	2,232	2,163	2,106	2,059
44	4,062	3,209	2,816	2,584	2,427	2,313	2,226	2,157	2,101	2,054
45	4,057	3,204	2,812	2,579	2,422	2,308	2,221	2,152	2,096	2,049
46	4,052	3,200	2,807	2,574	2,417	2,304	2,216	2,147	2,091	2,044
47	4,047	3,195	2,802	2,570	2,413	2,299	2,212	2,143	2,086	2,039
48	4,043	3,191	2,798	2,565	2,409	2,295	2,207	2,138	2,082	2,035
49	4,038	3,187	2,794	2,561	2,404	2,290	2,203	2,134	2,077	2,030
50	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286	2,199	2,130	2,073	2,026
51	4,030	3,179	2,786	2,553	2,397	2,283	2,195	2,126	2,069	2,022
52	4,027	3,175	2,783	2,550	2,393	2,279	2,192	2,122	2,066	2,018
53	4,023	3,172	2,779	2,546	2,389	2,275	2,188	2,119	2,062	2,015
54	4,020	3,168	2,776	2,543	2,386	2,272	2,185	2,115	2,059	2,011
55	4,016	3,165	2,773	2,540	2,383	2,269	2,181	2,112	2,055	2,008

db Penyebut	db Pembilang									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	4,013	3,162	2,769	2,537	2,380	2,266	2,178	2,109	2,052	2,005
57	4,010	3,159	2,766	2,534	2,377	2,263	2,175	2,106	2,049	2,001
58	4,007	3,156	2,764	2,531	2,374	2,260	2,172	2,103	2,046	1,998
59	4,004	3,153	2,761	2,528	2,371	2,257	2,169	2,100	2,043	1,995
60	4,001	3,150	2,758	2,525	2,368	2,254	2,167	2,097	2,040	1,993
61	3,998	3,148	2,755	2,523	2,366	2,251	2,164	2,094	2,037	1,990
62	3,996	3,145	2,753	2,520	2,363	2,249	2,161	2,092	2,035	1,987
63	3,993	3,143	2,751	2,518	2,361	2,246	2,159	2,089	2,032	1,985
64	3,991	3,140	2,748	2,515	2,358	2,244	2,156	2,087	2,030	1,982
65	3,989	3,138	2,746	2,513	2,356	2,242	2,154	2,084	2,027	1,980
66	3,986	3,136	2,744	2,511	2,354	2,239	2,152	2,082	2,025	1,977
67	3,984	3,134	2,742	2,509	2,352	2,237	2,150	2,080	2,023	1,975
68	3,982	3,132	2,740	2,507	2,350	2,235	2,148	2,078	2,021	1,973
69	3,980	3,130	2,737	2,505	2,348	2,233	2,145	2,076	2,019	1,971
70	3,978	3,128	2,736	2,503	2,346	2,231	2,143	2,074	2,017	1,969
71	3,976	3,126	2,734	2,501	2,344	2,229	2,142	2,072	2,015	1,967
72	3,974	3,124	2,732	2,499	2,342	2,227	2,140	2,070	2,013	1,965
73	3,972	3,122	2,730	2,497	2,340	2,226	2,138	2,068	2,011	1,963
74	3,970	3,120	2,728	2,495	2,338	2,224	2,136	2,066	2,009	1,961
75	3,968	3,119	2,727	2,494	2,337	2,222	2,134	2,064	2,007	1,959
76	3,967	3,117	2,725	2,492	2,335	2,220	2,133	2,063	2,006	1,958
77	3,965	3,115	2,723	2,490	2,333	2,219	2,131	2,061	2,004	1,956
78	3,963	3,114	2,722	2,489	2,332	2,217	2,129	2,059	2,002	1,954
79	3,962	3,112	2,720	2,487	2,330	2,216	2,128	2,058	2,001	1,953
80	3,960	3,111	2,719	2,486	2,329	2,214	2,126	2,056	1,999	1,951
81	3,959	3,109	2,717	2,484	2,327	2,213	2,125	2,055	1,998	1,950
82	3,957	3,108	2,716	2,483	2,326	2,211	2,123	2,053	1,996	1,948
83	3,956	3,107	2,715	2,482	2,324	2,210	2,122	2,052	1,995	1,947
84	3,955	3,105	2,713	2,480	2,323	2,209	2,121	2,051	1,993	1,945
85	3,953	3,104	2,712	2,479	2,322	2,207	2,119	2,049	1,992	1,944
86	3,952	3,103	2,711	2,478	2,321	2,206	2,118	2,048	1,991	1,943
87	3,951	3,101	2,709	2,476	2,319	2,205	2,117	2,047	1,989	1,941
88	3,949	3,100	2,708	2,475	2,318	2,203	2,115	2,045	1,988	1,940
89	3,948	3,099	2,707	2,474	2,317	2,202	2,114	2,044	1,987	1,939
90	3,947	3,098	2,706	2,473	2,316	2,201	2,113	2,043	1,986	1,938
91	3,946	3,097	2,705	2,472	2,315	2,200	2,112	2,042	1,984	1,936
92	3,945	3,095	2,704	2,471	2,313	2,199	2,111	2,041	1,983	1,935
93	3,943	3,094	2,703	2,470	2,312	2,198	2,110	2,040	1,982	1,934
94	3,942	3,093	2,701	2,469	2,311	2,197	2,109	2,038	1,981	1,933
95	3,941	3,092	2,700	2,467	2,310	2,196	2,108	2,037	1,980	1,932
96	3,940	3,091	2,699	2,466	2,309	2,195	2,106	2,036	1,979	1,931
97	3,939	3,093	2,698	2,465	2,308	2,194	2,105	2,035	1,978	1,930
98	3,938	3,089	2,697	2,465	2,307	2,193	2,104	2,034	1,977	1,929
99	3,937	3,088	2,696	2,464	2,306	2,192	2,103	2,033	1,976	1,928
100	3,936	3,087	2,696	2,463	2,305	2,191	2,103	2,032	1,975	1,927

Sumber : Compute dari SPSS